

Perempuan dan Ketahanan Nasional

Penulis:

Dr. Luh Putu Vera Astri Pujayanti, S.H., M.H

Dr. Arwanto Ginting, S.STP, M.Si

Perempuan dan Ketahanan Nasional

Inteligensia Media

2024

Perempuan dan Ketahanan Nasional

Penulis : Dr. Luh Putu Vera Astri Pujayanti, S.H., M.H.
Dr. Arwanto Ginting, S.STP., M.Si.

Desain sampul : Dana Ari

Tata letak : Alfinanda Farids

ISBN: 978-623-381-242-9

Copyright © Oktober, 2024

Diterbitkan oleh:

Inteligensia Media (Intrans Publishing Group)

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email: inteligensiamedia@gmail.com

Website: inteligensiamedia.com

Anggota IKAPI No. 196/JTI/2018 Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Luh Putu Vera Astri Pujayanti, S.H., M.H; Dr. Arwanto Ginting, S.STP., M.Si.

Perempuan dan Ketahanan Nasional/Penulis, Dr. Luh Putu Vera Astri Pujayanti, S.H., M.H; Dr. Arwanto Ginting, S.STP., M.Si.

Cet. 1.—Malang: Inteligencia Media, 2024; viii + 74 hlm; 18,2 cm x 25,7 cm

1. Gender/Jenis Kelamin— I. Judul II. Perpustakaan Nasional

305

Didistribusikan oleh

PT. Bumi Puthuk Shankara (Bikara)

Jl. Joyosuko Agung 86 Malang

Telp. 0341-5080245

Email: bikara86@gmail.com

Pengantar Penulis

Hampir seluruh negara di dunia saat ini semakin menyadari bahwa pembangunan manusia seutuhnya, dapat terwujud jika ada pemberdayaan dan kesetaraan hak sebagai manusia seutuhnya. Suyanto dan Susanti mengatakan bahwa, kegiatan dan program pembangunan yang semata-mata mementingkan pertumbuhan ekonomi dan tidak memiliki visi gender, niscaya akan menimbulkan pemiskinan dan ketimpangan sosial (Suyanto dan Susanti, 1995: 86).

Di Indonesia sendiri, sejak tahun 1999, di dalam GBHN telah mengarahkan kebijakan pemerintah pada pemberdayaan perempuan, di mana dikatakan bahwa “Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diimbangi oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender”. Melalui konsep inilah kemitrasejajaran antara perempuan dan laki-laki, diharapkan perempuan dapat lebih banyak untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan nasional. Meskipun hingga kini kenyataannya kebijakan negara tersebut mengandung kontradiksi, di mana di satu sisi negara berusaha tetap mempertahankan konsep perempuan sebagai ibu rumah tangga, sementara di sisi lain, kaum perempuan didorong untuk aktif dan kreatif bekerja diluar rumah.

Bersama dengan lahirnya konvensi *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1979 oleh PBB, dan Pemerintah Indonesia telah menandatangani protokol opsional CEDAW tentang penghapusan segala bentuk tindak diskriminatif dan kekerasan terhadap kaum Perempuan, telah menjadi bagian kewajiban pemerintah untuk menerima dan meratifikasinya dalam semua peraturan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan nasional sampai dengan tingkat daerah. Dan salah satu implementasinya adalah dengan dibentuknya Pokja (Kelompok Kerja) khusus perempuan pada tahun 2007, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan (*empowerment*) melalui legislasi dan kebijakan publik.

Namun sayangnya hingga kini, upaya pemerintah tersebut masih terus melahirkan dilema baru di berbagai berbagai aspek kehidupan, baik yuridis konstitusional maupun aspek adat-istiadat. Di mana mayoritas masyarakat Indonesia berada di wilayah timur belahan dunia, yang masih menganut budaya bias patriarki dalam ruang publik. Aspek religi memengaruhi dengan sangat kuat norma-norma yang tumbuh dan berkembang, membentuk serta memengaruhi kultur budaya Indonesia. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor utama dan pemicu bagi para pemegang kebijakan (pemerintah) dalam melakukan ratifikasi tersebut.

Salah satu contoh masalah yuridis yang mudah terlihat ada pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Namun pada pasal lainnya pemerintah juga memberikan status dan kedudukan antara peran laki-laki dan perempuan pada Pasal 31 ayat 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Hal ini tentu saja menegaskan peran dan fungsi masing-masing di dalam rumah tangga. Di mana kemudian diperjelas pada pasal 34 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri

wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” Melalui kedua pasal ini memperlihatkan dengan jelas peran pemerintah memberikan kepastian hukum, melalui UU Perkawinan dengan melegalkan secara yuridis, bagaimana peran patriarki yang bersifat stereotip terhadap kaum perempuan dengan menempatkannya sebagai makhluk domestik dalam sebuah rumah tangga.

Telah terjadi dikotomi peran seksual antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga. Perempuan identik pada urusannya dapur (rumah tangga), dan stigma dapur menjadi aturan tidak tertulis seakan-akan diperuntukkan bagi yang berjenis kelamin perempuan. Hal-hal seperti inilah yang dipandang sebagai salah satu bentuk diskriminasi menurut CEDAW karena terlihat sangat mendistorsi peran, fungsi dan potensi perempuan dalam hukum dan secara politis.

Sehingga pemerintah kemudian menerbitkan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita, untuk memberikan legalitas terhadap ratifikasi CEDAW, di mana tindakan diskriminasi yang harus dihapus adalah: “setiap perbedaan, pengucilan, pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan.

Maka ketika kita berbicara tentang Perempuan, kita juga akan berbicara tentang keluarga. Karena Perempuan identik dengan perkawinan dan memiliki anak. Sedari dulu hingga kini, Perempuan masih dituntut untuk menjadi Wanita seutuhnya jika telah menikah dan memiliki anak. Tak heran jika hingga saat ini, masih banyak Perempuan yang begitu ketakutan saat di usia dewasa belum juga menikah dan berkeluarga. Dipaksa menikah cepat oleh keluarga besar, tanpa persiapan fisik, mental dan finansial. Dan beberapa akibat yang muncul saat ini adalah tingginya peristiwa KDRT, *stunting*, perceraian, dan anak-anak yang bermasalah. Semua ini terjadi karena pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan matang dan membentuk keluarga yang tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya.

Keluarga yang merupakan satuan terkecil dari masyarakat memiliki fungsi khusus yang tidak tergantikan dalam membangun ketahanan keluarga. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar mengatakan bahwa “ketahanan keluarga hanya dapat terwujud jika fungsi keluarga itu dapat berjalan dengan baik. Karena keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas”.

Dalam webinar “Membangun Negara dan Bangsa melalui Penguatan Ketahanan Nasional”, yang diselenggarakan oleh *Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Early Childhood Care Education and Parenting* (SEAMEO CECCEP), Selasa (18/08), Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhamnas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan bahwa “Ketahanan nasional itu sebenarnya bukanlah suatu ilmu tersendiri, tetapi ketahanan nasional itu adalah sebuah bentuk akhir,” yang bersumber dari Ketahanan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan oleh *Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Early Childhood Care Education and Parenting* (SEAMEO CECCEP), Selasa (18/08/20).¹

Gubernur Lemhanas juga menyampaikan bahwa “Ketahanan keluarga berada pada ketahanan sosial budaya, di mana elemen dasar dalam sebuah keluarga adalah adanya pemenuhan persyaratan

¹ Website <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/908-agus-widjojo-ketahanan-keluarga-merupakan-fondasi-ketahanan-nasional>

pada kesehatan, kebugaran jasmani dan intelektual para anggota keluarga. Hubungan dalam keluarga akan dimaknai dari hubungan antar anggota keluarga. Kemampuan memadukan kapasitas individual dari anggota keluarga menjadi sebuah kapasitas yang terintegrasi secara komprehensif dalam kesatuan hukum keluarga. Agus juga menegaskan bahwa pembentukan karakter seorang manusia secara individu, bukan karena pengembangan alamiah atau karena pendidikan formal, tetapi terbentuk juga melalui pendidikan informal dari keluarga, kerabat, teman, dan lingkungan sosial.”²

Keluarga sebagai pilar pertama dan utama dalam membangun bangsa, memiliki peran penting didalam membentuk sikap asah, asih dan asuh sebagai tumbuan tumbuh kembang potensi setiap anggota keluarga. Sehingga terwujudnya ketahanan nasional tidak mungkin bisa terlepas dari peran keluarga. Keluarga juga merupakan ruang lingkup pertama di dalam memberikan pembelajaran dan pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap perkembangan karakter anak. Pembentukan karakter individu sangat bergantung pada karakter keluarga yang berkembang menjadi karakter dari suatu bangsa. Sehingga baik buruknya karakter bangsa sangat ditentukan oleh karakter keluarga yang menentukan ketahanan nasional. “Memperkuat ketahanan keluarga berarti memperkuat ketahanan nasional.”

Di sinilah peran Perempuan sangat besar dalam menjalankan peran dan fungsinya, dalam ketahanan keluarga. Di mana posisi Indonesia berdasarkan *Fatherhood Index Report* 2021, disebutkan menempati peringkat ke-3 sebagai fatherless country. Indonesia dinilai sebagai fatherless country di mana peran dan keterlibatan para ayah di Indonesia dalam pengasuhan anak sangatlah minim.³ Lalu bagaimana dengan mimpi Indonesia Emas 2045, dengan bonus demografi yang luar biasa di Indonesia? Dan fenomena-fenomena yang terjadi di mana Perempuan yang secara fitrahnya menjadi tulang rusuk laki-laki berubah fungsi menjadi tulang punggung keluarga?

Perempuan adalah tiang negara. ***Untuk menghancurkan suatu negara, cukup hancurkan karakter perempuannya***, karena dengan menghancurkan perempuan sama dengan menghancurkan generasi selanjutnya, karena Perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. ***Perempuan adalah setengah dari peradaban, jika ingin mengubah dan menghancurkan sebuah peradaban, hancurkan perempuannya.***

² *Ibid*

³ <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/12/para-ayah-harus-baca-agar-indonesia-tidak-menjadi-fatherless-country>

Daftar Isi

Pengantar Penulis ____ v

Daftar Isi ____ viii

Bab 1 Perempuan dan Ketahanan Keluarga ____ 1

A. Perempuan ____ 1

B. Feminisme ____ 8

C. Ketahanan Keluarga ____ 19

Bab 2 Wawasan Nusantara ____ 28

A. Wawasan Nusantara ____ 28

B. Tujuan Wawasan Nusantara ____ 30

C. Pokok-Pokok Wawasan Nusantara ____ 31

D. Asas-Asas Wawasan Nusantara ____ 32

E. Integrasi Nasional ____ 32

Bab 3 Ketahanan Nasional ____ 35

A. Pengertian Ketahanan Nasional ____ 35

B. Metode Astagatra ____ 36

C. Aspek Trigatra ____ 37

D. Aspek Pancagatra ____ 40

E. Gejala dalam Negeri ____ 49

F. Kapita Selekta Keamanan dalam Negeri ____ 50

G. Keberhasilan Ketahanan Nasional ____ 52

H. Kedudukan dan Fungsi Konsepsi Ketahanan Nasional ____ 53

I. Hakikat Ketahanan Nasional ____ 53

Bab 4 Peradaban, Budaya dan Ketahanan Nasional ____ 55

A. Komponen Budaya ____ 55

B. Sosial Budaya dan Ketahanan Nasional ____ 59

C. Ketahanan Sosial dalam Lingkup Keluarga ____ 60

D. Fungsi Keluarga sebagai Penopang Ketahanan Sosial ____ 65

E. Ketahanan Sosial dalam Keberagaman ____ 66

F. Peran Sosial Budaya dalam Ketahanan Nasional ____ 67

G. Permasalahan & Dampak Negatif Keberagaman ____ 68

Daftar Pustaka ____ 70

Tentang Penulis ____ 73

Daftar Tabel

Tabel 1. Ketimpangan Gender di Wilayah ASEAN ____ 6

Bab 1

Perempuan dan Ketahanan Keluarga

A. Perempuan

1. Definisi

Berbicara tentang Perempuan tentu saja kita tidak bisa menghindari persoalan tentang fisik dan psikis dari Perempuan itu sendiri. Jika diperhatikan dari sudut pandang fisik maka kita akan melihat struktur komposisi biologis serta perkembangan unsur-unsur kimia dalam tubuh. Namun jika melihat dari sudut pandang psikis, maka didasarkan pada sifat, karakter, yang bernuansa maskulinitas atau feminitas.

Perempuan dalam konteks gender dapat diartikan sebagai sifat, karakter atau kepribadian yang melekat secara naluriah pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik di gambarkan sebagai salah satu jenis kelamin yang memiliki ciri-ciri spesifik seperti alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara yang mengakibatkan perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dan untuk kata “wanita” biasanya digunakan sebagai penunjukan bagi perempuan yang sudah dewasa.²

Konstruksi sosial telah menciptakan gambaran tersendiri mengenai karakter feminitas yang berbanding terbalik dengan maskulin. *Ritzer* mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang disubordinasikan dalam segala tempat, dengan kata lain perempuan merupakan makhluk kelas dua yang diposisikan sebagai kaum yang lebih lemah di banding dengan kaum laki-laki.³ Bahkan *Engineer* memperjelas peran Perempuan dengan mengatakan, perempuan adalah makhluk yang tersekatkan khusus hanya dalam konteks sumur, dapur dan kasur dan tidak memiliki tempat dalam ruang publik.⁴ Dapat diartikan bahwa Perempuan memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas, diabaikan dan diberikan tempat dipojok dengan nilai yang rendah.

Sedangkan konstruksi sosial mengenai perempuan menurut Ridjal Fauzie adalah di mana sebuah pemahaman tentang Perempuan telah kembangkan, direkayasa, dibatasi dan diperlakukan seperti yang laki-laki inginkan, dalam kehidupan bermasyarakat mulai dari

¹ Randy Syach Hadinata, Perempuan dalam Kungkungan Masyarakat Patriarki, <https://geotimes.co.id/opini/perempuan-dalam-kungkungan-masyarakat-patriarki/>

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, cet.2, ed.3, 2002, 856

³ Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, diterjemahkan oleh Mundi Rahayu, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2007, 501

⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi, dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*, (terjemahan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, 10

keluarga, masyarakat, budaya, sosial bahkan dalam kepercayaan (agama). Pembentukan pola pikir terhadap perempuan ini tidak hanya dipandang dalam aspek biologisnya tetapi dikaitkan dengan fungsi dan perannya yang kemudian menjadikan landasan berpikir dan falsafah hidup, hingga berakar dan menjelma menjadi sebuah ideologi.⁵ Perempuan tidak lagi dapat dipandang sebagai individu yang merdeka terhadap tubuhnya sendiri, segala bentuk pengekspresian diri sebagai manusia seutuhnya, direpresi oleh masyarakat yang patriarkis tersebut, sehingga mau tidak mau mereka (Perempuan) harus tunduk kepada otoritas di luar dirinya, yang memiliki relasi kuasa lebih tinggi sehingga pada akhirnya tubuh Perempuan tak lebih dari sebuah objek. Ada relasi nyata, yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Secara kultur, sebuah sistem nilai dibangun dengan pemaknaan tertentu sehingga tampak dominasi laki-laki hampir disegala bidang terutama di bidang publik. Hal ini terjadi bukan karena ketidakmampuan Perempuan dalam berkompetisi untuk menunjukkan kompetensi diri, namun memang peluang Perempuan untuk mengapresiasi diri secara terstruktur ditutup. Tidak ada kesempatan bagi Perempuan untuk dapat tampil berperan di sana.

Nunuk menempatkan ketertinggalan perempuan pada tataran ideologi dan simbol kebudayaan. Dalam budaya universal, ketertindasan perempuan, menurut Nunuk merupakan manivestasi dari pemahaman antara budaya dan alam yang kemudian dibandingkan dengan posisi laki-laki dan perempuan pada peran sosialnya. Secara umum, kebudayaan memberikan pembedaan antara masyarakat manusia dan alam. Kebudayaan berupaya mengendalikan dan menguasai alam yang selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Oleh sebab itu kebudayaan berada pada posisi superior dan alam dipihak inferior.⁶

Kebudayaan diciptakan untuk menguasai, mengelola dan mengendalikan alam untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan masyarakat. Dalam hubungannya dengan laki-laki dan perempuan, maka perempuan selalu diasosiasikan dengan alam, dan laki-laki diasosiasikan dengan kebudayaan.⁷ Hal inilah yang memicu munculnya Gerakan Perempuan yang menyebut dirinya Gerakan Feminisme yang disebabkan oleh pandangan bahwa posisi perempuan dianggap lebih rendah dibanding dengan laki-laki.

2. Perempuan sebagai Gender

Konsep Gender sebenarnya bukanlah sebuah topik baru. Kata ini kerap kali menjadi bagian pembicaraan sehari-hari, namun hingga kini, masih sering terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan. Para ahli mengatakan bahwa gender bukan hanya sekadar berbicara tentang perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan tetapi merupakan sebuah konstruksi sosial yang melibatkan berbagai aspek dari kehidupan manusia.

Adapun pengertian Gender menurut beberapa ahli, di antaranya sebagai berikut:⁸

a. Judith Butler

Menurut Judith Butler, gender adalah sebuah performativitas yang dipresentasikan oleh individu. Gender bukanlah sesuatu yang melekat pada tubuh, melainkan disampaikan

⁵ Asghar Ali Engineer, 2018, *Tafsir Perempuan antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, 2014, 6

⁶ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender Perempuan Indonesia dalam perspektif Sosial, Politik, Ekonomi Hukum dan Ham*, Magelang: IKAPI, 2014, 6.

⁷ *Ibid*

⁸ Ahmad Fikri, <https://redasamudera.id/definisi-gender-menurut-para-ahli/>

melalui tindakan dan pemaparan diri. Ia berpendapat bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang dapat dipelajari dan dikembangkan.

b. Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir menyatakan bahwa gender adalah hasil dari kondisi sosial, bukan dari faktor biologis semata. Menurutnya, perempuan bukanlah sebagai objek alami yang diberi sifat-sifat tertentu oleh alam, melainkan sebagai subjek yang membentuk jati diri serta posisinya dalam masyarakat.

c. Gayle Rubin

Gayle Rubin berpendapat bahwa gender adalah hierarki yang membedakan dan memandang rendah perempuan. Ia menjelaskan bahwa masyarakat mengatur gender melalui sistem seksualitas yang menguntungkan laki-laki dan tidak menguntungkan perempuan.

d. Raewyn Connell

Menurut Raewyn Connell, gender adalah sebuah sistem sosial yang membagi masyarakat menjadi kategori gender yang berbeda. Ia menganalisis gender dalam konteks hubungan sosial dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat.

e. Carol Gilligan

Carol Gilligan memandang gender sebagai konstruksi sosial yang melibatkan perbedaan dalam cara berpikir laki-laki dan perempuan. Menurutnya, perempuan seringkali lebih berorientasi pada aspek kepedulian dan hubungan interpersonal.

f. Michel Foucault

Michel Foucault mengatakan bahwa gender adalah sebuah produksi sejarah yang terus berubah dan selalu dalam peneguhan dan perubahan. Ia berfokus pada peran institusi dan proses sosial yang membentuk gender.

g. Anne Fausto-Sterling

Anne Fausto-Sterling berpendapat bahwa gender bukanlah hanya tentang laki-laki dan perempuan, tetapi juga melibatkan variasi yang beragam dalam anatomi dan identitas seksual. Ia menekankan pentingnya melihat gender sebagai spektrum yang luas.

h. Judith Lorber

Judith Lorber menyatakan bahwa gender adalah sebuah proses sosial yang terus menerus dipelajari dan diperkuat sejak lahir. Ia menekankan peran keluarga, pendidikan, medis, dan lembaga sosial lainnya dalam membentuk konsep gender.

i. Nancy Chodorow

Nancy Chodorow mengatakan bahwa gender dilahirkan melalui hubungan sosial pertama anak dengan ibunya. Ia berargumen bahwa perbedaan gender muncul dari perbedaan peran ibu dalam pengasuhan anak laki-laki dan perempuan.

Dari pengertian gender menurut para ahli di atas maka kita dapat melihat bahwa gender bukanlah sesuatu yang melekat pada tubuh atau apa yang terlihat secara fisik maupun biologis pada manusia, melainkan bagian dari konstruksi sosial yang dipengaruhi berbagai faktor seperti budaya dan norma serta nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat. Sehingga kategori gender tidak hanya terbatas pada dua jenis gender, laki-laki dan Perempuan, namun juga mencakup

berbagai identitas gender lainnya yang saat ini ada dalam masyarakat, seperti transgender, interseks, dan non-biner.

Para ahli tersebut di atas juga menganalisis gender dilihat dari beberapa sudut pandang terhadap faktor kekuasaan dan ketidakadilan yang ada dalam sebuah hubungan antar gender. Seperti adanya kesenjangan dalam akses sumber daya dan perlakuan sosial terhadap laki-laki dan Perempuan serta beberapa gender lainnya, para ahli sangat memahami dan menghargai adanya perbedaan dan diversitas dalam pengalaman setiap gender sebagai individu, serta memandang gender sebagai suatu spektrum yang luas, sehingga definisi tersebut memberikan sebuah validasi terhadap identitas gender yang beragam dan cenderung nonkonformis.

Namun harus kita sadari, bahwa pendapat para ahli ini memang sangat bervariasi karena adanya perbedaan budaya, latar belakang sosial, juga geografis sehingga dapat dipastikan terdapat banyak perbedaan dalam pemahaman dan penerapan konsep gender antara satu dengan yang lainnya.

Terlihat kecenderungan berfokus pada aspek-aspek sosial dan kultural, sehingga terkesan mengabaikan faktor-faktor biologis yang seharusnya juga menjadi perhatian, karena sangat memengaruhi setiap gender, seperti adanya perbedaan dalam hormon, struktur otak, dan genetika, bahkan perkembangan fisik yang sangat memengaruhi identitas seseorang dalam setiap gender. Jadi sangat wajar jika setiap ahli memiliki pendekatan atau interpretasi yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan keragaman dalam mendefinisikan gender yang ada.

Kata Gender sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu gender yang diartikan sebagai sex (jenis kelamin).⁹ Dalam Ensiklopedia Feminisme, gender merupakan hasil konstruksi secara kultural terhadap perilaku dan peran antara laki-laki dan perempuan.¹⁰ Hal inilah yang sering menjadi kesalah pahaman bagi masyarakat awam. Di Indonesia masih seringkali kita berhadapan dengan Masyarakat yang memiliki pemahaman yang keliru dan salah kaprah terhadap konsep gender dan seks. Pemahaman ini harus diperjelas dengan menekankan bahwa *seks lebih menunjuk pada jenis kelamin, sedangkan gender lebih terfokus pada peran dan fungsi yang telah terbentuk dalam masyarakat secara sosial dan budaya*. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang disebut dengan gender, dengan maksud bahwa konstruksi sosial terhadap peran tidak hanya terkait dengan jenis kelamin.¹¹ Sehingga dapat diartikan, seks bersifat kodrati sedangkan gender bersifat non-kodrati.

Dan istilah seks lebih digunakan pada aspek biologis seseorang, dan untuk istilah gender lebih dikaitkan pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya.¹²

Mansour Fakih mengatakan bahwa, suatu sifat yang ada pada diri laki-laki dan perempuan dapat dibentuk secara sosial dan budaya.¹³ Perempuan dikenal dengan sifat lemah lembut, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, jantan, kuat, dan perkasa. Dengan demikian, konsep gender melahirkan dua sifat, yakni maskulin dan feminin; dua peran, yakni domestik dan publik; dua posisi, yakni tersubordinasi dan mensubordinasi atau inferior

⁹ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan Media Utama, 1999, 177.

¹⁰ Jhon M. Echol dan Hassan Shadily, 1996, *Kamus Besar Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 265

¹¹ Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, 177

¹² Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, 2

¹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina, 1999, 35

dan superior.¹⁴ Perbedaan dan bias gender yang dikonstruksikan dalam kehidupan bermasyarakat secara sosial dan budaya saat ini, telah menciptakan perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan yang menimbulkan pada diskriminasi. Dan diskriminasi bias gender ini lebih dirasakan oleh kaum perempuan daripada kaum laki-laki.

3. Analisis Gender di Indonesia

Dalam pembangunan di Indonesia, analisis gender memiliki peran yang sangat penting. Analisis ini didasarkan pada keseimbangan dalam jumlah antara laki-laki dan perempuan yang belum disertai dengan kesimbangan pada aspek lainnya, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, politik juga ekonomi. Jika saja kesenjangan dalam berbagai aspek tersebut di atas dapat ditingkatkan, maka kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat lebih cepat terwujud, melalui pemanfaatan potensi dan peran dari laki-laki dan perempuan, yang saat ini belum dapat dioptimalkan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menyebut tingkat kesetaraan gender di Indonesia masih rendah. Hal ini tecermin dari indeks kesetaraan gender yang dirilis Badan Program Pembangunan PBB (UNDP). Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara, atau terendah ketiga se-ASEAN.¹⁵ Adapun data lain menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia per 2018 berada di angka 90,99. Kemudian, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berada pada angka 72,1. Ini menunjukkan realita di lapangan bahwa saat ini perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga keterwakilan dalam politik,” ujar Bintang dalam pemaparan virtual.¹⁶ Menurut beliau, kesetaraan gender akan dapat berdampak langsung pada target kesetaraan pembangunan.

Perempuan merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan atau *affirmative action* dalam menghadapi berbagai tantangan seperti, beban sebagai pendidik, pengasuh, sekaligus pencari nafkah, bahkan ancaman kekerasan rumah tangga. Beban ganda dan kompleksnya masalah kesetaraan gender di Indonesia sangat erat kaitannya dengan ketimpangan akses partisipasi kontrol, serta peluang dalam memperoleh manfaat antara perempuan dan laki-laki. Dan ini dipicu oleh budaya patriarki dan konstruksi sosial masyarakat di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS), juga telah membuat Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai salah satu bagian dari indikator Pembangunan dengan cara mengukur ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Adanya IKG ini sebagai statistik resmi dan dipublikasikan, merupakan tindak lanjut dari kajian yang telah dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2022. Semua ini dilakukan demi mendorong percepatan terwujudnya program-program pembangunan.

Indeks Ketidaksetaraan Gender di Indonesia selama periode tahun 2018-2022 telah memperlihatkan perkembangan yang baik dan cukup signifikan. Tentu saja perubahan ini karena dipengaruhi oleh peningkatan capaian dalam aspek kesehatan reproduksi dan pemberdayaan, di mana telah terjadi penurunan pada indikator persentase kematian ibu saat melahirkan dan anak saat dilahirkan, yang tidak difasilitasi Kesehatannya, serta peningkatan usia pernikahan dan juga Pendidikan. Data dan informasi ketimpangan gender yang dibuat oleh BPS ini, dapat

¹⁴ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997, 9

¹⁵ Tesa Oktiana Surbakti, <https://mediaindonesia.com/author/109/tesa-oktiana-surbakti,08-10-2020>

¹⁶ *Ibid*

dipastikan akan sangat membantu pemerintah dalam menyusun strategi kebijakan, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketimpangan gender secara berkelanjutan.

Dengan dimasukkannya poin kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan secara global bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa memerhatikan kesetaraan gender. Pengakuan bahwa pemberdayaan Perempuan disegala aspek Pembangunan sangat dibutuhkan. Kesetaraan gender tidak lagi dipandang hanya sekedar pemenuhan hak dasar bagi setiap manusia, namun lebih dari itu, kesetaraan gender merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.

Kesetaraan gender menciptakan suatu kondisi, di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan partisipasi yang sama dalam hal ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini harus mampu menjamin bahwa tidak ada potensi sumber daya yang dimiliki sia-sia karena tidak dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dengan kata lain, kesetaraan gender mendorong suatu negara untuk mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada ke titik optimalnya, tanpa ada satupun potensi yang ada dilemahkan apalagi diabaikan baik sengaja maupun tidak sengaja.

Di negara-negara berkembang, kesenjangan gender masih cukup besar terjadi pada pendidikan tinggi dan terdapat variasi yang besar antar negara (Shang, 2022). Menurut UN Women (2002), kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender) adalah persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.¹⁷ Mengatasi ketimpangan gender merupakan tujuan dari setiap negara saat ini. Indonesia sendiri telah menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan menetapkan kesetaraan gender sebagai tujuan kelima dalam pilar. Dan salah satu indikator yang digunakan untuk pengukuran ketimpangan gender di dunia adalah *Gender Inequality Index* (GII) yang disusun oleh UNDP yang terdiri dari dimensi ekonomi, pemberdayaan sosial, dan kesehatan reproduktif (Mafruhah & Susilowati, 2023).

Berikut data dalam bentuk tabel, GII ASEAN menurut Komponen Pembentuknya, 2021, yang menggambarkan ketimpangan gender di beberapa negara di wilayah ASEAN dan menggambarkan posisi Indonesia.

Tabel 1. Ketimpangan Gender di Wilayah ASEAN

Negara	Komponen Pembentuk										GII
	Dimensi Kesehatan Reproduksi		Dimensi Pemberdayaan				Dimensi Pasar Tenaga Kerja				
	Angka Kemulan Ibu	Tingkat Kelahiran Remaja	Perencanaan Pendidikan Minimal Menengah		Keterlibatan dalam parlemen		TPAK		L	P	
			L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
Singapura	8	2,623	85,932	80,464	70,192	29,806	76,828	39,406	0,040		
Malaysia	29	9,271	78,433	75,009	85,145	14,855	77,551	51,188	0,228		
Brunei	31	9,978	73,200	70,440	90,909	9,091	72,329	54,069	0,259		
Vietnam	43	34,600	69,845	61,289	65,729	30,361	79,437	69,637	0,296		
Thailand	37	32,744	55,669	47,627	84,062	13,938	73,027	58,992	0,332		
Taiwan	142	50,877	41,770	33,737	41,538	38,462	72,240	60,987	0,378		
Filipina	121	48,202	69,090	73,352	71,951	20,049	68,302	43,836	0,419		
Indonesia	177	33,929	58,213	51,005	78,957	21,043	81,668	53,704	0,444		
Kamboja	160	45,453	31,700	18,320	80,214	19,786	85,918	73,960	0,465		
Laos	185	73,175	47,740	37,640	78,048	21,951	78,093	74,785	0,478		
Myanmar	250	33,043	47,803	38,308	85,023	14,971	69,963	40,987	0,498		

Sumber: UNDP (2022)

¹⁷ Adi Nugroho, dkk, Ketimpangan Gender 2022, volume1, 2023, Badan Pusat Statistik

Dalam tabel terlihat GII Indonesia ada di posisi ke-8 dari negara-negara ASEAN. Pada dimensi kesehatan, reproduksi remaja dan indikator tingkat kelahiran remaja, terlihat nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Vietnam, namun pada angka kematian ibu di Indonesia hampir empat kali lipat lebih besar dibandingkan dengan negara Vietnam dan Filipina yang berada di posisi ketujuh karena memiliki indikator angka kematian ibu juga lebih rendah dari Indonesia. Hal ini menunjukkan masih banyaknya permasalahan yang terjadi, hingga kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi.

Untuk kawasan ASEAN, yang menjadi negara dengan capaian ketimpangan gender paling baik adalah Singapura. Dari berbagai dimensi, Singapura lebih unggul dari negara lainnya, kecuali pada dimensi pemberdayaan, tepatnya terlihat pada indikator kontribusi parlemen perempuan yang ternyata masih di bawah angka 30 persen. Hal ini sangat wajar terjadi, mengingat Singapura merupakan negara terbaik bagi Perempuan di Asia berdasarkan *Woman, Peace and Security* (WPS) 2021/2022. Singapura dan Selandia Baru merupakan negara teraman bagi wanita di Asia Pasifik.

Sedangkan untuk negara Malaysia dan Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki tingkat ketimpangan gender terbaik setelah Singapura. Jika dogma dan budaya berasal dari religi, kedua negara ini memiliki kemiripan dengan Indonesia. Selain karena secara geografis kedua negara ini berdekatan, budaya melayu dan agama yang dianut sebagian besar masyarakatnya pun sama dengan Indonesia, namun memiliki indeks kesetaraan gender yang cukup jauh dengan Indonesia.

GII Malaysia pada 2021 berada di angka 0,228 sedangkan Brunei Darussalam di angka 0,259. Rendahnya GII yang kedua negara ini, terbantukan oleh dimensi-dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan di tingkat pendidikan minimal menengah, serta pasar tenaga kerja. Sayangnya pada indikator kontribusi perempuan di dalam parlemen masih rendah yakni masih di kisaran 15 persen.

Negara Vietnam disusul Thailand memiliki tingkat GII yang relatif rendah. Kedua negara ini, memiliki indikator yang relatif lebih baik pada kesehatan reproduksi pada angka kematian ibu dan tingkat kelahiran remaja yang lebih rendah di kawasan ASEAN.

Ketimpangan gender menjadi sebuah fenomena saat ini, dan sangat kompleks karena melibatkan interaksi dari berbagai factor, mulai dari tingkat individu, masyarakat, hingga suatu wilayah. Indeks kesetaraan gender biasanya cerminan dari tradisi/adat, agama, struktur perekonomian, struktur kependudukan, dan sistem pendidikan yang ada, sehingga nilai capaian kesetaraan gender sangat bervariasi di berbagai wilayah.

Adapun tujuan dari kesetaraan gender dalam pembangunan di suatu negara tidak hanya terfokus pada menurunnya pencapaian indeks kesetaraan gender secara nasional, tetapi juga mengurangi ketidaksetaraan (disparitas) gender di berbagai wilayah. Di tahun 2022, provinsi dengan IKG (Indeks Ketimpangan Gender) yang paling rendah diduduki oleh DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau.¹⁸ Keenam provinsi tersebut memiliki IKG kurang dari 0,4. DI Yogyakarta memiliki nilai IKG yang cukup rendah dan satu-satunya provinsi yang memiliki capaian IKG di bawah 0,3.¹⁹ Dan untuk capaian

¹⁸ Adi Nugroho, dkk, *Ketimpangan Gender 2022*, volume1, 2023, Badan Pusat Statistik

¹⁹ *Ibid*

IKG tertinggi diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan capaian IKG 0,648 dan inilah satu-satunya provinsi di tahun 2022 yang memiliki angka di atas 0,6.²⁰ Namun beberapa provinsi lain juga memiliki IKG relatif tinggi dan memiliki angka di atas 0,5 tersebar di 11 provinsi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa capaian pembangunan gender di Indonesia masih belum optimal sesuai harapan, dan ini merupakan dampak dari ketimpangan gender di bidang kesehatan, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Namun secara keseluruhan, saat ini telah terjadi peningkatan meskipun perlahan dari tahun-tahun sebelumnya.

B. Feminisme

1. Feminisme di Indonesia

Pada tanggal 21 Oktober 2015 PBB telah menerbitkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* berupa agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan.²¹ SDGs merupakan sebuah program pembangunan yang bersifat berkelanjutan secara global para pemimpin dunia, untuk mengakhiri permasalahan dunia, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan lingkungan, dan Indonesia berpartisipasi didalamnya. SDGs merupakan cetak biru bersama yang diadopsi oleh semua negara anggota PBB dengan tujuan untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet Bumi, yang memiliki prinsip universal, integrasi dan inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau no life behind.²² Dan SDGs di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Salah satu dari 17 tujuan yang telah ditetapkan PBB adalah Kesetaraan Gender (*Gender Equality*). Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi Perempuan untuk lebih berdaya dalam mendapatkan dan merebut kembali hak-haknya sebagai manusia seutuhnya. Isu kesetaraan gender merupakan salah satu topik paling hangat di perbincangkan masyarakat khususnya para penggiat feminis. Namun hingga kini masih saja terjadi kesalahpahaman makna dalam gerakan feminisme ini. Kesalahpahaman ini dapat ditemukan diseluruh lapisan Masyarakat bahkan akademisi.

Berikut beberapa kesalahpahaman yang masih sering menjadi perdebatan di masyarakat, di antaranya:²³

a. Hanya Wanita yang Bisa Menjadi Seorang Feminis

Banyak kesalahpahaman yang menghubungkan istilah feminisme dengan feminitas yang dianggap lebih mendukung kaum perempuan. Padahal feminis bukan hanya untuk kaum feminin tetapi juga untuk maskulin. Bahkan tujuan awal feminis adalah untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan menegakkan hak-hak dasar manusia. Feminitas dibentuk oleh konstruksi sosial di mana dimaksudkan untuk menunjuk Perempuan ideal, sedangkan maskulinitas merujuk pada laki-laki. Arief Budiman dalam buku *Pembagian Kerja Secara Seksual (1985:2)*, menyatakan bahwa di negara

²⁰ Ibid

²¹ <http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2016/05/20/undp-dan-harian-kompas-bermitra-untuk-sdg-diskusi-panel-pertama-diselenggarakan-in-jakarta/>

²² <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/02/080000486/mengenal-17-tujuan-sdgs-pembangunan-berkelanjutan-beserta-penjelasan>

²³ <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5406950/5-kesalahpahaman-tentang-feminisme-yang-paling-banyak-terjadi?page=3,27Okt2023>

barat pada periode tahun 1980-an telah berkembang sebuah pandangan yang sangat kuat mengenai perempuan di dalam rumah sedangkan urusan luar rumah hanyalah area laki-laki, dan hal ini hanya menguntungkan pihak laki-laki saja. Pembagian kerja yang menempatkan perempuan pada ranah rumah tangga hanya untuk memasak dan mengurus anak membuat perempuan tidak berkembang secara manusiawi. Perempuan dikerdilkan dengan ruang lingkup yang terbatas, tidak dapat mengembangkan diri secara optimal. Dengan dalih Perempuan itu lemah, sensitif, dan harus dilindungi, maka sudah selajaknya aman dengan berdiam diri di dalam rumah.

Sebenarnya kata Feminine atau feminitas berasal dari bahasa Prancis, yang menunjuk pada sifat keperempuanan. Seperti: kelembutan, kesabaran, kebaikan, merawat, empati dll. Sedangkan maskulin berasal dari kata muscle atau otot yaitu sifat-sifat yang hanya mendasarkan pada kekuatan otot (fisik). Karakter maskulin ini dicirikan dengan kecenderungan kompetitif, aktualisasi diri, dan unjuk kekuatan. Sifat feminin dan maskulin ini dimiliki semua orang, laki laki maupun perempuan. Ada banyak Perempuan yang memiliki sifat maskulin secara dominan, sedangkan beberapa laki-laki juga nampak lebih feminine dalam bersikap. Jadi sifat feminine dan maskulin tidak menunjukkan tentang jenis kelamin. Namun Masyarakat hingga kini masih saja salah menilai bahwa sifat feminine hanya di miliki oleh Perempuan dan sifat maskulin hanya dimiliki oleh laki-laki.

b. Feminisme Berarti Membenci Laki-Laki

Secara konsep, feminisme adalah gerakan menuntut persamaan atau keadilan dalam berbagai aspeknya: mulai dari politik, ekonomi dan sosial dalam perspektif gender. Sehingga sangat sulit memandang jika feminisme menyatakan dirinya sebagai aliran yang menganut pemahaman sebagai pembenci laki-laki (misandri). Secara harfiah, misandri memiliki arti yang hampir mirip dengan misogynist, yakni prasangka buruk terhadap laki-laki (sedangkan misogynist berarti prasangka terhadap perempuan).

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali berhadapan dengan orang-orang yang menyamakan antara feminisme dan misandri. Bahwa seorang feminis berarti menjadi pembenci laki-laki. Meskipun, tidak bisa dihindari bahwa ada beberapa feminis yang ternyata melakukan misandri ini. Namun ini murni adalah kesalahan yang umum terjadi. Karena esensi dari perjuangan dari gerakan feminisme adalah *“Anda tidak dapat dikatakan seorang feminis sampai Anda percaya bahwa setiap gender di muka bumi ini, termasuk laki-laki, memiliki persamaan hak sebagai manusia”*.

Seorang feminis memang memiliki harapan untuk dapat mendobrak tembok-tembok budaya patriarki agar perempuan benar-benar bisa mencapai kesetaraan seperti yang diimpikan selama ini. Namun tidak dengan mencoba menggulingkan sistem lama dengan memperkenalkan tatanan baru seperti matriarki. Tujuan feminis bukan menuntut keistimewaan gender dengan mengorbankan hak-hak gender lainnya. Di sini perbedaan mendasar antara feminis dan misandry. Meskipun Misandri ini akan selalu ada, sebagai salah satu bias anti laki-laki, yang telah lahir dan berkembang di sebagian orang, sebagai bentuk dari reaksi atas kekejaman dan diskriminasi yang menyakitkan yang telah dihadapi perempuan selama ini. Namun, hal ini hanya diwakili oleh oknum.

Jadi pada dasarnya feminisme hanya menyerukan kesetaraan gender. Sayangnya, sebagian besar kaum laki-laki yang menentang gerakan feminisme justru beranggapan bahwa hal itu ditujukan untuk menyerang mereka atau sebagai sikap pemberontakan terhadap kaum laki-laki. Padahal sikap benci terhadap laki-laki bukan berasal dari konsep gerakan feminisme, melainkan sebuah reaksi akibat penentangan sebagian laki-laki ini, terhadap perjuangan feminis. Dapat dibilang feminisme dengan tegas menentang *toxic masculinity*.

c. Feminisme Menuntut Perempuan Lebih Baik dari Laki-Laki

Para feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mencapai kesetaraan Perempuan, sering dinilai sebagai aktivis yang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri. Padahal, gerakan ini hanya fokus memperjuangkan hak-hak yang selama ini tidak dimiliki atau menentang pembatasan pada kaum perempuan. Feminis sejati bergerak dengan didasari konsep hak asasi manusia, di mana semua identitas gender berhak untuk mendapat perlakuan setara. Smith dan John, 2020, mengatakan bahwa ada beberapa kesalahpahaman yang sering terjadi pada laki-laki terhadap gerakan feminis yaitu menganggap bahwa feminisme hanya memprioritaskan diri untuk perempuan dan tidak memperhatikan isu-isu yang dihadapi oleh laki-laki.

Selain itu ada juga yang menganggap bahwa feminisme hanya berfokus pada isu-isu seksual dan reproduksi, seperti aborsi dan kontrasepsi, dan tanpa memperhatikan isu-isu yang dihadapi oleh laki-laki. Terkesan feminisme hanya berfokus pada mengejar ketertinggalan Perempuan terhadap laki-laki di beberapa aspek kehidupan. Feminisme juga dianggap hanya berfokus pada isu-isu yang terkait dengan pekerjaan dan karier tanpa peduli dengan apa yang dihadapi oleh laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi yang menganggap bahwa feminisme hanya berfokus pada isu-isu yang terkait dengan kondisi perempuan yang berada di negara-negara maju, dan tidak memperhatikan isu-isu yang dihadapi oleh perempuan di negara-negara berkembang.

Dari semua pemikiran ini, perjuangan feminisme dipandang ingin menunjukkan kelebihan dan kemampuan mereka di atas laki-laki di berbagai bidang, menganggap laki-laki sebagai pesaing, penghambat, tanpa memperdulikan dampak dari perjuangan mereka terhadap kehidupan laki-laki itu sendiri. Pandangan-pandangan seperti inilah yang terkadang mempersulit Perempuan untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan laki-laki, karena telah muncul sentimen pribadi di antara keduanya.

d. Feminisme Melawan Kodrat Alami Manusia

Banyak yang menyalahartikan kodrat perempuan hanya berada di wilayah domestik, sumur, dapur dan kasur, hanya karena kemampuan Perempuan hamil, melahirkan dan menyusui. Kodrat Perempuan ini menjadi norma yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Sehingga Perempuan Indonesia diwajibkan untuk tidak melawan kodrat yang telah diciptakan selama ini. Semua Perempuan wajib menjadi Ibu, dan sehebat apapun seorang Perempuan di luar sana, dia tetap adalah ibu rumah tangga.

Dan para aktivis feminis memperjuangkan pembebasan hak-hak perempuan yang sering terabaikan dan mendapatkan perlakuan diskriminasi akibat norma “kodrat Perempuan”. Seperti contoh hamil dan melahirkan yang sering dianggap sebagai kewajiban perempuan, padahal melahirkan adalah sebuah pilihan. Setiap perempuan

berhak untuk menentukan setiap pilihan atas tubuhnya. Perempuan berhak untuk hamil ataupun tidak sebagai penguasa atas tubuhnya sendiri. Hal ini juga menjadi salah satu pembicaraan hangat ketika salah seorang *influencer* Indonesia secara tegas menyatakan di media sosial tidak mau hamil dan melahirkan anak dengan alasan-alasan logis yang dimiliki. Selain mendapat pertentangan dari para laki-laki, pemikiran seperti ini juga menjadi sesuatu yang ditentang oleh kaum perempuan itu sendiri. Tindakan ini dianggap melawan kodrat Perempuan, yang harus hamil, melahirkan dan menjadi seorang Ibu.

Sebenarnya pola pikir ini menunjukkan bahwa sedari awal kaum laki-laki telah menyadari bahwa rahim Perempuan adalah sumber kehidupan dan lahirnya sebuah peradaban. Di mana rahim sebagai suatu entitas yang tak terpisahkan dari tubuh Perempuan. Sehingga wajar jika Perempuan sebagai mesin produksi anak. Seorang Perempuan dipaksa menerima label diri bukan Perempuan sempurna jika tidak mampu hamil dan melahirkan anak. Perempuan yang subur dan memiliki banyak anak dipuji dan Perempuan mandul dihinakan, dan dianggap Perempuan yang tidak berguna. Bahkan dengan cara pandang seperti ini, secara sah dan legal di mata masyarakat Indonesia, untuk dapat digunakan oleh seorang suami menceraikan atau mengeluarkan opsi poligami bagi Perempuan yang tidak bisa menghasilkan keturunan. Yang lebih menyedihkan lagi, banyak Perempuan merasa bersalah atas ketidakmampuannya memberikan keturunan.

Institusi Perkawinan dibentuk dan dijadikan sebuah kewajiban bagi Perempuan dengan batasan umur tertentu harus menikah. Sehingga ada istilah perawan tua, dan menjadi ketakutan tersendiri bagi Perempuan yang telat atau belum menikah pada usia tertentu. Keperawanan Wanita dituntut pada malam pertama sebagai lambang kesucian, dan perzinahan bagi Perempuan dilarang dan dianggap hina. Jika saat ini semua pandangan itu bergeser dan tidak lagi dijadikan landasan berpikir para feminis inilah, Perempuan dicap telah melanggar kodratnya sebagai Perempuan.

e. Feminisme Merupakan Konsep Barat

Beberapa orang menentang feminisme karena dinilai sebagai sebuah konsep kebarat-baratan yang tidak cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki adat istiadat ketimuran. Globalisasi bukanlah penyebab adanya gerakan feminisme, bahkan paham feminisme sudah ada sejak dulu di wilayah non-Barat, Afrika, Asia, dan sebagainya untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia.

Salah satu contoh kejadian saat perdebatan soal Rancangan Undang-Undang Penghapusan (RUU PKS) yang disebut sebagai produk barat. Alasan semangat feminisme barat sebenarnya sudah mengemuka sejak RUU ini dibahas di DPR pada tahun 2016. Kelompok yang sangat menentang ini adalah Aliansi Cinta Keluarga (Aila).²⁴ Sementara para aktivis dan anggota DPR sangat menyadari bahwa alasan utama disusunnya RUU ini adalah untuk menyelamatkan banyak korban kekerasan seksual, dan sama sekali tak ada hubungannya dengan produk barat. RUU PKS dipandang perlu karena fenomena tindak kekerasan seksual semakin meningkat dan terjadi di mana-mana, di jalan, di

²⁴ Luviana, <https://www.konde.co/2021/07/ruu-pks-dianggap-produk-feminis-barat-pada-dibuat-untuk-perjuangkan-korban/>, 2021

rumah, dan belum ada perangkat hukum untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi korban yang kebanyakan berjenis kelamin Perempuan dan anak-anak.

Dengan tidak adanya kepastian hukum, maka akan sangat merugikan pihak korban, karena tidak memiliki dasar hukum yang sah (kekosongan norma hukum) untuk menyelesaikan permasalahannya dan mengorbankan banyak pihak, terutama jika hal ini juga terjadi pada kelompok marjinal seperti disabilitas, dll. Jadi keberadaan RUU PKS diharapkan dapat melindungi para korban, kemanapun dia pergi dan berada dengan mendapatkan rasa aman serta mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari negara.

2. Lahirnya Konsep Feminisme di Indonesia

Perjuangan perempuan di Indonesia dari dulu hingga kini, tidak lepas dari isu-isu gerakan perjuangan perempuan di belahan dunia lain. Dan gerakan perempuan ini kini lebih dikenal sebagai feminisme. Seiring dengan kemajuan zaman, terlebih pada teknologi berupa media sosial, gerakan feminisme ini semakin dikenal dan mulai memengaruhi *mindset* masyarakat. Feminisme sebagai filsafat dan gerakan dalam masyarakat menumbuhkan sebuah kesadaran baru, ketika dalam sejarah manusia di dunia menunjukkan fakta di mana kaum perempuan (feminim) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki (maskulin) khususnya dalam masyarakat yang patriarki.

Istilah Feminisme pertama kali diperkenalkan oleh Charles Fourier, filsuf Prancis, tahun 1837.²⁵ Istilah ini kemudian berkembang di Prancis dan Belanda tahun 1872, di Inggris Raya tahun 1890-an dan di Amerika Serikat tahun 1910. Feminisme sebagai suatu istilah yang dipahami sebagai keilmuan, dan baru dikenal sejak awal 1970-an di Indonesia, setelah tulisan-tulisan ilmiah tentang feminisme bermunculan dalam bentuk buku, jurnal-jurnal dan surat kabar (Warsito: 2012). Hingga saat ini, tulisan-tulisan ilmiah itu memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat, terlebih lagi bagi kalangan akademisi. Feminisme sendiri sebagai teori telah memberikan dasar-dasar ontologis dan epistemologis dalam kemajuan pergerakan perempuan Indonesia. Feminisme sebagai gerakan sosial, memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan demokrasi dari dulu hingga kini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbeda dengan isme produk oksiden (Barat) lainnya, diskursus feminisme tidak menggunakan *grand-theory* yang monolitik (Bashin dan Khan, 1988), sehingga tidak ada suatu standar tunggal yang rigid dengan aplikasinya.²⁶ Dengan demikian feminisme dapat diterjemahkan secara beragam sesuai ruang dan waktu serta secara sosio-kultural yang *indigenous*, dengan catatan bahwa suatu aksi atau gerakan yang dilakukan didasari pada kesadaran tentang telah terjadinya penindasan baik fisik maupun mental terhadap perempuan dalam masyarakat. Dan lahirnya kesadaran ini telah memicu lahirnya suatu aksi dari perempuan atau laki-laki untuk dengan sengaja mengubah keadaan tersebut (Dzuhayatin, 2000: 234).

Sebuah prestasi besar dari teori femininis adalah keberanian dalam melakukan tindakan bukan hanya berbicara pada tataran pemahaman. Feminis lahir dengan membentuk kesadaran perempuan yang didasari pengalaman perempuan yang spesifik mengenai kebenaran, pengetahuan dan kekuasaan. Dan dapat diduga selanjutnya feminisme berkembang dan mendapat reaksi dari

²⁵ <https://www.dw.com/en/charles-fourier-the-man-who-coined-the-term-feminism/a-61379159,04-07-2022>

²⁶ Tong, Rosmerie, *Teori Feminis, Feminismus*, Boulder Colorado, 2009

kapitalisme, sosialisme, modernisme, industrialisme dan bahkan post-modernisme. Feminisme tidak lebih hanya diterima sebagai entitas yang secara substansial tercela dan tidak perlu diberi ruang (Dzuhayatin, 2000: 235). Diakui atau tidak, kesadaran akan ketertindasan, telah lahir dan tumbuh subur di seluruh bagian dunia, menjadikan feminisme sebagai sebuah fenomena keberanian perempuan untuk memberontak pada kemapanan budaya patriarki yang sangat diskriminatif dan mendiskreditkan martabat kemanusiaan perempuan. Sehingga lahirlah sebuah paradigma baru, di mana kesadaran tersebut berhasil menciptakan sebuah identitas gender yang lebih humanis antara laki-laki dan perempuan di antara sudut-sudut ruang relasi kuasa antara superior dan inferior.

Setelah diabaikan, diremehkan, didiskriminasi oleh disiplin ilmu patriarki selama berabad-abad, kini topik mengenai perempuan akhirnya masuk menjadi salah satu objek menarik sebagai bahan penyelidikan. Selama ini Teori feminisme terfokus pada peran dan posisi perempuan dalam semua aspek kehidupan sebagai salah satu solusi dari persoalan-persoalan penelitian, di mana Teori ini digunakan sebagai alat analisis terhadap ketimpangan yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan. Teori-teori tradisional sering dimodifikasi oleh kaum feminis untuk menerangkan penindasan perempuan. Dengan memusatkan pada pencantuman persamaan perempuan ke dalam kerangka teoritik masa lalu, kesamaan-kesamaan perempuan dan laki-laki ditekankan (Gross, 1986: 194).

Kata *feminist* dalam *Merriam Webster's Dictionary and Thesaurus*, merupakan kata sifat (*adjective*) dari feminis yang berarti:

- Teori tentang kesetaraan politik, ekonomi dan sosial berdasarkan jenis kelamin,
- Aktivitas yang diorganisasi atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan.

Kata *feminist* sebagai kata benda (*noun*) berarti pula supporter atau pendukung feminis, atau kata sifat (*adjective*) yang berarti berhubungan dengan atau mendukung persamaan hak bagi perempuan.²⁷ Sedangkan dalam *Oxford English Dictionary (OED)* *feminism* berarti advokasi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan jenis kelamin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hanya ditemukan istilah feminisme yang berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kamu perempuan dan laki-laki.

a. Lahirnya Feminisme di Indonesia

Feminisme di Indonesia dirasakan mulai muncul ke permukaan, ketika buku kompilasi dari surat-surat R.A. Kartini dengan teman-temannya di Belanda (Ny. Abendanon, Stella, Ny. Ovink-Soer, dll) terbit, dengan judul *Door Duisternis Tot Licht* (1911).²⁸ Buku ini disusun oleh Nyonya JH Abendanon, yang merupakan salah seorang sahabat pena Kartini yang saat itu menjabat sebagai menteri (direktur) kebudayaan, agama, dan kerajaan Hindia Belanda. Buku dicetak sebanyak lima kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat R.A. Kartini dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Agnes L. Symmers.²⁹ Dan dengan buku ini sangat berpengaruh dan menginspirasi bagi

²⁷ Feminis. *Kamus Merriam Webster.com*, Merriam Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/feminist>. Diakses 10 April 2024.

²⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/21/153100365/6-hal-tentang-habis-gelap-terbitlah-terang-kumpulan-surat-kartini-yang?page=all>

²⁹ *Ibid*

kaum perempuan di Indonesia untuk memperjuangkan harkat, derajat dan martabatnya untuk bisa sejajar dengan laki-laki.

Sejarah feminisme di Indonesia telah mencatat, semua tulisan dari RA. Kartini menjadi sebuah pondasi dasar bagi perjuangan kaum perempuan Indonesia. Dalam suratnya ini, Kartini selalu menceritakan tentang perasaannya, kesedihannya, sebagai anak perempuan dari keluarga priyayi Jawa (Bupati). Ia merasa dinomorduakan dan direndahkan, dibedakan dalam segala aspek kehidupannya dengan saudara laki-lakinya. Karena ayahnya seorang pelaku poligami, sehingga iapun harus menerima kenyataan ketika menjadi istri dari suami yang juga berpoligami.

Atas pengalaman hidupnya ini, Kartini berkesimpulan bahwa wanita harus mampu bergerak dan bangkit melawan semua ketidakberdayaan ini. Untuk itu, “Kartini bercita-cita bisa memberi bekal pendidikan kepada anak-anak perempuan, terutama mengenai budi pekerti, agar mereka menjadi ibu yang berbudi luhur, yang dapat berdiri sendiri mencari nafkah sehingga mereka tidak perlu kawin jikalau mereka tidak menginginkannya.”³⁰ Hingga dapat disimpulkan bahwa saat itu, pemikiran feminis Kartini telah terlihat nyata, meskipun pada akhirnya ia harus memilih untuk mengalah dengan meninggalkan semua pemikirannya ini.

Kartini harus mampu realistis terhadap segala situasi dan norma-norma yang berlaku di zaman itu, sehingga mau tidak mau harus lebih memilih tunduk pada takdir tradisi sebagai wanita Jawa. Iapun memutuskan untuk menjalani pernikahan, punya anak, dan tidak bekerja, jauh dari semua impiannya. Bahkan ia menjalani pernikahan poligami yang sebelumnya sangat ditentangnya karena merasa hal ini sangat “diskriminatif” terhadap kaum perempuan.

Berkat tulisan-tulisan Kartini, kini kita semua warga negara Indonesia akhirnya sangat familiar dengan kata “emansipasi wanita”. Feminisme di Indonesia terus bertumbuh dan berkembang sebagai bentuk perjuangan perempuan dalam menghadapi semua permasalahan di setiap jamannya.

Di masa penjajahan, kedudukan perempuan di dalam sebuah keluarga dan masyarakat sangatlah subordinat. Praktik poligami di zaman itu, pendidikan yang hanya boleh diikuti oleh laki-laki serta tekanan pemerintah kolonial telah menjadi latar belakang dari perjuangan kaum feminis. Perlu diingat, bahwa gerakan perjuangan ini juga dilakukan oleh Dewi Sartika.

Jika Kartini lebih mengutamakan pada pendidikan, dan hanya mampu sebatas membaca dan mempersiapkan para perempuan untuk menjadi calon ibu yang terampil, Dewi Sartika pada tahun 1904 telah mampu mendirikan sekolah bernama “Sekolah Keutamaan Istri”, di Kota Bandung. Sekolah ini merupakan sekolah pertama bagi perempuan di Indonesia. Dan saat ini lebih dikenal menjadi SD dan SMP Dewi Sartika.

Hal ini sangat jauh berbeda dengan perjuangan Cut Nyak Dien yang bertumbuh tidak di lingkungan yang sepatriarki daerah Jawa. Dia memperlihatkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perjuangan fisik, tanpa adanya batasan gender. Cut Nyak Dien yang lahir pada tahun 1848, di Aceh Besar merupakan putri keturunan bangsawan. Dia

³⁰ Sulastin Sutrisno, *Surat-Surat Kartini, Renungan tentang dan Untuk bangsanya*, Djambatan, 1985: xvii

menikah ketika berusia 12 tahun dengan Teuku Cek Ibrahim. Suaminya meninggal di medan peperangan melawan Belanda, mendorong dirinya mulai ikut berperang di tahun 1880 bersama para gerilyawan Aceh. Saat mulai berperang, Cut Nyak Dien menikah kembali dengan Teuku Umar, dan berperang bersama-sama melawan Belanda.

Masih banyak lagi gerakan-gerakan perempuan di Indonesia yang ikut mewarnai perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Masing-masing pahlawan wanita ini memiliki medan perangnya sendiri. Namun keteladanan mereka dalam upaya meningkatkan derajat perempuan haruslah diapresiasi. Untuk itulah negara memberikan gelar kehormatan sebagai Pahlawan Nasional.

Pasca kemerdekaan, kongres pertama diadakan pada tanggal 22-25 Desember 1945 di Klaten. Perwari merupakan organisasi perempuan yang dibentuk dalam sebuah kongres perempuan ini dan mengangkat Ny. S. Mangunsarkoro sebagai Ketua dan Ny. M. D. Hadiprabowo sebagai Wakil Ketua Perwari.³¹ Kongres Perwari pertama di Klaten dihadiri oleh Presiden Sukarno dan beberapa pejabat tinggi negara lainnya. Perwari merupakan penyatuan organisasi Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) dan Wanita Negara Indonesia (Wani).³² Perwari dibentuk dengan misi bahwa Indonesia telah memiliki organisasi perempuan yang bukan merupakan warisan atau lanjutan dari *Fujinkai* buatan Jepang. Organisasi ini juga dijuluki sebagai organisasi “Kaum Ibu Angkatan 1945” (Yuliantri dkk. 2020: 181).

Narasi emansipasi dibentuk, dibangun dan diperjuangkan di berbagai bidang, termasuk penolakan poligami, pembenahan pendidikan, karakter perempuan, ketrampilan, dan sebagainya. Dan untuk pertama kalinya, ditetapkan aturan yang memberi perlindungan bagi perempuan di Indonesia dilahirkan, yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Di mana salah satu pasal menyebutkan bahwa perkawinan, perceraian dan rujuk harus dicatatkan (Warsito: 2012).

Pergerakan feminisme dilakukan oleh perempuan melalui organisasi perempuan, di antaranya adalah Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), yang merupakan penyatuan dari berbagai organisasi yaitu Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) dan Wanita Negara Indonesia (Wani), Badan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).

Perwari merupakan organisasi sosial-filantropi di mana kehadirannya memiliki sumbangsih yang besar dalam mendukung perjuangan dan mempertahankan keerdekaan bangsa Indonesia. Perwani mendirikan dapur-dapur umum, mengumpulkan pakaian layak pakai bagi tentara-tentara Indonesia yang berjuang, bahkan membantu pengungsian. Diantaranya dengan membangun beberapa tempat perlindungan anak yang menjadi korban peperangan.

Organisasi ini memfasilitasi berbagai pembangunan fasilitas pendidikan tingkat dasar, seperti sekolah taman kanak-kanak di tahun 1962. Selain itu, organisasi feminisme ini juga sangat aktif menentang poligami dan merupakan isu klasik hingga kini dalam sejarah perjuangan perempuan bangsa Indonesia, menolak kekerasan dalam

³¹ [https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Persatuan_Wanita_Republik_Indonesia_\(PERWARI\)](https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Persatuan_Wanita_Republik_Indonesia_(PERWARI))

³² *Ibid*

bentuk pemerkosaan, dan kebutuhan perempuan pada masa itu. Rasuna Said salah satu tokoh Perwari di tahun 1950an, terus meyuarkan secara vokal kesetaraan hak perempuan. Hingga menerbitkan majalah “Siaran Perwari” sebagai sarana publikasi aktivitas pada masyarakat. Dan semua perjuangan itu membuahkan hasil. Berbagai akses kini dibuka seiring dengan masuknya arus demokrasi di Indonesia. Perempuan kini telah mendapatkan berbagai akses terutama dalam bidang pendidikan, politik, pekerjaan profesional, dan beberapa aspek kehidupan lainnya dalam masyarakat.

Kemudian, ketika memasuki masa Orde Baru, semua gerakan, termasuk gerakan perempuan ditekan oleh pemerintah. Citra perempuan dalam wacana di masa kekuasaan Presiden Soeharto digambarkan sebagai perempuan yang pasrah dan patuh atas subordinasi yang dialaminya. Organisasi perempuan yang bisa dan boleh berkembang pada periode pemerintahan ini hanyalah organisasi yang difasilitasi oleh pemerintah seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), yang sengaja diciptakan untuk mendukung semua kebijakan pemerintah.

Namun pergerakan perempuan dunia, termasuk PBB, memengaruhi kebijakan-kebijakan di tanah air yang tidak dapat dihindarkan. Atas rekomendasi PBB pada tahun 1978-1983, Lasjah Soetanto ditunjuk menjadi menteri urusan peranan wanita pertama di Indonesia. Dan saat itu pula, pada tahun 1978, lahir sebuah kesepakatan internasional untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan yang dikenal dengan *Convention on the Elimination of Discrimination of All Forms against Women* (CEDAW).

Konvensi ini berisikan tentang prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, berbagai norma-norma standar, kewajiban serta tanggung jawab dari setiap negara yang ikut menandatangani konvensi ini, terhadap penghapusan diskriminasi Perempuan. Akibatnya, Indonesia harus meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Dan dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka menjadi kewajiban bagi negara untuk mentransformasikan ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional.³³

Selanjutnya terdapat pertemuan-pertemuan Internasional yang berfokus pada Hak Asasi Perempuan, di antaranya Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (diadopsi oleh Majelis Umum PBB) pada tanggal 20 Desember 1993, yang dinyatakan dalam putusan-putusan di antaranya:

Pada Pasal 4 menyatakan bahwa negara harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak berlindung di balik pertimbangan adat, tradisi, atau keagamaan untuk menghindari tanggung jawab untuk menghapuskannya. Negara harus meneruskan dengan cara-cara yang tepat tidak menunda-nunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.³⁴

³³ Luh Putu Vera, Disertasi Perlindungan Hukum Perempuan Korban KDRT Dalam Proses Perceraian, 2023

³⁴ Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007

Dan saat masa reformasi bergulir, gerakan perempuan Indonesia semakin menguat. Terbukanya demokrasi pada awal tahun 1999 menjadi pijakan yang menggembirakan bagi pergerakan perempuan.

Hal ini dapat ditelusuri dari peran negara yang beritikad baik untuk lebih memprioritaskan persoalan kesetaraan melalui diterapkannya Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*) adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui sebuah perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi dalam ruang lingkup pemerintahan.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi alternatif bagi upaya mempercepat tercapainya kesetaraan gender karena nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan sistem dari suatu organisasi atau institusi, serta menjadi bagian dari nafas budaya di dalamnya. UUD 1945, UU Pemilu, UU Partai Politik, dan beberapa peraturan lainnya telah mengatur tentang akses perempuan Indonesia dalam bidang politik, pendidikan dan segenap aspek lainnya. Jaminan ruang keterwakilan perempuan dalam berpolitik dengan dialokasikannya kuota 30% oleh perundangan, masuknya perempuan dalam eksekutif, kebutuhan terhadap perbaikan tingkat kesehatan reproduksi perempuan, hak-hak buruh perempuan, *equal* dalam memperoleh akses pendidikan, mulai tampak sebagai aksi perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya di Indonesia.

b. Feminisme: Isu-isu Masa Kini

Perjuangan perempuan Indonesia di ranah publik, tidak bisa terlepas dari peran berbagai tulisan lepas di dunia sastra. Di masa lalu, isu-isu feminisme digambarkan dalam beberapa novel Indonesia seperti *Azab dan Sengsara* (Merari Siregar, 1920); *Sitti Nurbaya* (Marah Rusli, 1922); *Kehilangan Mestika* (Hamidah, 1935); *Layar Terkembang* (Sutan Takdir Alisyahbana, 1936); *Manusia Bebas* (Soewarsih Djojo Puspito, 1944); *Widyawati* (Arti Purbani, 1948) merupakan karya sastra yang indah yang mendeskripsikan cerita tentang kehidupan perempuan yang terdidik (Wiyatmi, 2002:7).

Novel-novel ini mengangkat isu-isu kesetaraan perempuan dalam kehidupan masyarakat dan adat yang kental dengan suasana patriarki. *Setting* cerita *Sitti Nurbaya* dalam novel *Kasih Tak Sampai* karya Marah Rusli di tahun 1922. Menggambarkan dengan jelas tentang kehidupan masyarakat adat Minangkabau di masa penjajahan Hindia Belanda dan pembaca diajak untuk berimajinasi, opini, dan mengetahui kehidupan saat itu.

Di masa kini, feminisme bergerak di semua sisi kehidupan masyarakat. Menurut Dzuhayatin, di Indonesia telah berkembang feminis politis, feminis akademis dan feminis populis (Budiman, 2000:ix). Feminis politis adalah mereka yang melakukan gerakan ini pada tataran *bargaining* dan *lobbying* baik yang bersifat lokal maupun internasional. Feminis ini, berjuang dalam bidang politik praktis. Mereka melakukan gerakan untuk persamaan hak-hak dan akses perempuan dalam pemerintahan. Mereka berfokus pada aktivitas, di bidang gagasan politik negara. Bagaimana hak-hak perempuan untuk partisipasi di dalam perpolitikan negara, Kuota perempuan dalam politik, keterwakilan perempuan, regulasi perempuan dalam berpolitik, kepemimpinan perempuan, hak-hak buruh perempuan, dan sebagainya.

Feminis praktis adalah mereka yang bergerak untuk memperhatikan aspek-aspek berbagai kebutuhan praktis perempuan, seperti perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, ketidakadilan dalam *crisis center*, *shelter*, dan sebagainya. Memberikan akses perlindungan dan bantuan advokasi-advokasi bagi perempuan dan anak-anak Indonesia yang mengalami kekerasan di berbagai bidang. Hal ini terfokus pada penanganan kebutuhan perempuan, baik dalam kondisi normal seperti kebutuhan kesehatan, reproduksi, pencegahan pelecehan seksual, maupun kondisi emergensi lainnya seperti terjadinya bencana alam, kerusuhan, dampak demonstrasi, konflik dan sebagainya.

Sedangkan kalangan feminis akademis lainnya adalah mereka yang menulis dan membahasakan, mempublikasikan berbagai persoalan, kendala-kendala yang dihadapi oleh dua kelompok sebelumnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan penulisan jurnal, memberi pelatihan-pelatihan (*workshop*, seminar), penelitian, kajian-kajian dan diskusi ilmiah tentang perempuan, pergerakan perempuan, kesetaraan gender, dan sebagainya. Bagi kalangan Kris (2000: ix) mengatakan bahwa “*perempuan untuk memperjuangkan keinginannya maka mereka harus menulis*”.

Ide-ide yang tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan yang kemudian di*publish* dalam buku dan jurnal di Indonesia saat ini sudah cukup banyak. Seperti halnya tulisan lainnya, gagasan/ide ini masuk dan mudah diakses oleh masyarakat melalui media internet. Internet menjadi sarana yang sangat berpengaruh dalam dasawarsa ini. Melalui tulisan-tulisan, tuangan-tuangan ide, opini, status pada sosial media, gerakan dan suara feminisme berkembang dan berjuang menerobos ruang dan waktu bagi para pembacanya. Para penulis artikel, novel, bahkan status dalam sosial media di era digital ini sangat mudah untuk memengaruhi pembacanya, memberi pemahaman pada khalayak serta memberi opini bagi masyarakat luas, menginspirasi dan menumbuhkan kesadaran diri. Dalam media ini, perempuan diharapkan bukan lagi sebagai objek yang senantiasa dieksploitasi secara lahir, namun peran media di sana juga mencoba mem*blow-up* seluruh potensi perempuan serta peran politik perempuan yang berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan, baik melalui jalur politik praktis, sosial, ekonomi dan pendidikan juga budaya.

Peran media massa saat ini memang sangat dibutuhkan, sebagai *public information* maupun sebagai sarana sosialisasi. Perempuan saat ini membutuhkan adanya sarana yang cukup untuk dapat berkembang, mengekspos gerak dan potensi diri mereka. Beberapa buku, artikel, karya ilmiah dan hasil penelitian kini semakin banyak ditulis dan dipublikasikan. Seiring dengan kemajuan teknologi internet di mana semua informasi dapat dengan mudah tersampaikan, media sosial, kecepatan dan ketepatan akses data feminisme di Indonesia juga bergerak seirama mengikuti arus laju internet.

Tentunya, harapan ke depan berkembangnya feminisme di Indonesia dapat membawa perubahan yang baik dalam masyarakat. Adapun beberapa isu yang menarik dalam berbagai tulisan kaum feminis di masa sekarang, adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan di dalam bidang politik dan keterwakilan politik perempuan, menjadi sarana untuk menyalurkan gagasan dan berbagai fokus kajian para feminis yang menarik, termasuk bahasan mengenai tidak terpenuhinya kuota 30% dan kepemimpinan untuk perempuan dalam politik.

- 2) Perempuan dalam pembangunan; perempuan dalam kemiskinan, kebutuhan akan akses pendidikan, kesehatan reproduksi, perempuan dalam berbagai program pembangunan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, penganggaran khusus untuk perempuan, penghapusan peraturan yang diskriminatif, perlindungan hukum, *affirmatif action*, perempuan dalam kabinet dan sebagainya.
- 3) Perempuan dalam ekonomi; isu buruh perempuan, sumber daya perempuan, karier dan rumah tangga, perempuan sebagai agen ekonomi, dan beberapa isu lain yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan yang mandiri secara finansial.
- 4) Perempuan dalam hubungan internasional, isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan buruh perempuan dalam MEA.

Tumbuhnya kesadaran dan keadilan gender di berbagai lapisan masyarakat saat ini, tidak lepas dari rangkaian perjuangan kaum feminis yang tak pernah padam di masa sebelumnya. Feminisme sebagai teori dan gerakan sosial, berkembang dan membawa perubahan yang positif dalam masyarakat. Namun lepas dari itu semua, tak satupun pihak yang memprioritaskan perubahan menuju keadilan gender kecuali perempuan itu sendiri. Artinya, kesempatan mengakses dunia politik, ekonomi, dan lain-lain yang terbuka harus terus dilakukan secara berkesinambungan oleh kelompok perempuan.

Upaya feminisme mewujudkan keadilan gender masih berat dan panjang. Diperlukan demokratisasi vertikal yang sistematis dan terstruktur, berkaitan dengan politik dan demokratisasi horisontal menuju runtuhnya tembok patriarkhi.

C. Ketahanan Keluarga

Menurut para ahli antropologi, keluarga adalah bagian unit terkecil dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara. Keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak adalah bagian dari interaksi sosial dalam kehidupan sebagai manusia. Keluarga terdiri menjadi dua, yaitu: pertama, keluarga kecil (*nuclear family*): keluarga inti adalah unit keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak mereka, yang kadang-kadang disebut juga sebagai *conjugal family*. Kedua, keluarga besar (*extended family*): Keluarga besar didasarkan pada hubungan darah dari sejumlah besar orang, yang meliputi orang tua, anak, kakek-nenek, paman, bibi, kemenakan, dan seterusnya.

Unit keluarga ini sering disebut sebagai *conguine family* (berdasarkan pertalian darah) keluarga, karena di sinilah permulaan kehidupan sosial seseorang berlangsung.³⁵ Kenyataan bahwa keluarga merupakan satuan kekerabatan yang bertempat tinggal dan dilandasi oleh adanya kerja sama ekonomi, mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak, menolong serta melindungi yang lemah, khususnya merawat orang tua jompo.³⁶

Keluarga merupakan pendidikan pertama dan terutama bagi anak yang akan tumbuh sebagai individu, yang nantinya akan berinteraksi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi seorang individu dewasa dapat dikatakan bertumbuh dan berkembang menjadi manusia seutuhnya, dengan mempelajari hal-hal dasar dari kehidupan dengan menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika dan pembentukan kepribadian anggotanya di dalam rumahnya baik secara

³⁵ Soelaeman, M.I. *Pendidikan Dalam Keluarga; Buku 1 Keluarga: Pengertian Dasar*. Bandung: Alfabeta, 1994. hal 123

³⁶ Wahyu Ms, *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986 hal: 57

sengaja maupun tidak sengaja. Jadi fungsi keluarga utama seperti yang telah tercantum pada resolusi majelis umum PBB adalah “keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera.” Keluarga merupakan institusi pertama dalam upaya menumbuh kembangkan sumber daya manusia. Sehingga ketahanan keluarga sering dikatakan sebagai pilar ketahanan nasional.

Berikut fungsi dari keluarga dalam konteks kehidupan adalah:³⁷

1. Fungsi biologis. Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama.
2. Fungsi edukatif (pendidikan). Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga.
3. Fungsi religious (keagamaan). Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan.
4. Fungsi protektif (melindungi). Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah privat, dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya, dan agama untuk diungkap secara publik.
5. Fungsi sosialisasi. Keluarga berkewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai tradisional yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat.
6. Fungsi ekonomi. Keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.
7. Fungsi rekreatif. Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (*refresing*) dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga.

Apabila fungsi ini dapat diwujudkan secara ideal bersama anggota keluarga, maka akan terciptalah suasana keluarga yang lebih menyenangkan, adanya hubungan saling menghargai dan menghormati, terciptanya penghiburan dari masing-masing anggota keluarga, sehingga hubungan harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota keluarga bukanlah suatu yang mustahil dirasakan. Dan jika fungsi-fungsi keluarga tersebut dapat dilaksanakan secara optimal,

³⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Malang Prees, 2008 hal. 42

maka keluarga akan melahirkan individu-individu yang sehat secara fisik, memiliki kecerdasan, berbudi pekerti, berakhlak mulia dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi.

Keluarga merupakan sistem sumber informal yang memberikan perlindungan dan cinta kasih bagi individu-individu di dalamnya. Oleh karena itu, keluarga disebut sebagai lembaga primer dan fundamental sebab mengemban fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Keluarga juga menyediakan fasilitas pertama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebuah keluarga akan bekerja sama untuk dapat memberikan kebahagiaan kepada masing-masing anggotanya. Keluarga sudah seharusnya menjadi tempat teraman dan nyaman bagi seluruh anggotanya, memberikan sebuah nilai identitas pribadi tanpa memandang usia. Ketika salah seorang anggota keluarga merasa tidak aman atau tidak nyaman, maka pasti yang pertama menjadi tempat meminta bantuan kepada anggota keluarga yang lain. Masing-masing anggota keluarga akan belajar tentang bagaimana menghargai diri sendiri dan belajar membangun fondasi bagi keberlangsungan hidup mereka.

Pondasi ini mencakup nilai-nilai keluarga yang kuat yang menjadi dasar moral bagi kehidupan di masa yang akan datang. Menghabiskan waktu bersama keluarga menunjukkan keluhuran hakikat nilai cinta, penghargaan dan keterbukaan komunikasi yang merupakan hal-hal penting untuk dilakukan oleh setiap anggota keluarga.

Dewasa ini keluarga menjadi salah satu isu tematik pembangunan sosial, baik nasional maupun global. Tidak sedikit keluarga yang mengalami perubahan struktur, fungsi dan peranannya. Setiap generasi selalu saja memiliki ciri khas, keunikan, dan nilai-nilai tersendiri, dan biasanya ada beberapa pergeseran nilai dari generasi sebelumnya. Tiap generasi juga merasa modern di masanya. Tumbuh sesuai zamannya, dan memperbaiki diri dari generasi sebelum-sebelumnya.

Banyak hal yang memengaruhi hal-hal tersebut, baik dari sisi sosial, ekonomi, pendidikan, hingga digital. Terjadinya perubahan-perubahan tersebut sedikit banyak telah menggoyahkan eksistensi keluarga, sehingga keluarga rentan mengalami kegoncangan, tidak memiliki ketahanan atau mengalami disorganisasi. Sebagaimana terjadi dewasa ini, di mana arus transformasi sosial yang mengiringi proses perubahan sosial tidak dapat dicegah, dan memasuki ranah kehidupan manusia di semua bidang kehidupan. Beberapa konsep keluarga modern saat ini menurut Dr. Atnike Nova Sigirowati, M.Sc, peneliti di Jurnal Perempuan:³⁸

1. Konsep keluarga modern bukan semata-mata pergantian atau pertukaran peran dalam pengasuhan anak dan ekonomi. Bukan lagi tentang imajinasi pertukaran peran laki-laki di rumah, perempuan yang mencari uang. Atau Perempuan bekerja di kantor, dan laki-laki mengasuh anak. Tapi keluarga dengan konsep peran gender yang setara, di mana laki-laki dan perempuan tidak melekatkan peran dan beban tertentu. Dengan tingginya tuntutan ekonomi, saat ini sebagian besar pasangan suami-istri harus sama-sama bekerja. Karena seorang pencari nafkah tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat ini.
2. Hilangnya stereotip keluarga inti atau ideal: dengan adanya ayah, ibu, anak. Stereotip keluarga inti kian berubah seiring bertambahnya jumlah orang yang menjadi orang tua tunggal.
3. Bergesernya makna anak *broken home*, yang dulunya ditempelkan pada anak-anak korban perceraian, namun kini menjadi anak-anak yang kedua orang tuanya ada namun tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai orang tua. Antara ada dan tiada.

³⁸ Gracia danarti, <https://www.femina.co.id/family/3-pakar-bicara-tantangan-keluarga-modern>, 2021

4. Dalam konsep keluarga modern terdapat perubahan peran gender yang bias. Siapa pun dalam keluarga bisa berbagi peran dan tugas dalam pengasuhan dan mendidik anak, orang tua, lansia, dan semua yang hidup dalam satu keluarga. Tidak ada perpecahan tugas rumah tangga dan ekonomi. Semua menjadi cair, pembagian kerja bisa dilakukan secara seimbang, adil, setara, sehingga semua orang dapat mencapai dan menunjukkan kemampuan optimalnya.

Di sisi lain, realitas keluarga di Indonesia masa kini juga memberikan gambaran berbeda dari konsep ideal keluarga modern seperti yang dipaparkan di atas.

Berikut beberapa fenomena kekerasan berbasis gender yang terjadi di Indonesia:

1. Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3.442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2.978 kasus di mana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di 2022.³⁹
2. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) membeberkan, terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima sepanjang 2023. Dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini mengalami kenaikan 30%,” kata Pjs Ketua Umum Komnas PA Lia Latifah. Lalu diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 985 kasus dan kekerasan psikis dengan 674 kasus. Berdasarkan tempat kejadiannya, kasus kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di lingkungan keluarga, yaitu sebanyak 35%. Diikuti oleh kejadian di lingkungan sekolah sebanyak 30%, lingkungan sosial 23%, dan tidak disebutkan 12%.
3. Dalam semester pertama di tahun 2023 ini, Polri menindak 137.419 orang yang dilaporkan terkait tindak pidana seluruh kejahatan di Indonesia. Sebanyak 14,11 persen dari seluruh terlapor terkait dengan tindak pidana narkoba atau sebanyak 19.401 perkara. Data itu didapat dari e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri. ebagian dari kasus-kasus tersebut melibatkan anak-anak sebagai penyalahguna maupun pengedar narkoba. Dari 2.549 jumlah korban sebanyak 1 korban berusia pelajar, sedangkan berdasarkan 24.333 jumlah terlapor, sebanyak 9,2 persen merupakan pelajar dan mahasiswa.
4. Komnas Perempuan mengungkapkan dalam memperingati HAN 2022, terdapat 59.709 kasus dispensasi pernikahan dini, dikabulkan oleh Pengadilan Agama sepanjang 2021. Hal ini berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022. Praktik dispensasi pernikahan juga terjadi pada anak perempuan korban kekerasan seksual, yang dinikahkan dengan pelaku.

Fenomena-fenomena tersebut di atas hanya beberapa contoh kejadian pada anak-anak Indonesia, terlebih khusus Perempuan, yang merupakan indikasi tidak berfungsinya peranan keluarga. Corak kehidupan materialistis dan individualistis, tampaknya sudah merasuki kehidupan sebagian keluarga di Indonesia, sebagaimana dilansir berbagai media massa nasional dewasa ini. Negara dan pemerintah sesungguhnya sudah memberi peluang terhadap fenomena sosial tersebut. Kebijakan dalam bentuk perundang-undangan telah diterbitkan, seperti Undang-Undang RI

³⁹ Catahu Komnas Perempuan, 2023

Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat diimplementasikan secara optimal, apabila didukung dengan pemahaman yang sama dan komitmen dari semua komponen bangsa, baik di pusat maupun di daerah.

Menurut Achir (1999), suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi, apabila keluarga itu dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi anggota-anggotanya. Karena itu, tanggung jawab keluarga meliputi pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, maka fungsi keluarga meliputi: fungsi cinta kasih, perlindungan atau proteksi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pengembangan lingkungan.

Pemikiran Achir tersebut, cara untuk mengetahui ketahanan keluarga dengan mencermati pelaksanaan sejumlah fungsi keluarga. Apabila sebuah keluarga telah mampu secara optimal melaksanakan sejumlah fungsinya, maka keluarga tersebut dapat dikatakan memiliki ketahanan. Sebaliknya, apabila sebuah keluarga tidak mampu melaksanakan fungsi secara optimal, maka sebuah keluarga tersebut memiliki kerapuhan dan kegoyangan eksistensinya.

Ketahanan keluarga merupakan sebuah konsep yang mengacu pada kemampuan keluarga sebagai sebuah sistem fungsional untuk mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psiko sosial anggota keluarga (Beevar, 2013; Hartini et al., 2020; Sunarti et al., 2003; Walsh, 2016).

Berikut ini beberapa konsep ketahanan keluarga, di antaranya:

1. Menurut UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1, poin (11), yang dimaksud dengan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.⁴⁰
2. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga (Sunarti 2001).
3. Ketahanan keluarga menurut UU No. 10 Tahun 1992 merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisk-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (BKKBN 1992).
4. Menurut Froma Walsh, seorang psikolog klinis asal Amerika dalam bukunya berjudul, "*Strengthening Family Resilience*", ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk dapat bangkit kembali dari kesulitan yang dialaminya. Atau dapat dikatakan pula sebagai kemampuan keluarga dalam beradaptasi mengelola sumberdaya yang dimilikinya dengan memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai kesejahteraannya.⁴¹

⁴⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>

⁴¹ Froma wals, *Strengthening Family Resilience edisi 3*, 2016

5. Megawangi, Zeitlin dan Garman (Sunarti dkk, 2003), ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik amupun psikosial keluarga.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam menghadapi tantangan, masalah, ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar keluarga, untuk mencapai tujuan keluarga hidup Bahagia dan Sejahtera. Keluarga sebagai bagian sistem terkecil dari masyarakat yang berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dikemukakan oleh Budhi Santoso (1994) dalam tulisannya “Ketahanan Keluarga sebagai Basis bagi Pembinaan Kualitas Sumber Daya Manusia”, bahwa betapapun sederhananya kehidupan suatu keluarga, pasti mengembangkan organisasi sosial yang masing-masing menjamin ketertiban dan pencapaian tujuan hidup bersama. Organisasi sosial itu pada intinya meliputi pengaturan hubungan sosial antar anggota (*sosial alignment*), cita-cita atau tujuan bersama yang mengikat kesatuan sosial yang bersangkutan (*sosial media*), ketentuan sosial yang disepakati sebagai pedoman dalam pergaulan sosial (*sosial standard*) dan penegakan ketertiban hidup bersama (*sosial control*). Berdasarkan pemikiran ini, maka setiap orang, baik sebagai individu, anggota keluarga maupun anggota masyarakat terikat oleh keempat norma sosial tersebut dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Kehidupan di zaman ini berjalan sangat dinamis, sehingga setiap keluarga dituntut untuk dapat beradaptasi dalam menghadapi berbagai perubahan. Telah terjadi pergeseran kehidupan keluarga dari keluarga yang tradisional menjadi *modern* bahkan kini menjadi *post-modern*. Perubahan ini terus bergerak dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, yaitu perubahan sosial, ekonomi, dan psikologis. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk dapat menjaga ketahanannya dalam berbagai dimensi atau aspek yang menyertai.

Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Kebutuhan keluarga dapat terpenuhi melalui kemampuan dalam mengelola masalah yang dihadapi berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Tingkat ketahanan keluarga salah satunya juga ditentukan oleh kemampuan individu dan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki pengetahuan dan kesadaran yang tinggi. Mereka inilah yang cenderung memiliki ketahanan keluarga yang baik, kuat, dan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan teknologi informasi dan komunikasi.⁴²

Ketahanan Keluarga seringkali menghadapi gangguan/ancaman dari berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi maupun dari lingkungan alam dapat menimbulkan kerentanan terhadap keluarga. Adapun jenis-jenis ancaman (*vulnerability*) yang biasanya dihadapi keluarga antara lain:⁴³

1. Kerapuhan aspek ekonomi (*economic vulnerability*) yang merupakan tekanan makro termasuk tekanan ekonomi keluarga terhadap produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi keluarga. Hal ini merupakan masalah paling mendasar dalam keluarga dalam upaya

⁴² Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol.7(2) 2019

⁴³ Seieun, & Chang, S. J. (2014). Concept analysis: Family resilience. *Journal of Nursing*, 4, 980- 990.

bertahan hidup. Karena Kebutuhan primer, sandang, papan, manusia sangat bergantung pada kemampuan ekonominya.

2. Kerapuhan aspek lingkungan (*environmental vulnerability*) yang merupakan tekanan dari luar yang berasal dari sistem ekologi sumberdaya alam (*natural ecosystems*). Masalah lingkungan adalah masalah yang sering terabaikan oleh banyak keluarga. Dengan berbagai alasan, salah satunya ekonomi membuat banyak keluarga tidak mampu bertahan menghadapi masalah-masalah sederhana akibat kerusakan alam, seperti kesediaan air bersih, bahaya banjir, tanah longsor karena tinggal di daerah-daerah yang tidak memenuhi syarat sebagai tempat pemukiman.
3. Kerapuhan aspek sosial (*sosial vulnerability*) yang merupakan tekanan dari luar yang berhubungan dengan stabilitas sosial dan masalah sosial masyarakat. Masalah sosial saat ini menjadi masalah yang sangat kompleks, di mana semakin banyak manusia yang mengalami masalah psikologis akibat tekanan sosial yang ada. Media sosial sangat memengaruhi mental setiap individu.

Ketahanan keluarga ini harus dibangun dengan sebuah persepsi bahwa terdapat hubungan yang sangat erat, antara kualitas dari keluarga dengan kualitas suatu bangsa. Bangsa yang hebat terbangun dari kumpulan-kumpulan keluarga sehat lahir dan batin, juga cerdas. Ketahanan nasional tentu saja dapat terwujud jika tercipta ketahanan keluarga yang berasal dari sumber daya manusia yang berkualitas.

Goode yang dikutip oleh Solihin (2007), dengan menggunakan pendekatan struktural mengemukakan bahwa peningkatan ketahanan keluarga dilakukan agar terjadi keserasian dalam hal:

1. Hubungan antara keluarga dengan unit-unit sosial yang lebih luas, maksudnya sistem ketetangaan, institusi ekonomi, politik/ pemerintahan, institusi hukum, agama dan lain-lain. Bila tercipta keharmonisan, maka dihasilkan kondisi ketahanan keluarga yang tinggi, artinya keberadaan institusi tersebut akan mendukung terciptanya ketahanan keluarga.
2. Hubungan antara keluarga dengan subsistemnya bisa berarti hubungan antara anggota keluarga, atau antara keluarga dengan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga tersebut yang pada gilirannya menghasilkan keluarga yang tangguh dalam menghadapi guncangan. Dalam kaitan menciptakan ketahanan keluarga yang sejalan dengan pembangunan sosial, maka internalisasi nilai tentang kejujuran, kerukunan, keuletan dan lain-lain merupakan hal yang dianjurkan untuk dimiliki setiap keluarga.
3. Hubungan antara keluarga dengan kepribadian anggotanya berkaitan dengan bagaimana peran orang tua dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik utama individu dalam kelompok primernya, sehingga menghasilkan individu-individu dengan pribadi yang tangguh, ulet, tahan guncangan yang pada akhirnya menghasilkan keluarga yang berketahanan tinggi.

Pemikiran Goode tersebut menekankan, bawa ketahanan keluarga dapat dibangun melalui pengembangan interaksi dan relasi sosial yang harmonis, baik antara anggota keluarga, anggota keluarga dengan sistem nilai dan norma dalam keluarga; maupun anggota keluarga dengan masyarakat dan institusi-institusi yang ada di masyarakat.

Guru Besar Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga IPB Prof. DR. Euis Sunarti, M.Si menyatakan keluarga sebagai unit sosial terkecil adalah penentu kualitas hidup. "Kualitas hidup

keluarga mencerminkan kualitas hidup bangsa. Hal tersebut juga sejalan dengan ketahanan di keluarga mencerminkan ketahanan nasional”.⁴⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada Webinar “Membangun Negara dan Bangsa Melalui Penguatan Ketahanan Nasional yang Bersumber dari Ketahanan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan oleh *Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Early Childhood Care Education and Parenting* (SEAMEO CECCEP), Ketahanan keluarga berada pada ketahanan sosial budaya,” ujar Agus. Selanjutnya Agus menyampaikan bahwa elemen dasar dalam sebuah keluarga adalah adanya pemenuhan persyaratan pada kesehatan, kebugaran jasmani dan intelektual para anggota keluarga⁴⁵. Hubungan dalam sebuah keluarga akan sangat dipengaruhi dari hubungan di antara anggota keluarga. Kemampuan dalam menumbuh kembangkan kapasitas individu dalam keluarga menjadi sebuah kapasitas yang akan terintegrasi secara komprehensif dalam sebuah kesatuan hukum keluarga.

Gubernur Lemhanas juga menegaskan bahwa pembentukan karakter seorang manusia secara individu, bukan karena pengembangan alamiah atau karena pendidikan formal, tetapi terbentuk juga melalui pendidikan informal yang terbentuk dari kehidupan keluarga, kerabat, pertemanan, dan lingkungan sosial.⁴⁶ Sehingga keluarga merupakan tempat pembelajaran dan pembentukan habit/karakter, juga kepribadian dari orang tua terhadap anak. Hal ini dapat dipastikan menimbulkan kerentanan terhadap hubungan emosional antara orang tua dan anak, baik menjadi hubungan yang positif atau justru dapat menghancurkan satu dengan lainnya. “Pembentukan karakter individu bergantung pada karakter keluarga yang berkembang menjadi karakter suatu bangsa, baik buruknya karakter bangsa ditentukan pada karakter keluarga yang nantinya menentukan ketahanan nasional. **Memperkuat ketahanan keluarga berarti memperkuat ketahanan nasional,**” tutur Agus.⁴⁷

Dewasa ini keluarga berada pada dua sisi yang paradoks. Di satu sisi, keluarga memegang posisi sentral dalam pembangunan bangsa, dan di sisi yang lain keluarga menghadapi ancaman yang datang dari eksis perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Perubahan sosial yang dewasa ini terjadi di masyarakat, ditandai dengan semakin menguatnya emansipasi dan peluang wanita di semua sektor kehidupan dan pekerjaan. Pada sebagian wanita, ambisi karier tidak diimbangi dengan tugas dan kewajibannya di dalam keluarga. Akibatnya komunikasi, interaksi dan relasi sosial dengan anak-anaknya sangat terbatas dan tidak berkualitas. Situasi demikian ini, akan memengaruhi pemenuhan kebutuhan sosial dan mental spiritual anak-anaknya, sehingga tumbuh kembang anak akan mengalami gangguan (Suradi, 2012).

Selain terbatasnya komunikasi, interaksi dan relasi sosial antara orang tua dengan anak, permasalahan ekonomi rumah tangga merupakan faktor lain yang memengaruhi disorganisasi sosial keluarga. Penghasilan yang rendah di satu sisi, dan tuntutan kebutuhan yang tinggi

⁴⁴ <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/629-ketahanan-keluarga-fondasi-ketahanan-nasional>, 2019

⁴⁵ <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/908-agus-widjojo-ketahanan-keluarga-merupakan-fondasi-ketahanan-nasional>

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

melampaui daya beli di sisi lain, dapat menimbulkan gangguan mental spiritual. Orang kemungkinan dapat stress dan bahkan depresi, apabila situasi mental spiritualnya tidak cukup kuat menghadapi permasalahan. Pada situasi ini dapat menimbulkan kejadian yang ekstrem, seperti tindak kekerasan dalam keluarga, yang dapat berakhir dengan kematian (news.mnctv.com, 2013).

Merespons situasi yang berkembang di masyarakat dan tuntutan akan peranan dan fungsi keluarga, maka perlu dikembangkan kebijakan sosial yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Pada tingkat lokal, sudah banyak program-program yang dikelola oleh kelembagaan sosial yang diinisiasi pemerintah, yaitu:

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Bina Keluarga Balita (BKB), diinisiasi oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
3. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
4. Karang Taruna diinisiasi oleh Kementerian Sosial.
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) diinisiasi oleh Kementerian Sosial.

Berbagai kelembagaan sosial tersebut di atas merupakan kekuatan atau potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat pada tingkat lokal. Meskipun tumbuhnya diinisiasi pemerintah, namun dalam pengelolaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat. Peranan pemerintah memberikan bimbingan dan asistensi, baik pada aspek kelembagaan maupun pada aspek program dan kegiatan. Selain kelembagaan sosial yang diinisiasi pemerintah, pada tingkat lokal secara alamiah tumbuh kelembagaan sosial yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat sebagai mekanisme pemecahan masalah yang dihadapi.

Bab 2

Wawasan Nusantara

A. Wawasan Nusantara

Sebagai warga negara Indonesia, lahir dan tumbuh besar bersama segala keunikan adat istiadat, suku, bahasa, agama, budaya, menumbuhkan rasa bangga dan cinta pada tanah air. Tak ada negara di dunia ini yang sekaya Indonesia dengan memiliki begitu banyak ragam budaya yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Nusantara. Memiliki kekayaan alam yang berlimpah menjadi pesona tersendiri bagi negara-negara lainnya untuk berupaya menguasainya dengan berbagai cara.

Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta di antara dua Samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan 16.771 Pulau yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terluas di dunia.

Posisi geografis yang strategis ini sangat berdampak besar bagi kegiatan perekonomian Indonesia, karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan. Beberapa keuntungan lainnya akibat letak geografis ini adalah:⁴⁸

1. Indonesia terletak pada jalur perdagangan internasional dengan posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Hal ini dapat dilihat dari posisi Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra yang merupakan jalur perdagangan internasional baik laut maupun udara. Kapal-kapal dagang dari wilayah Asia Timur seperti Jepang dan Tiongkok ketika akan ke Eropa berlayar melintasi Indonesia terlebih dahulu.
2. Letak geografis Indonesia juga berdampak pada asimilasi budaya dan pengetahuan. Dengan adanya lalu lintas perdagangan dunia, Masyarakat Indonesia berinteraksi dengan berbagai suku bangsa dengan budaya yang berbeda, sehingga memengaruhi perkembangan budaya yang ada. Hal ini juga berpengaruh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan bahasa internasional, masyarakat bertukar informasi dan pengetahuan yang baru.
3. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa, sehingga dilalui dengan dua angin muson barat dan timur, beriklim tropis, memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Setiap enam bulan sekali terjadi pergantian musim di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau yang berpengaruh pada kegiatan pertanian di Indonesia. Dengan berada di kawasan *ring of fire*, Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menghasilkan endapan material, yang menjadikan Indonesia memiliki tanah yang subur.

⁴⁸ Kristina, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5689524/6-keuntungan-letak-geografis-indonesia-posisi-strategis-tanah-subur,20-08-2021>

4. Indonesia memiliki beragam jenis flora dan fauna. Untuk perairannya, laut Indonesia kaya akan biota laut. M.Hasanudin dalam jurnal penelitiannya *Oseana* (LIPI,1998) menyatakan” proses *Upwealing* (pergerakan massa air bersuhu dingin dan kaya nutrisi) yang terjadi pada arus lintas Indonesia (Arlindo) mengangkat sumber makanan keperairan dangkal. Proses *Upwealing* ini berperan menyuburkan biota laut yang menjadi peluas usaha pariwisata, seperti wisata *scuba diving* atau *snorkling*. Memperhatikan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya jika kita warga negara Indonesia memiliki rasa bangga dan menumbuhkan rasa cinta kepada negara. Cara pandang kita terhadap negara seutuhnya, merupakan bentuk sederhana wawasan Nusantara.

Secara etimologi, kata Wawasan Nusantara berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang artinya pandangan, pengelihatan atau tinjauan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan dan antara yang artinya dua hal.⁴⁹ Jadi pengertian secara umum yang dimaksud dari Wawasan nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua hal(Asia dan Australia) juga dua samudera (Hindia dan Pasifik).

Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional.⁵⁰

Sementara pengertian Wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan: “Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional.”⁵¹ Secara keseluruhan, wawasan Nusantara merupakan “cara pandang” bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Wawasan tersebut merupakan penjabaran dari falsafah bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis suatu bangsa serta sejarah yang pernah dialaminya. Esensinya adalah pelaksanaan dari Bangsa Indonesia itu sendiri dalam memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, serta kondisi sosial-budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.⁵²

Dengan demikian, wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional.⁵³ Basrie turut menambahkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara berpikir, cara bertindak, cara bertingkah laku Bangsa Indonesia sebagai interaksi proses psikologis, sosio-kultural, dengan aspek astagatra (kondisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan penduduk).⁵⁴

⁴⁹ Endang Zaelani Sukaya, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, 2002

⁵⁰ Monica Ayu Caesar Isabela, Pengertian dan Hakikat Wawasan <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/01000021/pengertian-dan-hakikat-wawasan-nusantara>.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Sunarso, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press, 2006, hlm. 165

⁵³ Chaidir Basrie, *Pemantapan Wawasan Nusantara Menuju Ketahanan Nasional*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, 2002, hlm.14

⁵⁴ *Ibid*, hlm 34

B. Tujuan Wawasan Nusantara

Salah satu cara untuk mengikat tali persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan Wawasan Nusantara. Melalui hal tersebut, kita dapat mewujudkan kepulauan nusantara sebagai sebuah kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama keadilan, solidaritas, kerja sama, dan kesetiakawanan terhadap ikrar bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.⁵⁵

Wawasan nusantara memiliki dua tujuan utama, di antaranya:

1. Tujuan wawasan nusantara ke luar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam UUD 1945.
2. Tujuan wawasan nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin, juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya merupakan fenomena (gejala) sosial yang dinamis dan memiliki tiga unsur dasar, yaitu:

1. Wadah

Untuk meninjau konsep wadah, perlu ditinjau pula mengenai asas archipelago, yaitu kumpulan pulau-pulau dan lautan sebagai kesatuan wilayah. Artinya, antara kepulauan dan wilayah perairan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang batas-batasnya ditentukan oleh wilayah laut. Dalam lingkungan tersebut terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau yang menjadi satu kesatuan wilayah.⁵⁶

2. Isi

Aspirasi bangsa Indonesia sebagai “isi” dari wawasan Nusantara dapat dirinci menjadi cita-cita proklamasi, asas/sifat dan ciri-ciri, serta cara kerja. Cita-cita yang terkandung di dalam wawasan Nusantara sebagaimana dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Cita-cita wawasan Nusantara itu bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air, mewujudkan kesejahteraan umum, juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Aspirasi bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh memiliki ciri-ciri atau sifat sebagai berikut:

- a. Manunggal, yaitu keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan sesuai makna sesanti “Bhinneka Tunggal Ika”.

⁵⁵ Nur Wasilatus Sholeha, Pengertian Wawasan Nusantara, Fungsi, Asas, Tujuan, dan Unsur Dasar, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7306362/pengertian-wawasan-nusantara-fungsi-asas-tujuan-dan-unsur-dasar>

⁵⁶ John Piaris, *Strategi Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional*, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm. 76-77.

- b. Utuh-menyeluruh, yaitu bahwa aspirasi bangsa dalam mewujudkan wawasan Nusantara yang utuh dan menyeluruh (komprehensif dan integral) dalam seluruh aspek kehidupan sesuai dengan makna Sumpah Pemuda “Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa”.

Cara kerja Bangsa Indonesia untuk mewujudkan wawasan Nusantara berpedoman kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945 yang memberikan arah mengenai pengendalian hidup bermasyarakat serta penetapan hak asasi dan kewajiban bangsa Indonesia.

3. Tata Laku

Tata laku sebagai unsur dari wawasan Nusantara adalah tindakan, sikap, perilaku bangsa Indonesia dalam melaksanakan aspirasinya guna mewujudkan Indonesia satu sebagai kesatuan yang utuh dan menyeluruh dalam mencapai tujuan nasional. Tata laku batiniah berwujud pengamalan falsafah Pancasila yang melahirkan sikap mental sesuai kondisi lingkungan hidupnya dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Tata laku batiniah terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya yang merupakan produk dari kebiasaan yang membudaya. Tata laku lahiriah sendiri dituangkan dalam suatu pola tata laku yang dapat diperinci dalam tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengendalian atau pengawasan.

C. Pokok-Pokok Wawasan Nusantara

Secara konstitusional, wawasan Nusantara dikukuhkan dengan Kepres MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis Besar Haluan Negara Bab II Sub E. Pokok-pokok wawasan Nusantara dinyatakan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional mencakup hal-hal berikut ini:

1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki arti bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air serta memiliki satu tekad di dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.
2. Kedua, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial dan budaya memiliki arti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, kehidupan dalam berbangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat perkembangan kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki arti bahwa seluruh kekayaan alam di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata bagi seluruh masyarakat, di seluruh wilayah tanah air. Selain itu, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.⁵⁷

⁵⁷ Sunarso, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press, 2006, hlm. 166-167

Dengan ditetapkannya rumusan wawasan Nusantara sebagai ketetapan MPR, wawasan Nusantara memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua penyelenggara negara, semua lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, serta semua warga negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap rumusan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan nasional harus mencerminkan hakikat rumusan dari wawasan Nusantara.

D. Asas-Asas Wawasan Nusantara

Menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 206), yang dimaksud dengan Asas Wawasan Nusantara adalah ketentuan dan kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara serta senantiasa diciptakan dan diterapkan agar pembentuk bangsa Indonesia tetap setia dan taat terhadap kesepakatan bersama. Asas-asas Wawasan Nusantara tersebut adalah:

1. Kepentingan yang sama
Kepentingan dan tujuan kita semua sama, yakni tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik dari sebelumnya.
2. Keadilan
Yakni kesesuaian dan kesetaraan pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.
3. Kejujuran
Jujur berarti berani berpikir, bersikap, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya.
4. Solidaritas
Diperlukan rasa senasib, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
5. Kerja sama
Dibutuhkan adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik.
6. Kesetiaan
Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Boedi Oetomo Tahun 1908, Sumpah Pemuda Tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Maka demi keutuhan bangsa, asas wawasan Nusantara ini merupakan komponen pembentuk kesepakatan bersama. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai sebuah ajaran dan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional agar cita-cita dan tujuan nasional bangsa terwujud.

E. Integrasi Nasional

Dalam usaha mencapai tujuan nasional masih banyak yang memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda-beda, dan itu adalah sesuatu yang wajar juga manusiawi. Latar belakang pendidikan, sosial dan budaya membentuk karakter setiap orang. Untuk itulah pemerintah Indonesia harus memiliki sebuah rumusan dalam konsep pandangan nasional yang komprehensif

dan integral dalam bentuk wawasan Nusantara. Wawasan ini akan memberikan konsepsi yang sama pada seluruh warga negara tentang visi ke depan bangsa Indonesia dalam menciptakan kesatuan dan persatuan, sehingga harapan menghasilkan integrasi nasional dapat dengan mudah tercapai.

Secara teoretis, integrasi dapat dilukiskan sebagai pemilikan perasaan keterikatan pada suatu pranata dalam suatu lingkup teritorial guna memenuhi harapan-harapan yang bergantung secara damai di antara penduduk. Secara *etimologis*, *integrasi berasal dari kata integrate*, yang berarti memberikan tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan.

Oleh karena itu, pengertian integrasi adalah membuat unsur-unsurnya menjadi satu kesatuan dan utuh. Integrasi berarti menggabungkan setiap bagian menjadi sebuah kesatuan namun tiap-tiap bagian diberi tempat, sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional merupakan hal yang didambakan yang dapat mengatasi perbedaan suku, ras, dan agama. Kebhinekaan ini merupakan aset Bangsa Indonesia apabila diterima secara ikhlas untuk saling menerima dan menghormati dalam wadah NKRI.⁵⁸

Menurut Sartono Kartodirdjo, integrasi nasional berasal dari integrasi teritorial dan merupakan integrasi geopolitik yang dibentuk oleh transportasi, navigasi, dan perdagangan, sehingga terciptalah komunikasi ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang semakin luas dan intensif. Pada saat ini, NKRI diperkokoh dengan adanya sistem administrasi yang sentralistik melalui sistem edukasi, militer, dan komunikasi.⁵⁹

Kebijakan kebudayaan dalam konteks integrasi nasional bukan berarti tidak pernah dikenal dalam peta politik di Nusantara. Hal ini dikarenakan pemerintah kolonial Hindia-Belanda tatkala menguatkan kekuasaannya di Nusantara tempo dulu menempatkan semua jabatan di wilayah yang paling rentan dalam kaca mata mereka kepada para ahli-ahli yang tahu tentang masyarakat dan kebudayaan setempat untuk menangani masalah politik dan sosial tanpa menimbulkan pemberontakan bersenjata yang akan mahal harganya untuk ditumpas.⁶⁰

Masyarakat Indonesia sangat heterogen dan pluralistis. Oleh karena itu, bagi integrasi sosial budaya unsur-unsurnya memerlukan nilai-nilai sebagai orientasi tujuan kolektif bagi interaksi antarunsur.⁶¹ Sehubungan dengan hal ini, ideologi bangsa, nilai nasionalisme, dan kebudayaan nasional memiliki fungsi yang sangat strategis. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat saja menggantikan nilai-nilai tradisional dan primordial yang tidak relevan lagi asa di dalam kehidupan masyarakat baru. Dengan demikian, nilai nasionalisme memiliki nilai ganda, yaitu selain dapat meningkatkan integrasi nasional, juga berfungsi menanggulangi dampak kapitalisme dan globalisasi serta dapat mengatasi segala hambatan ikatan primordial. Primordialisme dan etnosentrisme memang tidak bisa dihapus begitu saja, namun perlu dikembangkan menjadi identitas nasional.⁶²

⁵⁸ *Ibid*, 182-183

⁵⁹ Sartono Kartodirdjo, *Integrasi Nasional*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1993, hlm. 85.

⁶⁰ Parnusa, *Perjuangan Amanat Rakyat Nusantara*, Jakarta: PT. Purnasatama Cemerlang, 1998, hlm. 24

⁶¹ Tholhah Imam, dkk., *Mewaspadai dan Mencegah Konflik Antar Umat Beragama*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia Proyek Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama, 2001, hlm. 61.

⁶² Dawam Raharjo, *Pembangunan Ekonomi Nasional: Suatu Pendekatan, Pemerataan, Keadilan, dan Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Intermedia, 1997, hlm. 208.

Integrasi dan nasionalisme saling terkait dan memengaruhi. Integrasi memberi sumbangan terhadap pertumbuhan rasa nasionalisme dan rasa nasionalisme yang tinggi dapat mendukung integrasi nasional. Oleh karena itu, integrasi nasional harus terus-menerus dibina dan diperkuat dari waktu ke waktu secara masif. Kelalaian terhadap pembinaan integrasi dapat menimbulkan konflik dan disintegrasi bangsa.⁶³

Integrasi nasional biasanya dikaitkan dengan pembangunan nasional karena masyarakat Indonesia yang majemuk sangat diperlukan untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan agar pembangunan nasional tidak terkendala. Dalam hal ini, kata-kata kunci yang harus diperhatikan adalah mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis dan saling membantu atau dalam koridor lintas SARA.

Integrasi mengingatkan adanya kekuatan yang menggerakkan setiap individu untuk hidup bersama sebagai bangsa. Dengan integrasi yang tangguh, yang tercermin dari rasa cinta, bangga, hormat, dan loyal kepada negara, maka cita-cita nasionalisme dapat terwujud. Dalam integrasi nasional, masyarakat termotivasi untuk loyal kepada negara dan bangsa. Di dalamnya terkandung cita-cita untuk menyatukan rakyat mengatasi SARA melalui pembangunan integral. Integrasi nasional yang solid akan memperlancar pembangunan nasional dan pembangunan yang berhasil akan memberikan dampak yang positif terhadap negara dan bangsa sebagai perwujudan nasionalisme. Dengan berhasilnya pembangunan sebagai wujud nasionalisme, konflik-konflik yang mengarah kepada perpecahan atau disintegrasi dapat diatasi karena integrasi nasional memerlukan kesadaran untuk hidup bersama dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis.

Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap sebagai hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal tersebut justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, kreatif, dan sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi.

Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan dan tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Dengan persepsi yang sama diharapkan dapat membawa bangsa menuju kesepahaman dan kesehatan dalam mewujudkan cita-cita nasional. Suatu persepsi atau pandangan yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan bersama akan merugikan kesatuan, kebersamaan, dan keserasian, sehingga menimbulkan gejolak sosial yang dapat merugikan bangsa secara keseluruhan.

Pembinaan dan sosialisasi wawasan Nusantara sangat penting bagi warga negara Indonesia karena dapat menghasilkan ketahanan nasional. Daya tahan yang kuat bagi suatu bangsa dan kerja sama yang sinergis di berbagai bidang yang diusahakan secara terus-menerus dapat menghasilkan integrasi nasional yang utuh dan menyeluruh.

⁶³ Sunarso, dkk., *Op.cit.*, hlm. 184.

Bab 3

Ketahanan Nasional

Setiap bangsa mempunyai cita-cita, karena cita-cita berfungsi sebagai penentu untuk mencapai tujuan. Tujuan bangsa Indonesia telah dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, dalam usaha mencapainya banyak mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman oleh karena itu perlu kekuatan untuk mewujudkannya. Kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut dikenal dengan istilah Ketahanan Nasional.

Ketahanan Nasional perlu dibina terus menerus dan dikembangkan agar kelangsungan hidup bangsa tersebut dapat dijamin. Dalam sejarah perjuangan bangsa, ketahanan bangsa Indonesia telah teruji, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajahan Jepang, Belanda, menghadapi sparatis RMS, PRRI, Permesta, DI TII, PKI, GAM, Papua Merdeka. NKRI tetap tegak berdiri karena memiliki daya tahan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Bangsa Indonesia menghadapi permasalahan KKN, krisis moneter, kemiskinan, pengangguran, konflik SARA, pelanggaran HAM, SDM yang rendah, globalisasi, namun hanya dengan ketahanan bangsa saja kelangsungan hidup bisa terjamin.

A. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan berasal dari asal kata “tahan”; tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi Ketahanan Nasional adalah perihal kuat, teguh, dalam rangka kesadaran, sedang pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal disuatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Pengertian Ketahanan Nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya adalah *national resilience* yang mengandung pengertian dinamis, dibandingkan pengertian *resistence* dan *endurance*.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Keadaan atau kondisi selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah, oleh karena itu ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar memandai sesuai dengan perkembangan zaman. Jika kita mengkaji ketahanan nasional secara luas kita akan mendapatkan tiga “wajah” ketahanan nasional, walaupun ada persamaan tetapi ada perbedaan satu sama lain:

1. Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis mengacu keadaan “nyata riil” yang ada dalam masyarakat, dapat diamati dengan pancaindra manusia. Sebagai kondisi dinamis maka yang menjadi perhatian adalah ATHG di satu pihak dan adanya keuletan, ketangguhan, untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman.
2. Ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara diperlukan penataan hubungan antara aspek kesejahteraan (IPOLEKSOSBUD) dan keamanan (Hankam). Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri dan sifat-sifat ketahanan nasional, serta tujuan ketahanan nasional.
3. Ketahanan Nasional sebagai metode berpikir, ini berarti suatu pendekatan khas yang membedakan dengan metode berpikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif dan deduktif, hal ini juga dalam ketahanan nasional, dengan suatu tambahan yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai satu kesatuan utuh menyeluruh.

B. Metode Astagatra

Dalam usaha mencapai tujuan nasional senantiasa menghadapi ATHG sehingga diperlukan suatu ketahanan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang didasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: Manusia berbudaya, sebagai makhluk Tuhan pertama-tama berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara antropologis budaya manusia merupakan makhluk Tuhan paling sempurna.

Mempunyai akal budi sehingga lahir manusia berbudaya. Sebagai manusia berbudaya mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha mempertahankan eksistensinya dan kelangsungan hidupnya. Kita mengenal hubungan-hubungan itu adalah:

1. Hubungan manusia dengan Tuhannya, dinamakan “agama”
2. Hubungan manusia dengan cita-citanya, dinamakan “ideologi” - Hubungan manusia dengan kekuasaan, dinamakan “politik”
3. Hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan, dinamakan “ekonomi”
4. Hubungan manusia dengan manusia lainnya, dinamakan “sosial”
5. Hubungan manusia dengan rasa keindahan, dinamakan “seni/budaya”
6. Hubungan manusia dengan pemanfaatan alam, dinamakan “IPTEK”
7. Hubungan manusia dengan rasa aman, dinamakan “Hankam”

Hubungan manusia dengan lingkungannya pada hakikatnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu kesejahteraan dan keamanan. Untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa diperlukan suatu konsep pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan serasi dalam semua aspek kehidupan nasional. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Kehidupan nasional dapat dibagi dalam berbagai aspek sebagai berikut:

1. Aspek Nasional meliputi Sikaya Mampu:
 - a. Posisi lokasi geografi
 - b. Keadaan dan kekayaan alam
 - c. Kemampuan penduduk

2. Aspek alamiah terdiri dari 3 aspek, maka dikenal dengan istilah “Trigatra”. Di mana Trigatra membahas konsep-konsep ketahanan nasional yang bersifat alamiah, seperti letak geografis, sumber kekayaan alam negara, dan mengenai kependudukan.
3. Aspek sosial meliputi IPOLEKSOSBUD-Hankam, yaitu:
 - a. Ideologi
 - b. Politik
 - c. Sosial
 - d. Budaya
 - e. Hankam atau dikenal dengan istilah Pancagatra

Kehidupan nasional merupakan gabungan antara Trigatra dan Pancagatra, maka disebut juga dengan istilah Astagatra. Antara gatra satu dengan lainnya terdapat hubungan timbal balik (korelasi) dan saling ketergantungan (interdependensi) antara satu dengan lainnya.

C. Aspek Trigatra

1. Posisi dan Lokasi Geografi Negara

Secra geografis wujud negara dapat berupa:

- a. Negara dikelilingi daratan seperti Laos, Swis, Afganistan.
- b. Negara daratan dengan sebagian perairan laut, seperti Irak, Brunei Darusalam.
- c. Negara pulau, seperti Australia, Malagasi.
- d. Negara kepulauan (Archipelagic state), misalnya Indonesia.

Secara astronomis Indonesia berada di posisi 95° Bujur Timur (BT) sampai 141° Bujur Timur (BT), serta antara 6° Lintang Utara (LU) sampai dengan 11° Lintang Selatan (LS). Posisi ini sangat menguntungkan dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan transportasi. Wilayah Indonesia juga merupakan daerah pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Alhasil, wilayah Indonesia memiliki banyak gunung api dan merupakan daerah rawan gempa.

Bentuk, keadaan dan lokasi geografi suatu negara sangat memengaruhi kehidupan bangsa yang mendiaminya, dalam menyelenggarakan dan pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Negara kepulauan dalam membina ketahanan nasionalnya akan lebih banyak memanfaatkan potensi lautnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, berada di wilayah Asia Tenggara, dengan total pulau 17rb, namun sekitar 7000 pulau yang memiliki penghuni. Memiliki lima pulau terbesar adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan (Borneo), Sulawesi, dan Papua. Dilansir dari Encyclopedia Britannica dalam kompas.com, pulau-pulau Indonesia terletak di seberang garis khatulistiwa dan membentang dengan jarak yang setara dengan seperdelapan bumi.

Posisi letak geografis suatu negara akan sangat menentukan peran negara tersebut dalam percaturan lalu lintas dunia, sehingga akan menghadapi bentuk-bentuk ancaman berbeda. Dapat ditarik kesimpulan letak geografis suatu negara akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional suatu bangsa.

Pengaruh letak geografis terhadap politik melahirkan geopolitik, geostrategi, sehingga dikenal dengan wawasan nasional suatu bangsa yang tumbuh karena pengaruh tersebut. Pengaruh tersebut dikenal dengan istilah Wawasan Benua, Samudra, atau kombinasi. Bangsa Indonesia

berpendapat bahwa wawasan-wawasan tersebut di atas bersifat rawan dan tidak kekal. Namun justru pemanfaatan tanah, air, dan ruang yang diintegrasikan dengan unsur-unsur sosial secara simultan di dalam suasana yang serasi, seimbang dan dinamis dapat menunjang penyelenggaraan dan peningkatan ketahanan nasional. Dengan demikian setiap negara dapat mengembangkan wawasan nasionalnya sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi geografisnya.

2. Keadaan dan Kekayaan Alam

Kekayaan alam suatu negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, di laut, di udara yang berada di wilayah suatu negara, dan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kekayaan alam digolongkan: flora, fauna dan tambang.
- b. Sifat kekayaan alam: dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui.
- c. Keberadaan kekayaan alam: di atmosfer, di permukaan bumi, di dalam bumi.

Sifat kekayaan alam di bumi tersebar tidak merata, dan tidak teratur sehingga ada negara kaya sumber daya alam, dan miskin sumber daya alam. Hal ini menyebabkan ketergantungan antar negara yang dapat menimbulkan masalah hubungan internasional yang kompleks. Apabila kebutuhan suatu negara tidak terpenuhi, maka negara tersebut dengan berbagai cara akan berupaya untuk memenuhinya, sehingga hal ini memicu timbulnya masalah ekonomi, politik, sosial, budaya dan Hankam.

Negara Indonesia memiliki berbagai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan-bahan galian, mineral, flora, fauna, maupun bahan-bahan galian industri di samping sumber-sumber alam lainnya. Oleh karena itu kekayaan alam sebagai kekuatan nasional harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan demi menunjang pembangunan nasional. Bentuk sumber daya alam ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, sehingga diperlukan manajemen pengelolaan SDA yang berdasarkan:

- a. Maksimal, yang artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- b. Lestari, yakni pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam.
- c. Berdaya saing, yang berarti hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor kekayaan alam apabila dikelola dengan baik, dapat meningkatkan ketahanan nasional. Namun jika tidak dapat mengelolanya akan mengganggu ketahanan nasional.

3. Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Manusia adalah faktor penentu dalam melakukan suatu tindakan, dengan demikian manusia menentukan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Dalam arti bahwa pengusahaan penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan dan keamanan tergantung pada kemampuan atau kualitas manusia.

Masalah yang terkait dengan kemampuan penduduk adalah:

- a. Jumlah penduduk yang berubah karena fertilitas, mortalitas dan migrasi.

- b. Komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur, dan jenis kelamin.
- c. Persebaran penduduk yang berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja untuk mengelola kekayaan alam, dan berpengaruh terhadap personal yang mampu mengelola Hankam.

Oleh karena itu perlu penyebaran penduduk merata, agar dapat menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan. Segi positif dari pertumbuhan penduduk adalah penambahan angkatan kerja (*manpower*) yang berarti bertambahnya tenaga kerja (*labour force*). Keadaan ini dapat dimanfaatkan sebagai potensi dasar untuk peningkatan kapasitas produksi. Namun hal ini juga harus disertai dengan bertambahnya kesempatan kerja.

Persoalan yang kini sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah tingginya jumlah tenaga kerja tidak selaras dengan berkualitas yang dimiliki. Hal ini diperkuat dengan adanya data *World Population Review 2022*, nilai rata-rata IQ (*Intelligence Quotient*) penduduk di Indonesia adalah 78,49. Skor itu menempatkan Indonesia di posisi ke-130 dari total 199 negara yang diuji. Nilai ini termasuk rendah di bawah nilai rata-rata normal. Nilai IQ ini erat kaitannya dengan sistem pendidikan yang membuahkan kecerdasan masyarakat.⁶⁴ Seperti yang disampaikan oleh *Milk Creek of Magee* pada situs miliknya bahwa, rendahnya IQ memiliki berbagai dampak, seperti sulit untuk mengingat sesuatu, kesulitan dalam memecahkan masalah, dan kesulitan belajar di sekolah. Hal ini tentu saja akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia suatu negara.

Selain itu beberapa penelitian juga menggunakan peringkat pendidikan (skor PISA) sebagai dasar perbandingan kecerdasan penduduk. Tak ubahnya dengan nilai rata-rata IQ, skor PISA Indonesia juga memprihatinkan. Bahkan tidak mencapai skor rata-rata negara OECD (*The Organization for Economic Co-operation and Development*). OECD merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam upaya membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, kesempatan, serta kesejahteraan bagi semua pihak.

PISA merupakan sebuah inisiatif global yang melibatkan berbagai negara, untuk mengukur dan membandingkan kualitas pendidikan siswa di tingkat internasional. Tujuan utama PISA adalah untuk mengukur pencapaian akademis, dan memberikan gambaran holistik tentang kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di masing-masing negara yang terlibat. PISA juga menjadi sebuah alat evaluasi yang dapat memberikan pemahaman mendalam kepada para pendidik dan pembuat kebijakan, mengenai efektivitas sistem pendidikan yang telah mereka jalankan selama 4 tahun.

Dan hasil penelitian *Program for International Student Assessment (PISA) 2022*, beberapa saat yang lalu diumumkan pada tanggal 5 Desember 2023, dan Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor; matematika (379), sains (398), dan membaca (371). Hasil rata-rata tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 dalam bidang matematika, membaca, dan sains. Capaian secara keseluruhan, hasil tahun 2022 termasuk yang terendah yang pernah diukur oleh PISA di ketiga mata pelajaran. Tahun 2022 ini diikuti oleh 81 negara (37 negara OECD dan 44 negara mitra), dengan hasil Indonesia sebagai berikut (sumber Kompas.com):⁶⁵

⁶⁴ Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/01/120500365/iq-rata-rata-orang-indonesia-peringkat-130-dunia-bagaimana-sebenarnya, 2022>

⁶⁵ <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/06/163000865/skor-pisa-indonesia-2022-turun-tapi-peringkat-naik-ini-alasannya>

- a. Nilai matematika
 - 1) Nilai pada tahun 2018: skor 379
 - 2) Nilai pada tahun 2022: skor 366
 - 3) Indonesia berada pada peringkat 70 dari 81 negara
- b. Nilai kemampuan membaca
 - 1) Nilai pada tahun 2018: skor 371
 - 2) Nilai pada tahun 2022: skor 359
 - 3) Indonesia pada peringkat 71 dari 81 peserta
- c. Nilai Kemampuan Sains
 - 1) Nilai pada tahun 2018: skor 389
 - 2) Nilai pada tahun 2022: skor 383
 - 3) Indonesia berada di peringkat 67 dari 81 negara

Hasil capaian IQ dan PISA di Indonesia merupakan salah satu indikator kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya faktor lingkungan, seperti nutrisi/gizi, kondisi sosial ekonomi, stres, dukungan dan perilaku sosial selain masalah genetika, sangat memengaruhi skor IQ. Para peneliti juga menemukan bahwa kualitas pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya skor yang diperoleh seseorang.

SDM merupakan aset penting dalam upaya meningkatkan daya saing yang semakin ketat. Kenyataan ini menuntut program pembinaan SDM yang lebih komperhensif dan holistik. Oleh karena itu pengembangan SDM harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi globalisasi. Dalam era global terutama sektor ekonomi akan terjadi perang harga, kualitas dan pelayanan tanpa batas negara, termasuk bidang tenaga kerja. Tenaga kerja inilah yang menjadi sarana untuk menghasilkan nilai kompetitif dengan produktivitasnya menghasilkan barang jasa berkualitas, inovatif dengan keterampilan (*skill*), pengetahuan serta kemampuan dalam memberikan pelayanan prima dengan sikapnya. Dengan demikian SDM harus digarap secara serius agar memiliki daya saing.

Pertumbuhan penduduk yang cepat bila tidak disertai dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menimbulkan pengangguran. Pengangguran yang tinggi yang diakibatkan karena kualitas SDM yang rendah dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi dan hankam. Pertumbuhan penduduk yang tidak disertai kualitas sumber daya manusia akan mengakibatkan ketimpangan sosial ekonomi, akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu diperlukan campur tangan pemerintah untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan, penyebaran penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang seimbang dapat meningkatkan ketahanan nasional.

D. Aspek Pancagatra

1. Aspek Ideologi

Pengertian ideologi diartikan sebagai (*guiding of principles*) yang dijadikan dasar atau pemberi arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa (negara). Ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang dasar atau dapat disamakan dengan cita-cita.

Dengan lain perkataan bahwa ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata (Endang Zaelani Sukaya, 200: 105). Sesuai dengan kompleksitas kehidupan manusia maka ideologi menjabarkan diri ke dalam sistem nilai. Sistem nilai adalah serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Faktor yang memengaruhi ketahanan ideologi adalah nilai dan sistem nilai.

Ideologi yang baik harus mampu menampung aspirasi masyarakat baik secara individu dan sebagai makhluk sosial. Agar dapat mencapai ketahanan nasional di bidang ideologi dibutuhkan penghayatan dan pengamalan ideologi secara sungguh-sungguh dan konsisten. Agar bangsa Indonesia memiliki ketahanan di bidang ideologi, maka Pancasila harus dijadikan pandangan hidup bangsa, dan diperlukan pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif. Semakin tinggi kesadaran masyarakat suatu bangsa untuk melaksanakan ideologi, maka akan semakin tinggi ketahanan di bidang ideologi.

Pancasila juga merupakan cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Secara luas, dapat diartikan makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta nilai keadilan, seperti termuat dalam Pancasila.

Dalam strategi pembinaan ideologi ada beberapa prinsip antara lain:

- a. Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan dan oleh WNI.
- b. Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI.
- c. Ideologi harus dijadikan panglima bukan sebaliknya (Abdulkadir Besar, 1988).
- d. Akutualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan.
- e. Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa, dan dijadikan alat mensejahterakan, mempersatukan masyarakat.
- f. Kalangan elit eksekutif, legeslatif, yudikatif, harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN, mengedepankan kepentingan bangsa.
- g. Mensosialisasikan idologi Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, berkeadilan. Proses sosialisasi Pancasila secara obyektif, ilmiah bukan doktriner, dengan metode sesuai dengan perkembangan zaman.
- h. Tumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Perlunya perbaikan ekonomi untuk mengakhiri krisis multidimensional (Endang Zaelani Sukaya, 2000: 109).

2. Politik

a. Pengertian Politik

Dalam hal ini diartikan sebagai asas, haluan, kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Oleh karena itu masalah politik sering dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada di tangan pemerintah.

Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor:

- 1) Sektor masyarakat yang berfungsi memberikan masukan (*input*), terwujud dalam pernyataan keinginan dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

- 2) Sektor pemerintahan berfungsi sebagai keluaran (*output*) yang berupa kebijaksanaan dan melahirkan peraturan perundang-undangan, yang merupakan keputusan politik.

Sistem politik menentukan kehidupan politik dan dilaksanakan sebagai cerminan dari interaksi antara masukan dan keluaran. Keseimbangan antara masukan dan keluaran selalu berubah-ubah secara dinamis sesuai dengan tingkat stabilitas nasional. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara masukan dan keluaran berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila, di mana dalam penyelenggaraannya diatur sebagai berikut:

- 1) Kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan kebebasan harus melekat pada kepentingan bersama.
- 2) Tidak akan terjadi “dominasi mayoritas” sebab tidak selaras dengan semangat kekeluargaan yang mengutamakan musyawarah untuk memperoleh mufakat.

b. Ketahanan Politik Dalam Negeri

Dalam rangka mewujudkan ketahanan politik, diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat, dinamis, mampu memelihara stabilitas politik berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945 yang menyangkut:

- 1) Sistem pemerintahan berdasarkan hokum, tidak berdasarkan kekuasaan bersifat absolut, dan kedaulatan di tangan rakyat.
- 2) Dalam kehidupan politik dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut bukan menyangkut nilai dasar, sehingga tidak antagonis yang menjurus ke arah konflik.
- 3) Kepemimpinan nasional diharapkan mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila.
- 4) Terjalin komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, antara kelompok kepentingan dan golongan-golongan untuk mewujudkan tujuan nasional.

c. Ketahanan Aspek Politik Luar Negeri

- 1) Hubungan politik luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerja sama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan, dan meningkatkan citra politik Indonesia dan memantapkan persatuan dan kesatuan.
- 2) Politik luar negeri dikembangkan berdasarkan skala prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerja sama antar negara berkembang dan negara maju, sesuai dengan kepentingan nasional. Kerja sama antara negara ASEAN dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya, iptek dan kerja sama dengan negara non-blok.
- 3) Citra positif bangsa Indonesia perlu ditingkatkan melalui promosi, diplomasi, dan lobi internasional, pertukaran pemuda dan kegiatan olahraga.
- 4) Perjuangan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kepentingan nasional seperti melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain, dan hak WNI di luar negeri perlu ditingkatkan (Sumarsono, 2000: 116).

3. Aspek Ekonomi

Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi (SDA, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen) dan distribusi barang serta jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang serta jasa secara merata ke seluruh wilayah negara, ketahanan di bidang ekonomi sangat erat sekali dengan ketahanan nasional.

Tekat bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam pembangunan nasional. Oleh karena pembangunan tidak dapat dilakukan menyeluruh dalam waktu bersamaan, maka diperlukan pembangunan yang menitik beratkan di bidang ekonomi dengan tidak mengabaikan bidang-bidang lainnya. Dalam pembangunan ekonomi meningkatkan pendapatan nasional, namun harus menjamin pemerataan dan keadilan. Hal ini berarti harus mencegah semakin lebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dampak pelaksanaan pembangunan ekonomi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan perluasan lapangan kerja.

Dalam usaha mewujudkan ketahanan ekonomi bangsa diperlukan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, dan mampu menciptakan kemandirian dengan daya saing tinggi serta muaranya untuk kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Pembangunan diharapkan memantapkan ketahanan ekonomi, melalui iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan iptek, tersedianya barang dan jasa dan meningkatkan daya saing dalam lingkup perekonomian global.

Agar dapat terciptanya ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya pembinaan terhadap berbagai hal yang menunjang antara lain:

- a. Sistem ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa.
- b. Ekonomi kerakyatan harus menghindari:
 - 1) *free fight lieberalism* yang menguntungkan pelaku ekonomi kuat.
 - 2) sistem etatisme di mana negara beserta aparaturnya bersifat dominan serta mematikan potensi daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
 - 3) tidak dibenarkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang bertentangan cita-cita keadilan.
- c. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan, keterpaduan antar sektor pertanian, industri dan jasa.
- d. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan, serta mendorong peran masyarakat secara aktif. Perlu diusahakan kemitraan antara pelaku ekonomi dalam wadah kegiatan antara Pemerintah, BUMN, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Sektor Informal untuk mewujudkan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi.
- e. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus senantiasa dilaksanakan melalui keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah dan sektor.
- f. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya nasional memakai sarana Ipteks dalam menghadapi setiap permasalahan serta tetap memperhatikan kesempatan kerja (Sumarsono, 2000: 120).

Perlu disadari ada dampak dari hubungan antara Negara Utara dan Negara Selatan. Negara Utara diwakili negara-negara maju, sedangkan Negara Selatan diwakili negara-negara berkembang cenderung terjadi hubungan yang timpang. Negara maju (Utara) sekarang disebut sebagai negara-negara paling maju secara ekonomi (negara paling maju secara ekonomi / MEDCs). Sementara negara-Negara Selatan atau negara berkembang disebut sebagai negara yang ekonominya kurang berkembang (*Less Economicly Developed Countries/LEDCs*). Negara-negara Selatan memiliki keterbatasan dalam kemajuan teknologi, tetapi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Negara Utara akan mengimpor bahan mentah dari Negara Selatan, kemudian dengan teknologi yang mereka miliki, diolah menjadi barang jadi dan kembali dijual ke Negara Selatan dan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Bahan-bahan baku milik Negara Selatan atau negara berkembang cenderung dibeli dengan harga sangat murah. Jadi Negara Selatan cenderung dieksploitasi oleh negara maju dan selalu di pihak yang kalah dalam posisi tawar.

Adapun pokok persoalan dalam kerja sama Utara-Selatan adalah upaya perubahan dalam tata hubungan dunia baru yang lebih adil. Hubungan tersebut harus berubah dari bentuk pemerasan oleh Utara ke bentuk pembagian keuntungan bersama. Dalam membangun kekuatan perekonomian dunia, hubungan kerja sama antara negara-negara Utara-Selatan dilakukan dengan cara berikut:

- a. Negara Utara menanamkan modalnya ke Negara Selatan, seperti dalam bentuk pendirian perusahaan-perusahaan asing. Dengan kerja sama tersebut, keuntungan dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Biasanya negara penerima modal akan mendapat keuntungan dari penerimaan pajak pembangunan dan pembagian keuntungan dari hasil produksi, sedangkan negara pemberi modal dapat terpenuhi kebutuhan nasionalnya.
- b. Pada umumnya, Negara-negara Utara maju dalam teknologi, tetapi memiliki keterbatasan pada sumber daya alam. Negara-negara Selatan terbatas dalam kemajuan teknologi, tetapi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Negara Utara akan mengimpor bahan mentah dari Negara Selatan, kemudian dengan teknologi diolah menjadi barang jadi dan dijual kembali ke Negara Selatan dan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
- c. Bentuk kerja sama yang lain adalah dalam bentuk pinjaman modal dari Negara Utara ke Negara Selatan yang digunakan untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri. Hubungan antara negara-negara Utara-Selatan berpotensi menjadi hubungan saling ketergantungan yang tidak sehat, seperti pemberian pinjaman yang mengikat (dengan bunga yang tinggi) dan eksploitasi terhadap tenaga kerja dengan menekan upah buruh. Namun, dengan bergabung dalam organisasi-organisasi internasional (seperti GNB dan gerakan kelompok 77), Negara-negara Selatan tetap memiliki posisi tawar sehingga tidak mudah dieksploitasi oleh Negara-negara Utara.

Perlu diwaspadai *New Neokolonialisme* baru, seperti diungkapkan Presiden Sukarno dan dikutip oleh Mubyarto "*Colonialism has also its modern dress in the form of economic control, intellectual control, (and) actual physical control by a small but alien community with a nation*" (Kolonialisme juga mempunyai pakaian yang baru dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektual, (dan) penguasaan fisik oleh sekelompok kecil masyarakat dalam lingkup bangsa (sendiri) tetapi terasing.

Lima puluh tahun kemudian ramalan Bung Karno ternyata terbukti, 26 Februari 2005, 3 hari menjelang pemerintah menaikkan harga BBM, 36 cendekiawan yang digiring Freedom Institute memasang iklan 1 halaman penuh mendukung kenaikan harga BBM. Cendekiawan itu menggunkan alasan ilmiah “hasil penelitian”, yang segera dibantah oleh penelitian lain sebagai hasil yang keliru. Hal ini berarti bahwa 36 cendekiawan “*Freedom Institute*” telah mengorbankan kepentingan rakyat demi kepentingan ekonomi asing yang tak henti-hentinya menguasai ekonomi Indonesia. Inilah kolonialisme dengan baju baru, yang justru diwakili oleh cendekiawan bangsa. Cendekiawan ini telah terasing dari bangsanya sendiri.

Kondisi ekonomi dan politik sekarang khususnya Asia dan Afrika dikuasai oleh paham “*Corporatocracy*”, paham penguasaan dunia melalui kegiatan-kegiatan korporat (usaha-usaha korporat kuat antar negara peserta KAA).

4. Aspek Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG baik yang datang dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi sosial budaya manusia yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun bersatu, berkualitas, maju dan sejahtera, dalam kehidupan selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal budaya asing yang tidak sesuai budaya nasional. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya, dengan demikian ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Sumarsono, 2000: 124). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan diwujudkan sebagai aturan tuntutan sikap dan tingkah laku bangsa dan akan memberikan landasan, semangat, jiwa secara khas yang merupakan ciri pada elemen-elemen sosial budaya bangsa Indonesia.

Dalam negara berkembang, ada fenomena perubahan sosial yang disebabkan adanya faktor-faktor fisik geografis, biologis, teknologis dan kultural, terutama faktor teknologis kultural memegang peranan penting untuk perubahan sosial.

Dari faktor di atas yang memegang peranan penting adalah faktor teknologi dan kebudayaan. Hal ini disebabkan karena perubahan di bidang teknologi dan kebudayaan berjalan sangat cepat. Perlu diketahui bahwa perubahan sosial budaya disebabkan oleh faktor yang datangnya dari luar dan dari dalam, dan faktor dari luar biasanya jauh lebih dominan. Oleh karena itu faktor dari luar perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk dapat memahami perubahan sosial perlu dipelajari bagaimana perubahan itu diterima oleh masyarakat. Apabila hal ini dihubungkan dengan ketahanan sosial budaya, maka pengaruh budaya seperti budaya konsumtif, hedonisme, pornografi, seks bebas, kejahatan dunia maya, sendikat narkoba dapat membahayakan kelangsungan hidup dalam bidang budaya nasional.

Disadari atau tidak pengaruh budaya luar pasti sulit ditolak, namun hal yang perlu diwaspadai adalah pengaruh dampak negatif yang mungkin akan terjadi yang dapat membahayakan kepribadian bangsa. Tidak menutup kemungkinan bahwa pihak luar sengaja menyebarkan

pengaruhnya melalui sarana teknologi komunikasi yang akan menguntungkan bagi negaranya. Terhadap pengaruh semacam ini bangsa Indonesia harus waspada dan memiliki daya tahan untuk menanggulangnya.

Dengan demikian persoalan yang harus dipecahkan adalah bagaimana caranya mengarahkan perubahan sosial, mengingat bahwa pengaruh kebudayaan asing tidak dapat dicegah sehingga tidak merusak kehidupan masyarakat dan kepribadian bangsa Indonesia. Mengenai perubahan sosial, Lukman Sutrisno pernah menawarkan adanya *Social Engineering* yaitu konsep mesin sosial yang sangat berguna untuk meminimalisasi akibat terjadinya perubahan sosial. Oleh karena perubahan sosial pasti terjadi seperti akibat adanya globalisasi, pasar bebas, modernisasi, revolusi transportasi, revolusi komunikasi.

Dalam usaha meningkatkan ketahanan sosial budaya perlu disosialisasikan pengembangan budaya lokal, mengembangkan kehidupan beragama yang serasi, meningkatkan pendidikan kepramukaan yang mencintai budaya nusantara, dan menolak budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Mengenai budaya yang harus dipertahankan adalah menjaga harmoni dalam kehidupan sebagai nilai esensi manusia; menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan alam, sesama manusia (masyarakat), Tuhan dan keseimbangan lahir, batin (fisik dan mental spiritual).

Faktor di atas bila dihubungkan dengan ketahanan budaya, maka pengaruh budaya luar yang negatif dapat membahayakan kelangsungan hidup budaya nasional. Untuk mencegahnya diperlukan “filter” di mana unsur-unsur tradisi bangsa, pendidikan nasional, kepribadian nasional, memegang peranan penting dalam menepis ancaman tersebut.

Dalam pembangunan di bidang ekonomi faktor non ekonomis dapat mempercepat pembangunan yang harus dikembangkan. Menurut para ahli faktor non ekonomis itu mencakup: demografis, struktur masyarakat, dan mental. Pembahasan sosial-budaya secara sempit, maka faktor yang relevan adalah struktur masyarakat dan mental. Masyarakat Indonesia dapat dibagi baik secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal dapat menghasilkan golongan sosial seperti golongan tani, buruh dan pegawai, sedang secara horisontal disebut stratifikasi sosial yang menghasilkan lapisan bawah (pedesaan), menengah dan tinggi.

Pada masyarakat Eropa Barat ketika terjadi “revolusi industri”, yang diawali dengan “revolusi hijau” peranan kelas menengah sangat dominan untuk melakukan modernisasi sehingga menghasilkan masyarakat Eropa yang maju.

Faktor mental bangsa sangat memengaruhi keberhasilan pembangunan. Menurut Koentjaraningrat, ciri mental manusia Indonesia dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Ciri mental asli (ciri mental petani)
- b. Ciri mental yang berkembang sejak zaman penjajahan (ciri mental priyayi)
- c. Ciri mental yang berkembang sejak Perang Dunia II

Mentalitas bangsa Indonesia belum memiliki mentalitas yang cocok untuk pembangunan. Oleh karena itu tiga ciri mentalitas di atas harus ditinggalkan dan diganti ciri mental baru yang dikemukakan oleh J. Tinbergen. Bangsa yang ingin maju harus memiliki sifat-sifat:

- a. Menaruh perhatian besar dan menilai tinggi benda materi
- b. Menilai tinggi teknologi dan berusaha untuk menguasainya

- c. Berorientasi ke masa depan yang lebih cerah
- d. Berani mengambil risiko
- e. Mempunyai jiwa yang tabah dalam usaha
- f. Mampu bekerja sama dengan sesamanya secara berdisiplin dan bertanggung jawab

Dengan memperhatikan kedua penjelasan mental/sifat tersebut, maka dapat disimpulkan jika bangsa Indonesia ingin maju, maka ciri mental yang lama harus ditinggalkan dan diganti dengan ciri mental yang cocok namun tetap memiliki kepribadian bangsa (Lemhanas, 1988: 101).

Mengenai hakikat hidup ini, Koentjaraningrat berpendapat bahwa nilai yang paling cocok dalam pembangunan adalah nilai yang memandang aktif terhadap hidup. Sedang mengenai hakikat karya ada yang bertujuan bahwa karya untuk hidup, karya untuk mencapai kehidupan, dan karya untuk menghasilkan karya lebih banyak lagi.

Menurut Frans Magnis Suseno (1978) bangsa Indonesia telah memiliki etos kerja yang baik; kerja keras, efisien, mengembangkan prestasi, rajin, rapi, sederhana, jujur, menggunakan rasio dalam mengambil keputusan dan tindakan, bersedia melakukan perubahan, dapat melakukan setiap kesempatan, bekerja mandiri, percaya pada kekuatan sendiri mau bekerja sama yang saling menguntungkan.

Namun etos kerja di atas hanya dimiliki oleh kalangan elit saja. Kurang berkembangnya potensi yang sesuai dengan mental pembangunan yang bermuara pada etos kerja itu dikarenakan pekerjaan mereka belum mendapatkan imbalan yang sepatutnya, kurangnya penghargaan dan kesempatan untuk maju. Apabila manusia dihargai semestinya, mereka akan bekerja dengan rajin, teliti, setia dan inovatif.

Dalam usaha mengadakan perombakan mental bangsa, pendidikan memegang peran penting. Oleh karena fungsi pendidikan bersifat mengubah secara tertib ke arah tujuan yang dikehendaki. Mendidik dalam arti luas adalah mendewasakan manusia agar dapat berpartisipasi penuh dan mengembangkan bakatnya menumbuhkan kehidupan sosial sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu diperlukan sistem pendidikan yang mampu membawa masyarakat ke tujuan nasionalnya.

Menurut Ahmad Syafii Maarif Guru Besar Filsafat Sejarah UNY (2004), pendidikan yang diperlukan bangsa Indonesia adalah peningkatan moralitas bangsa. Hal ini diungkapkan karena Indonesia mengalami bencana krisis moral dalam bidang ekonomi yang mengancam kepentingan hidup orang banyak. Krisis ini semakin dahsyat tidak hanya akibat depresi ekonomi. Wabah korupsi yang sudah demikian kronis akan berakibat kehancuran dan kebangkrutan negara. Dengan demikian harus sesegera mungkin mengingatkan dan menyadarkan para pejabat dari budaya korup. Akibat dari krisis moral adalah budaya rakus, mereka akan menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk mengikuti nafsu hewani, demi tujuan yang diinginkan.

Dalam usaha untuk mengatasi budaya KKN diperlukan kesabaran yang tinggi, tanpa kesabaran tidak mungkin ada penyembuhan. Kombinasi tiga unsur yaitu: ilmu, amal dan sabar, hal inilah yang dapat menghapus sifat manusia. Tugas untuk pencerahan dan pencerdasan moral adalah tanggung jawab Depdikbud, Depag, elit politik, dan setiap WNI, karena pendidikan yang langsung ditatap, diserap, ditiru dan selanjutnya kita tidak boleh menyerah pada kepengapan dan kebobrokan (A Syafii Maarif, 2004: 3). Pembaruan di bidang pendidikan didasarkan pada falsafah negara Pancasila, dan diarahkan untuk membentuk manusia seutuhnya yang

berkesadaran dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Dalam hal ini perlu dikembangkan sistem pendidikan yang cocok untuk keperluan pembangunan. Dan sistem pendidikan yang dimaksudkan harus dapat menghasilkan tenaga pembangunan yang terampil, menguasai IPTEKS, sekaligus memiliki pandangan hidup berdasarkan Pancasila serta kuat jasmani dan rohani.

Dalam era reformasi, bangsa kita kurang memperhatikan ketahanan di bidang sosial budaya. Hal ini dapat dilihat adanya penafsiran keliru terhadap kebebasan yang justru mengakibatkan konflik berbau SARA yang dahulu dikritik oleh ORBA dan LSM. Dalam ketahanan di bidang budaya harus diingat bahwa demokrasi harus menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya di bidang politik saja, melainkan bidang ekonomi, budaya dan agama. Oleh karena itu sudah saatnya kalangan intelektual kampus mengembangkan ketahanan nasional bukan hanya untuk kepentingan kekuasaan, sekelompok penguasa, namun untuk kepentingan keamanan dan kesejahteraan seluruh bangsa agar dapat hidup aman dan damai yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

5. Aspek Pertahanan dan Keamanan

a. Pengertian

Ketahanan Pertahanan dan Keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang datang dari luar dan dalam, yang langsung dan tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud ketahanan di bidang keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman (Sumarsono, 2000: 125).

Dengan demikian ketahanan di bidang keamanan adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara atau suatu perjuangan rakyat semesta; di mana seluruh kekuatan IPOLEKSOSBUD-HANKAM disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terkoordinasi, untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Ketahanan Nasional, menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, perang merupakan pilihan terakhir untuk mempertahankan NKRI dan integrasi nasional.
- 2) Pertahanan Keamanan dilandasi landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan visional Wawasan Nusantara. Pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban bangsa Indonesia untuk mewujudkannya.
- 3) Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Setiap WNI wajib ikut bela negara, dilakukan dengan

kesadaran dan tanggung jawab rela berkorban, mengabdikan kepada bangsa-negara, pantang menyerah. Upaya pertahanan dan keamanan negara yang melibatkan kekuatan nasional dirumuskan dalam doktrin pertahanan dan keamanan NKRI.

- 4) Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan Sishankamnas (Sishankamrata). Hal ini bersifat total, kerakyatan, kewilayahan. Pendayagunaan dalam mengelola pertahanan dan keamanan dilakukan secara optimal, terkoordinasi untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan negara dalam keseimbangan, keserasian, antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan.
- 5) Segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, diorganisasikan ke dalam TNI dan Polri. Pembangunan APRI yang jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional. Perannya tetap diabdikan untuk kepentingan bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI (Sumarsono, 2000: 127).

b. Postur Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan gelar kekuatan. Dalam membangun kekuatan Hankam terdapat empat pendekatan yaitu pendekatan ancaman, misi, kewilayahan, dan politik. Pada konteks ini perlu ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara masalah keamanan dan pertahanan. Pertahanan diserahkan kepada TNI, sedangkan keamanan dalam negeri diserahkan kepada POLRI. TNI dapat dilibatkan untuk menangani masalah dalam negeri jika POLRI tidak mampu karena eskalasi ancaman yang meningkat ke keadaan darurat.

Pembangunan kekuatan Hankam harus mengacu kepada konsep Wawasan Nusantara, di mana Hankam diarahkan untuk seluruh wilayah RI di samping kekuatan Hankam harus mampu mengantisipasi prediksi ancaman dari luar sejalan dengan kemajuan IPTEK militer, yang menghasilkan daya gempur jarak jauh. Hakikat ancaman, rumusan hakikat ancaman akan memengaruhi kebijakan dan strategi kekuatan Hankam. Kesalahan dalam merumuskan hakikat ancaman akan mengakibatkan postur kekuatan tidak efektif dalam menghadapi gejolak dalam negeri. Dalam merumuskan hakikat ancaman perlu pertimbangan konstelasi geografi dan kemajuan IPTEK. Musuh (ancaman) yang datang dari luar akan menggunakan sarana laut, udara, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan Hankam secara proporsional dan seimbang antara AD, AL, dan AU serta keamanan POLRI. Pesatnya kemajuan IPTEK perlu diantisipasi dan diwaspadai serangan langsung lewat udara oleh kekuatan asing yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Sebagai contoh isu-isu yang akan dilakukan Australia akan membangun pangkalan peluncuran satelit di Pulau Christmas sebelah selatan Pulau Jawa yang berjarak kurang 500 km, hal ini merupakan serangan potensial untuk meluncurkan rudal jarak menengah guna menghancurkan Kota Jakarta.

E. Gejolak dalam Negeri

Dalam masa globalisasi saat ini kondisi dalam negeri yang kacau dapat mengundang campur tangan asing. Intervensi pihak asing dapat beralih untuk menegakkan nilai-nilai HAM, demokratisasi, penegakan hukum, dan lingkungan hidup, namun semuanya itu dilakukan untuk kepentingan nasional mereka. Situasi kacau dapat terjadi jika unsur utama kekuatan Hankam

dan komponen bangsa tidak mampu mengatasi permasalahan dalam negeri. Oleh karena itu perlu diwaspadai hubungan antara kekuatan dalam negeri dan kemungkinan intervensi asing (Sumarsono, 2000: 129).

Dalam era sekarang telah terjadi pergeseran geopolitik ke arah geoekonomi, hal ini akan terjadi perubahan dalam penerapan kebijaksanaan dan strategi negara dalam mewujudkan kepentingan nasional. Penerapan secara baru dalam penerapan kebijakan akan meningkatkan eskalasi konflik regional dan konflik dalam negeri yang akan mendorong keterlibatan super power di dalamnya. Oleh karena itu perlu membangun postur kekuatan Hankam yang memiliki profesionalisme untuk melaksanakan:

1. Kegiatan intel strategis dalam semua aspek kehidupan nasional.
2. Melaksanakan pertahanan udara, darat dan laut.
3. Memelihara dan menegakkan keamanan dalam negeri.
4. Membina potensi kekuatan wilayah dalam semua aspek kehidupan untuk meningkatkan Ketahanan Nasional (TANNAS).
5. Memelihara stabilitas nasional menyeluruh dan berlanjut. Dalam usaha untuk melindungi diri sendiri dari ancaman luar dan dalam dengan anggaran sangat terbatas maka perlu dikembangkan kekuatan Hankam yang meliputi:
 - a. Perlawanan bersenjata terdiri dari bala nyata merupakan kekuatan TNI yang selalu siap dan dibina sebagai kekuatan cadangan dan bala potensial yang terdiri atas POLRI dan RATIH sebagai fungsi WANRA.
 - b. Perlawanan tidak bersenjata yang terdiri dari RATIH dengan fungsi TIBUM, LINRA, KAMRA, dan LINMAS.
 - c. Komponen pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata sesuai dengan bidang potensinya dengan pemanfaatan semua sumber daya nasional, sarana dan prasarana serta perlindungan masyarakat terhadap perang dan bencana lainnya. Dengan demikian ketahanan pertahanan dan keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa dilandasi kesadaran bela negara oleh seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan ketahanan yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mengamankan kedaulatan negara, menangkal segala bentuk ancaman.

F. Kapita Selektta Keamanan dalam Negeri

Kebijakan politik untuk mengamankan wilayah perbatasan belum seperti diharapkan, hal ini terbukti banyak wilayah yang tidak dirurus oleh Jakarta sehingga diklaim oleh negara tetangga seperti diungkapkan oleh Siswono (2005: 4) “Tahun-tahun ini kita dirisaukan oleh berita tentang rapuhnya batas-batas wilayah NKRI. Setelah Pulau Pasir di Wilayah Timor diakui milik Australia dan kita menerimanya, Sipadan dan Ligitan diputuskan Mahkamah Internasional menjadi milik Malaysia, tapal batas di Kalimantan digeser hingga 800 meter, pekerja pembuat mercusuar di Ambalat diintimidasi polisi perairan Malaysia. Lalu lintas batas yang bebas, nelayan-nelayan asing yang mencuri ikan hingga merapat ke pantai-pantai Sumatra (pulau-pulau Rondo di Aceh dan Sekatung di Riau). Semua itu menunjukkan betapa lemahnya negara kita dalam menjaga batas luar wilayah NKRI” (Kompas, 20 April 2005: 4).

Pada tahun 2002 terpampang di surat kabar kapal ikan asing yang meledak terbakar ditembak oleh kapal perang kita. Mengingat setiap hari ribuan kapal asing mencuri ikan di wilayah RI ada baiknya jika setiap bulan 10 kapal pencuri ikan ditembak meriam kapal patroli AL, agar jera. Jikalau yang terjadi penyelesaian damai di laut, maka pencurian ikan akan semakin hebat, dan penghormatan bangsa dan negara lain akan merosot.

Potensi disharmoni dengan negara tetangga adalah masalah perbatasan, tentu sangat tidak nyaman jika di perbatasan selalu menjadi permasalahan. Oleh karena itu perlu penegasan batas wilayah untuk dapat saling menghormati dan menjaga wilayah masing-masing negara. Suasana yang harmonis adalah salah satu kebutuhan hidup bertetangga dengan bangsa lain.

Kondisi di sepanjang perbatasan Kalimantan dengan kehidupan seberang perbatasan yang lebih makmur dapat mengurangi kebanggaan warga di perbatasan pada negara kita. Pulau-pulau di Kepulauan Riau yang ekonominya lebih berorientasi ke Singapura dengan menerima dolar Singapura sebagai alat pembayaran juga dapat merapuhkan rasa kebangsaan Indonesia pada para penghuni pulau tersebut. Perekonomian di Pulau Mianggas dan Pulau Marampit lebih berorientasi ke Filipina Selatan akan melemahkan semangat kebangsaan warganya.

Pengelolaan wilayah perbatasan perlu segera ditingkatkan dengan membentuk “Kementerian Perbatasan” yang mengelola kehidupan masyarakat perbatasan agar lebih makmur dan mendapat kemudahan agar dapat mengakses ke daerah lain di wilayah NKRI. Wilayah NKRI perlu dijaga dengan 12 penegasan secara de facto dengan menghadirkan penguasa lokal seperti lurah, camat seperti polisi dan tentara sebagai simbol kedaulatan negara. Meskipun memiliki ribuan pulau tetapi tidak boleh meremehkan eksistensi salah satu pulau atau perairan yang sekecil apapun pulau atau daratan, dan bila itu wilayah NKRI perlu dipertahankan dengan jiwa dan raga seluruh bangsa ini.

Masalah keamanan dalam negeri yang cukup pelik adalah menangani Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tidak kunjung selesai karena perbedaan pandangan seperti yang kami kutip dalam kalimat ini: “Persoalan yang menjadi masalah adalah terminologi *self-government* yang berbeda. Bagi bangsa Indonesia *self-government* adalah otonomi khusus yang cukup luas, tetapi bagi GAM adalah state. State yang dimaksudkan adalah provinsi dengan kewenangan luas, termasuk lagu kebangsaan, bendera, memiliki kewenangan pendidikan, pelabuhan, pariwisata, anggota DPR asal Aceh yang memiliki veto masalah Aceh” (Kompas, Minggu 17 April 2005).

Proposal ini cukup berat, sehingga sejak awal Menkominfo yang ikut aktif berunding menyatakan ada proposal GAM yang langsung disetujui dan ada yang perlu diubah dan ada yang tidak bisa diterima karena menyentuh konstitusi negara. Babak pembicaraan mengenai *self-government* inilah yang menjadi fokus pembicaraan maraton antara delegasi RI dengan delegasi GAM di Helsinki. Belajar mengenai perundingan di antara dua delegasi yang berunding memang harus bekerja keras, saling memperlihatkan *good faith* dan mendekatkan proposal masing-masing agar mendapatkan titik temu, sehingga tercipta perdamaian abadi di bumi Aceh.

Kasus Ambalat; bermula dengan lepasnya Timor Timur 1999, kemudian kekalahan diplomasi kita di Mahkamah Internasional dengan kasus Sipadan dan Ligitan, 2002 sehingga kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia. Lepasnya kedua pulau, Sipadan dan Ligitan dengan waktu relatif singkat membuat rakyat Indonesia menjadi trauma akan lepasnya blok Ambalat yang kaya minyak ke tangan Malaysia. Sengketa dua blok wilayah Malaysia dan Indonesia kembali memanas. Masing-masing mengklaim sebagai wilayah mereka. Malaysia memberi nama Wilayah

ND6 dan ND7 dan Indonesia memberi nama blok Ambalat dan Ambalat Timur (Rusman Ghazali, Kompas, 28 April 2005; 4).

Menurut Prof. Azmi Hasan, ahli strategi politik Malaysia, bantahan Indonesia sudah diantisipasi bahkan pemerintah Malaysia sudah menyiapkan segala bantahan sengketa Ambalat. Pemerintahan Malaysia tidak meragukan lagi kesahihan kepemilikan atas klaim ND6 dan ND7 sebagai bagian miliknya atas dasar peta pantas benua 1979. Malaysia melakukan bantahan atas konsesi eksplorasi minyak yang diberikan kepada perusahaan ENI dan Unicoal yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Bukan hanya itu, dalam tulisannya Prof. Azmi membuat kalkulasi atas kekuatan militer Indonesia jika harus berhadapan dengan kekuatan militer Malaysia. Bahwa TNI tidak berada dalam keadaan optimal akibat embargo militer AS sejak beberapa tahun yang lalu. Sebagai contoh hanya 40% jet tempur yang dimiliki TNI AU dapat digunakan, karena ketiadaan suku cadang untuk mengoperasikan kekuatan secara penuh. Jet Sukhoi yang dimiliki Indonesia hanya mempunyai kemampuan radar, tanpa dibantu kelengkapan persenjataan yang lebih canggih lainnya. Pendek kata bahwa dalam sengketa ini, kekuatan militer TNI juga telah diperhitungkan kekuatannya oleh para ahli strategi di Malaysia sebagai referensi pemerintah Malaysia dalam menentukan sikap terhadap sengketa di wilayah Ambalat (Rusman Gazali, 2005: 4).

G. Keberhasilan Ketahanan Nasional

Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nusantara. Dalam mewujudkan ketahanan nasional diperlukan kesadaran setiap warga Indonesia yaitu:

1. Memiliki semangat perjuangan non fisik berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ATHG baik yang datang dari luar dan dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
2. Sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam, sehingga setiap WNI baik individu maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut.

Oleh karena bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal tersebut tercermin dalam kesadaran bela negara dan cinta tanah air.

Apabila setiap WNI memiliki semangat juang, sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam masyarakat berbangsa dan bernegara serta mengeliminir pengaruh-pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia. Untuk mewujudkan Ketahanan Nasional diperlukan suatu kebijakan umum dan pengambil kebijakan yang disebut Polstranas (Sumarsono, 2000: 133)

H. Kedudukan dan Fungsi Konsepsi Ketahanan Nasional

1. Kedudukan Ketahanan Nasional

Konsepsi Ketahanan Nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideal dan konstitusional.

2. Fungsi Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya berfungsi sebagai Doktrin Dasar Nasional atau sebagai Metode Pembinaan Kehidupan Nasional dan sebagai pola dasar Pembangunan Nasional antara lain:

- a. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk memimpin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat inter regional (wilayah) inter sektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini diperlukan supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak. Salah satu alasan yang lain adalah apabila terjadi penyimpangan, maka akan terjadi pemborosan waktu, tenaga dan sarana yang berpotensi menjadi hambatan. Hal ini apabila dibiarkan akan dapat menyebabkan penyimpangan dalam mencapai tujuan nasional.
- b. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan, pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional di segala bidang secara terpadu dan dilakukan sesuai rencana program.
- c. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah (Sikaya Mampu) dan aspek sosial (IPOLEKSOSBUD-HANKAM) (Endang Zelani Sukaya, 2000: 74-75)

I. Hakikat Ketahanan Nasional

Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Penyelenggaraan Ketahanan Nasional dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan:

1. Kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan yang berbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil dan merata, baik rohaniah dan jasmaniah.
2. Keamanan adalah kemampuan dalam melindungi keberadaan bangsa, serta melindungi nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar.
3. Kedua pendekatan keamanan dan kesejahteraan telah digunakan bersama-sama. Pendekatan mana yang ditekankan tergantung pada kondisi dan situasi nasional dan internasional. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian evaluasi penyelenggaraan ketahanan nasional sekaligus memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa.

4. Konsep ketahanan dikembangkan berdasarkan konsep Wawasan Nusantara sehingga konsep ketahanan nasional dapat dipahami dengan baik apabila telah memahami Wawasan Nusantara. Dengan memiliki konsep ketahanan nasional, maka keluaran yang hendak dicapai adalah:
 - a. Dari segi ideologi mampu menetralsir pengaruh ideologi yang datang dari luar.
 - b. Dari segi politik mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sehingga mewujudkan sistem politik yang mampu menetralsir pengaruh negatif dari pengaruh lingkungan strategis yang dihadapi.
 - c. Dari segi ekonomi mampu mewujudkan segi ekonomi yang tidak mudah goyah oleh perkembangan-perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi.
 - d. Dari segi sosial budaya, mampu mewujudkan sosial budaya yang tidak mudah terpengaruh budaya negatif yang datang dari luar.
 - e. Dari segi pertahanan, keamanan mampu mewujudkan kekuatan pangkal dan penyangga, sehingga mampu mencegah keinginan pihak lain yang secara fisik berusaha mengganggu integrasi nasional bangsa Indonesia.
 - f. Dengan demikian diharapkan kekuatan nasional mampu melakukan tindakan-tindakan represif terhadap gangguan-gangguan yang terjadi.

Bab 4

Peradaban, Budaya dan Ketahanan Nasional

A. Komponen Budaya

Sistem budaya atau sistem kultural adalah kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Budaya menengahi interaksi antar aktor, menginteraksikan kepribadian, dan menyatukan sistem sosial. Budaya mempunyai kapasitas khusus untuk menjadi komponen sistem yang lain (Parsons dalam Ritzer, 2004: 129). Ritzer mengutip Parsons yang menegaskan bahwa budaya dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, teratur yang menjadi sasaran orientasi aktor, aspek-aspek sistem kepribadian yang sudah terinternalisasikan dan pola-pola yang sudah terlembagakan di dalam sistem sosial (Parsons dalam Ritzer, 2004: 129).

Ada tiga komponen budaya menurut Alex Thio (1992: 56) yaitu komponen kognitif, komponen normatif, dan komponen simbolik.

1. Komponen kognitif adalah salah satu komponen kebudayaan yang membantu manusia mengembangkan pengetahuan dan kepercayaan yang berlaku di sekitar kehidupan kita. Pengetahuan merupakan bagian dari sebuah komponen kognitif adalah sekumpulan ide dan fakta tentang dunia fisik dan dunia sosial kita yang secara relatif objektif, nyata, dan dapat dibuktikan. Pengetahuan dapat dikembangkan dalam teknologi, dan dapat digunakan untuk mengendalikan lingkungan alam dan berbagai masalah sosial. Pada kehidupan modern, standar yang tinggi dalam kehidupan dapat dilihat dari atribut-atribut pengetahuan, dan teknologi yang canggih.

Seperti yang telah dikaji oleh Lewis Mumford (dalam Alex Thio, 1992: 498) bahwa teknologi modern dimulai sejak tahun 1832 ketika ditemukannya turbin air yang disempurnakan sebagai hasil dari kajian ilmiah. Ilmu pengetahuan dan teknologi tergantung satu sama lain dan sangat melekat dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Contohnya, kini teknologi modern mengembangkan teknologi tingkat tinggi seperti penemuan *chips*, *laser*, *electron microscope*, dan semua teknologi canggih lainnya. Semua teknologi ini berpengaruh kepada kehidupan masyarakat karena teknologi ini digunakan untuk kepentingan ekonomi, keamanan, kesehatan, dan lain-lain.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dialami masyarakat di Indonesia seperti masalah sosial yang dihadapi Indonesia akibat tingginya kepadatan penduduk di Indonesia. Hal ini membuat cara pandang masyarakat kita berubah yaitu perlunya mengatur kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi (teknologi di bidang kedokteran), semboyan “banyak anak banyak rezeki” yang dianut keluarga-keluarga di Indonesia, telah memudar dan mulai menghilang. Bahkan kini banyak keluarga memutuskan *childfree* (tidak

memiliki anak). Alat kontrasepsi banyak digunakan pasutri (pasangan suami istri) dan hal ini mampu memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah sosial tersebut dan hal ini berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia terutama di tahun 1980-an.

2. Komponen normatif dari kebudayaan berkaitan dengan nilai dan norma karena kebudayaan juga membuat bagaimana manusia harus bertindak (Alex Thio, 1992:56). Nilai secara sosial meliputi apa yang dianggap baik, diharapkan, dan dianggap penting dalam masyarakat dan biasanya menjadi dasar terbentuknya norma dan aturan bagi tindakan orang-orang dalam masyarakat. Nilai sifatnya lebih umum (general) dari pada norma karena norma adalah aturan yang lebih spesifik yang digunakan orang untuk bertindak dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, mencuri, atau mengambil barang orang lain itu tidak baik, ini adalah sebuah nilai dan kemudian diderivasi dalam peraturan bahwa barang siapa yang mencuri akan dikenakan hukuman.

Contoh lain, misalnya nilai tentang kebebasan berpendapat di sebuah negara demokrasi yang kemudian membuat masyarakat bebas bertindak mengkritik pemerintah, namun hal ini diatur dalam aturan perundangan. Peraturan perundangan ini adalah norma nilai dan norma sangat bervariasi antara budaya yang satu dengan budaya lainnya karena subjektivitas dari masing-masing budaya masyarakat berbeda-beda. Misalnya, masyarakat di Amerika Serikat bila orang mendapat pujian “*Good Job*” (kerja yang bagus!) maka jawabannya adalah “*Thank You*”. Hal ini tidak sama dengan kebiasaan berbagai etnik pada masyarakat di Indonesia, bila orang Indonesia dipuji dengan perkataan “Pekerjaan Anda bagus sekali”, jawabannya “Ah sebenarnya saya masih belajar” atau “Ah, pekerjaan saya ini sebenarnya masih belum baik”, hal ini menunjukkan bahwa ada sebuah nilai bahwa bila dipuji, kita harus merendah hati.

Nilai dan norma juga dari suatu waktu ke waktu yang lain dapat berubah. Seperti halnya pada masyarakat di Amerika Serikat sekitar tahun 1950-an masih berlaku norma pemisahan ras di sekolah karena adanya nilai ketidaksetaraan ras (ras kulit putih dengan ras kulit hitam). Akan tetapi kini norma tersebut telah berubah, di sekolah diberlakukan norma integrasi yang merupakan perwujudan nilai kesetaraan ras.

3. Di Indonesia sendiri juga pernah mengalami perubahan nilai dan norma, seperti pada saat pemerintahan Hindia Belanda. Kala itu terdapat diskriminasi fasilitas pendidikan, bagi anak-anak Bumiputra memperoleh fasilitas yang berbeda dengan kelompok Timur Asing (Cina, India dan Arab) dan kelompok Eropa (Belanda dan Inggris). Kelompok Timur Asing dan kelompok Eropa memperoleh fasilitas yang lebih baik dibandingkan kelompok Bumiputra (Paulus Wirutomo, 2012: 61). Namun, semenjak kemerdekaan RI, nilai dan norma ini juga mengalami perubahan karena adanya upaya perjuangan dan perbaikan politik etis sehingga fasilitas pendidikan dapat dinikmati oleh golongan manapun.

Kata “Nilai” dalam bahasa Indonesia adalah “konsepsi tentang hal yang seharusnya diinginkan” hal ini berbeda dengan “hal yang diinginkan”. Nilai adalah sesuatu yang abstrak, yang dibangun dan berada di dalam pikiran serta akal budi, tidak dapat diraba dan dilihat dengan pancaindra (Amri Ramzali, 2007: 105).

Nilai pada hakikatnya dimaknai sebagai perilaku seseorang untuk bertindak sesuai dengan apa yang dianggap baik dalam masyarakat dan menjauhi tindakan yang dianggap buruk dalam masyarakat. Nilai merupakan bagian yang penting dalam kebudayaan karena

tindakan seseorang dapat diterima atau dianggap sah oleh masyarakat jika selaras dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat saat orang tersebut bertindak. Misalnya, ada nilai yang berlaku bahwa orang yang selalu beribadah mengindikasikan orang yang bermoral tinggi, sehingga, nilai ini akan selalu dijunjung tinggi dalam masyarakat. Nilai bukan hanya berlaku bagi orang perorangan, tetapi juga bagi kelompok, demikian pula negara Indonesia sebagai sebuah bangsa memiliki suatu nilai untuk mempersatukan kelompok yang berbeda-beda suku bangsa (etnis) yaitu nilai persatuan yang dikenal dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Semboyan ini memiliki nilai yang mengandung faktor pemersatu, seperti identitas bersama dan solidaritas bersama yang melekat pada beragamnya etnis pada masyarakat Indonesia. Jadi, perlu diingatkan kembali bahwa nilai itu bersifat abstrak karena nilai berupa pedoman perilaku yang dicita-citakan oleh masyarakat dan bersifat umum karena masyarakat selain mempunyai pedoman umum juga memiliki nilai sosial yang berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain tergantung kepada sistem budaya masyarakatnya.

Contoh lainnya, tentang pernikahan yang merupakan sebuah tindakan yang memiliki nilai tinggi. Pernikahan dinilai sebagai tahapan melepas masa lajang dan menghalalkan tindakan berhubungan suami istri. Sehingga biasanya masyarakat melarang untuk mencuri gadis dan melarikannya. Secara umum demikian norma yang berlaku. Namun berbeda dengan Suku Sasak yang memiliki adat yang disebut merariq yaitu suatu tindakan mencuri atau melarikan gadis sebagai bagian dari proses pernikahan. Sehingga, nilai dapat juga diartikan sebagai sebuah konsep yang hanya diketahui dan dipahami oleh masyarakat melalui ucapan, tulisan, dan perilaku orang atau sekelompok orang yang diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi.

Kita ketahui bersama bahwa sosialisasi pertama (*primary socialization*) adalah dalam keluarga. Hal ini dinyatakan oleh CH Cooley, bahwa kelompok primer adalah kelompok kecil seperti keluarga atau kelompok kerja. Pada kelompok primer akan membentuk norma-norma untuk bertindak dan melibatkan interaksi tatap muka di antara semua anggotanya (Jary dan Jary, 1991: 195). Contoh sederhana lainnya adalah nilai yang biasa disosialisasikan dalam keluarga Jawa (tradisional) adalah nilai urmat (hormat) kepada orang tua. Di mana orang yang lebih muda wajib hukumnya menghormati orang yang usianya lebih tua, salah satunya dengan cara saat berkomunikasi harus menggunakan bahasa kromo inggil (bahasa Jawa halus), demikian pula berlaku dalam keluarga-keluarga etnik yang lain, nilai selalu disosialisasikan. Nilai juga mengandung moralitas karena menjadi pedoman bagi orang dalam bertindak yang dianggap baik, patut, luhur di mata masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dianggap bermoral bila ia tunduk pada nilai moral yang berlaku pada masyarakatnya.

Emile Durkheim tokoh fungsionalis mengatakan bahwa nilai dan norma adalah fakta sosial yang memiliki karakteristik eksternal, memaksa dan berlaku umum. Arti dari eksternal adalah bahwa nilai dan norma berada di luar individu, sedangkan bersifat memaksa artinya nilai dan norma memaksa individu untuk bertindak, dan bersifat umum, dengan kata lain, nilai dan juga norma tidak hanya berlaku bagi satu individu saja tetapi seluruh anggota masyarakat secara umum. Tampak bahwa "fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir dan berperasaan yang memperlihatkan sifat patut dilihat sebagai sesuatu yang berada di luar kesadaran individu" (Johnson, 1986: 177).

Namun kenyataannya nilai tidak selamanya dipatuhi oleh anggota masyarakat karena tidak sedikit anggota masyarakat yang bertindak menyimpang dari nilai yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan penafsiran di antara anggota masyarakat tidak sama. Realitas ini dapat selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat manapun. Salah satu penyebab hal ini terjadi adalah karena sifat nilai yang abstrak tersebut, di samping tingkat pemahaman individu satu dengan yang lain juga berbeda.

Setelah kita memahami konsep nilai, maka kita akan mempelajari apa itu norma. Norma terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung terus menerus dalam kehidupan masyarakat bahkan tidak disadari oleh anggota masyarakat itu sendiri. Awal mula timbulnya norma sosial dimulai setelah anggota masyarakat merasakan manfaat dan sekaligus kerugian dari pola perilaku yang berkembang di dalam masyarakat. Sebagai contoh, pada masyarakat desa, pola perilaku mencuri hewan ternak seperti ayam, kambing, atau sapi, sangat merugikan bagi pemilik. Sehingga lahirlah norma baru yang mengatur tentang ini, bahwa barang siapa yang melakukan tindakan mencuri hewan ternak akan diberikan sanksi. Norma yang berkaitan dengan mencuri selalu ada pada masyarakat manapun, tidak hanya di desa, namun di kota-kota besar, dengan kasus berbeda, diberlakukannya norma yang sama dengan tujuan meminimalisir tindakan menyimpang demi terciptanya tertib sosial dan kehidupan harmonis di dalam bermasyarakat.

4. Komponen simbolik, adalah komponen yang sangat penting sebagai komponen kebudayaan. Karena komponen nilai dan norma tidak dapat eksis tanpa adanya simbol. Simbol dapat berupa bahasa, gestur, ataupun suara. Simbol dapat diciptakan, dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada generasi berikutnya. Melalui simbol kita dapat memiliki budaya dan di dalam proses sosial kita akan menjadi manusia seutuhnya. Simbol dalam bentuk bahasa adalah penggunaan rangkaian kata-kata yang digunakan anggota masyarakat saat berinteraksi dengan anggota masyarakat yang lain. Di Indonesia kita mengetahui dan mengenal berbagai bahasa daerah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai komunitas etnik yang ada. Jumlah bahasa daerah di Indonesia tepatnya adalah 746 bahasa yang tersebar dari Sabang, pulau We sampai Merauke, Papua (<http://bahasanusantara.blogspot.com/2010/02/746-jumlah-bahasadaerah>).

Selain, suara dan bahasa, kita mengenal juga gestur atau bahasa tubuh atau nonverbal *communication*. Bahasa tubuh seperti juga bahasa pada umumnya dikonstruksi secara sosial daripada secara biologis. Bahasa tubuh juga bervariasi sesuai dengan budaya yang ada pada masing-masing masyarakat karena memang ada perbedaan antara budaya di satu masyarakat dengan budaya di masyarakat lainnya. Sebagai contoh, bahasa tubuh bagi orang Jawa, jika seseorang di tanya “Apakah anda menerima bila dipilih menjadi ketua RT di sini?” Bila diam saja atau mengedipkan matanya maka dapat diartikan ‘menerima’. Hal ini berbeda dengan budaya masyarakat lain yang lebih terbuka dengan terus terang menjawab “ya, saya menerima” karena jika diam akan diartikan menolak.

Bahasa sebagai simbol sangat berpengaruh dalam dunia sosial (*social world*) mengingat bahasa lahir dari interaksi tatap muka (*face to face*). Bahasa adalah alat untuk mengekspresikan maksud hati, pikiran dan perasaan dari individu yang satu ke individu yang lain, melalui bahasa juga kita akan mengetahui perilaku seseorang dan karakteristik orang tersebut. Selain itu, bahasa juga dapat menunjukkan posisi atau status orang dalam sistem stratifikasi sosial.

B. Sosial Budaya dan Ketahanan Nasional

Aspek sosial budaya memiliki peran yang sangat penting dalam ketahanan nasional Indonesia. Sosial budaya merujuk pada aspek-aspek kehidupan sosial dan budaya yang hidup di dalam masyarakat. Aspek sosial umumnya mengenai struktur dan pola hubungan sosial di masyarakat. Sedangkan aspek budaya berarti kondisi kebudayaan dalam masyarakat.

Kehidupan sosial budaya masyarakat di Indonesia memiliki dasar Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti bahwa Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang tersebar di berbagai wilayah namun tetap memiliki satu kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung tinggi semboyan nasional ini, maka ketahanan nasional bisa lebih terjaga.

Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai keadaan dinamis kebudayaan nasional yang di dalamnya terdapat tekad kuat dan tindakan untuk mengembangkan kapasitas nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) baik dari dalam maupun luar negeri secara langsung maupun tidak langsung. AGHT yang ada bisa berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketahanan sosial merupakan proses perubahan sosial, ekonomi dan politik bagian dari proses yang dilalui komunitas dalam membangun. Menurut Justika Baharsyah, bentuk ketahanan masyarakat di masa depan adalah tercukupinya masyarakat terhadap dinamisnya layanan sosial, sensitif dan komprehensif, adanya sistem pengembangan sosial yang terbentuk sehingga individu-individu dapat otomatis menyesuaikan dengan cepat terhadap proses perubahan sosial.⁶⁶ Ketahanan sosial sebagai bagian untuk menciptakan kehidupan masyarakat toleran dan damai. Ketahanan sosial merupakan bagian dari kemampuan dalam rangka mengatasi dan beradaptasi dalam lingkungan masyarakat disaat menghadapi kesulitan atau masalah yang besar. Jika ketahanan kuat, maka kecenderungan lebih mudah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Kelompok komunitas harus mampu membangun partisipasi sebagai salah satu modal ketahanan sosial yang harus dimiliki oleh masyarakat. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan NKRI dan keselamatan segenap bangsa.

Usaha pertahanan negara itu dilakukan dengan mempertimbangkan adanya dinamika bentuk ancaman yang dihadapi, perkembangan lingkungan yang strategis senantiasa membawa perubahan kompleksitas ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman non militer. Bagian dari ancaman non militer itu terkait dengan budaya dan targetnya adalah kesadaran manusia. Perang budaya telah berlangsung diam-diam tanpa menimbulkan kegaduhan atau tanpa menarik perhatian, bahkan sangat lembut, sehingga pihak yang ditaklukkan tak merasa kalah, terkadang justru sangat menikmati dan merasa bangga.

Dalam perang kebudayaan, suatu negara berusaha memasukkan unsur-unsur budayanya kepada negeri yang diserangnya. Mereka menanamkan berbagai kepentingannya, ke dalam lubuk jiwa targetnya, secara perlahan. Dan dapat dipastikan ada keinginan dan kepentingan yang hendak diperoleh. Samuel Huntinton dalam bukunya *The Clash of Civilization* menjelaskan bahwa suatu saat akan datang masa di mana kebudayaan-kebudayaan yang satu dengan yang lain akan bersaing. Persaingan ini akan mengakibatkan benturan-benturan kebudayaan. Akibatnya

⁶⁶ Bahransyaf and Proboiswi, "Membangun Ketahanan Sosial Di Desa Serakapi: Sebuah Replikasi Model," hlm 226.

adalah munculnya kebudayaan pemenang, yang artinya kebudayaan lain yang mengalami kekalahan akan tersingkir bahkan terhapus dari muka bumi. Dengan kata lain perang kebudayaan menghasilkan negara pemenang yang akan menjajah bangsa lain dengan budayanya. Perang kebudayaan dilakukan berdasarkan dua pilar yang patut kita perhatikan secara seksama. Yaitu menggantikan budaya setempat dengan budaya asing, dengan melakukan serangan mengganti nilai-nilai penyangga budaya bangsa tersebut dengan berbagai cara dan sarana.

Berbagai media asing melancarkan propaganda secara terus menerus, menyerang nilai-nilai agama, kemanusiaan, pola pikir, dan nasionalisme. Serangan propaganda ini dilakukan dengan metode-metode yang sangat halus. Sehingga tidak mudah dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Media-media ini dalam berbagai film, drama cerita berseri, lagu-lagu, *fashion*, kuliner, berita, laporan, majalah, ditulis berdasarkan arahan oleh pihak asing, secara tidak langsung menyerang kebudayaan dan peradaban bangsa-bangsa lain. Dampaknya generasi bangsa tenggelam dalam budaya mereka, merasa *insecure* jika tidak mengikuti gaya hidup mereka, kurang yakin terhadap produk-produk dalam negeri, dan belum merasa hebat jika belum berkunjung ke negara-negara mereka. Secara tidak langsung membuat kita masuk keperangkap system mereka, bergantung kepada mereka, kurang produktif, dan cenderung konsumtif.

Perkembangan informasi dan teknologi memberikan andil yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Bahkan teknologi juga menjadikan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Perkembangan ekonomi akan menjadi lebih cepat apabila didukung oleh faktor kemajuan teknologi. Makin canggih teknologi, makin tinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun demikian kemajuan teknologi, tidak hanya memberikan dampak-dampak positif, namun juga dampak negatif muncul secara bersamaan. Di manapun teknologi itu hadir disuatu negara secara otomatis budayanyapun turut masuk ke dalamnya, kita dihadapkan ada dua pilihan yaitu menerima teknologi itu dengan segenap budaya yang dikandungnya atau sama sekali menolak secara mutlak teknologi itu berikut budayanya.

C. Ketahanan Sosial dalam Lingkup Keluarga

Lingkungan sosial keluarga di era digitalisasi saat ini, lebih banyak menggunakan teknologi sebagai alat penunjang kegiatan setiap hari. Seperti menggunakan *smartphone* dengan koneksi internet. Penggunaan internet menjadi alat berkomunikasi yang utama untuk berinteraksi, mendapatkan informasi, hiburan, dan bahkan untuk bekerja dan menambah penghasilan.

Perubahan pola asuh, pola pendidikan dan ritme kehidupan dalam keluarga memberikan tantangan tersendiri dalam kehidupan berkeluarga di zaman ini. Informasi-informasi yang bersifat hoaks, manipulatif, provokatif, beredar secara cepat, bahkan hingga akses pornografi, prostitusi, perjudian, penipuan, yang merupakan tindakan kriminal dikhawatirkan dapat ditiru dan memengaruhi perkembangan psikologis anggota keluarga.

Sistem nilai yang dianut dalam sebuah keluarga adalah sesuatu yang bersifat laten, namun merupakan unsur terpenting dalam sebuah peradaban karena dia merepresentasikan karakter dasar dari seseorang sebagai individu yang merupakan cerminan dari masyarakatnya, yang secara intuitif memiliki kesamaan nilai dan merupakan kesepakatan bersama. Sistem nilai itu sendiri merupakan sebuah bangunan yang berlapis yang mencakup sistem kebudayaan, sistem pendidikan, dan sistem keluarga. Pemahaman tentang nilai-nilai dasar ini dimulai pada saat seorang warga negara masih kanak-kanak melalui pengasuhan orang tuanya (Nurmalitasari, 2015).

Pada tahapan berikutnya, sistem nilai ini akan berkembang melalui sistem pendidikan ketika anak-anak tersebut mulai sekolah. Pada tahapan ini sudah mulai terjadi risiko perbenturan sistem nilai antara yang diajarkan oleh orang tua dengan yang diajarkan di sekolah. Jika yang diajarkan di sekolah tidak sejalan dengan yang diajarkan oleh orang tua, seorang anak akan mengalami konflik nilai. Konflik nilai ini bisa menyebabkan dua kemungkinan konsekuensi. Ketika sistem keluarga kuat, maka anak-anak akan memiliki kepribadian yang kuat dan mampu mempertahankan nilai-nilai tersebut walaupun sistem pendidikannya tidak kondusif. Namun, jika sistem keluarganya tidak kuat, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya dan menganggap orang tuanya sudah ketinggalan zaman sehingga sistem nilai yang dianutnya berubah sesuai dengan yang dipelajarinya di sekolah.

Ketika anak-anak itu mulai dewasa dan terjun di masyarakat, maka mereka akan berinteraksi dengan sistem budaya yang ada dalam masyarakatnya (Bronfenbrenner, 1979). Sistem budaya ini adalah sebuah sistem yang lebih terbuka dan rentan terhadap pengaruh asing di luar peradaban yang bersangkutan. Terlebih dengan adanya perubahan sosial dalam masyarakat yang disebabkan oleh globalisasi, perkembangan teknologi informasi, peningkatan mobilitas dan migrasi, maupun hubungan internasional, maka pengaruh dari sistem budaya asing menjadi tidak terelakkan, salah satunya dalam bentuk *intercultural encounter* (Kilianska-Przybyto, 2018; Qonitatin et al., 2020). Seorang warga negara yang sistem nilainya tidak kuat sejak dari keluarganya maka akan mengalami goncangan yang lebih hebat ketika berinteraksi dengan sistem budaya dalam masyarakatnya. Ilisko dan Paulina (2015) menyebutkan bahwa keluarga dengan sistem nilai yang kuat merupakan keluarga yang mampu bertahan dan adaptif terhadap situasi dan tekanan dari dunia luar.

Sistem pendidikan yang didesain oleh pemerintah pun bisa goyah ketika sistem nilai dasar dari warga negara tersebut tidak kuat karena sistem nilai yang terkandung dalam sistem budaya bisa jadi akan berbenturan dengan sistem nilai yang diajarkan dalam proses pendidikan. Kondisi tersebut tercermin dalam sistem pendidikan di Finlandia, di mana praktik pendidikan hanya dapat berlangsung dengan adanya sistem tata nilai di masyarakat yang mendukung profesionalitas pendidik (Bastos, 2017). Warga negara yang tumbuh dengan sistem nilai yang tidak koheren ini akan menjadi orang tua yang akan mewariskan nilai-nilai yang dianut tersebut pada generasi berikutnya. Hal ini diilustrasikan dengan budaya *counter culture* atau kelompok *hippie* di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an (Lutfi, 2018). *Counter culture* atau *hippie* ini merupakan budaya pada kelompok yang menentang budaya *mainstream* setempat yang ada (Dunn-Froebig, 2006). Weisner telah melakukan studi longitudinal selama 18 tahun yang mendeskripsikan karakter kelompok *hippie* meskipun hal ini diterapkan secara beragam, antara lain kebebasan berekspresi, bereksperimen, peningkatan diri, penggunaan narkoba seperti marijuana dan halusinogen, perilaku seksual yang terbuka, dan eksperimen tentang gaya hidup berkeluarga (Dunn-Froebig, 2006).

Lebih jauh lagi, budaya tersebut dilakukan secara terbuka di depan anak-anak dan dengan prinsip kebebasan yang dianut, perilaku yang sejatinya maladaptif menjadi kelaziman. Misalnya, konsumsi narkoba bersama anak yang dianggap sebagai aktivitas menghabiskan waktu bersama, perilaku seksual di bawah umur bahkan di usia di bawah 10 tahun, dan ketiadaan aturan dalam hidup (Dunn-Froebig, 2006). Dengan demikian, jika sebuah keluarga lemah, maka efeknya akan berantai dan dampak negatifnya akan jangka panjang dan baru terasa beberapa puluh tahun kemudian pada perubahan sosial dalam masyarakatnya.

Di samping itu, anak-anak ini juga akan menjadi pengambil keputusan yang akan memengaruhi sistem hukum, sistem politik, serta sistem ekonomi di masa depan. Itulah sebabnya ketika kita merasakan kekacauan di dalam sistem hukum atau sistem politik maupun sistem ekonomi, kita tidak bisa mencari sebabnya pada sistem politik, sistem hukum, maupun sistem ekonomi itu sendiri pada saat ini, namun harus kita lacak pada bagaimana para pemangku jabatan itu tumbuh dalam keluarganya dahulu. Oleh karena itu, ketika kita ingin membangun peradaban yang tinggi dan mulia kita perlu mendesain sebuah proyek perubahan jangka panjang karena yang kita lakukan terhadap keluarga saat ini baru akan terasa hasilnya 20 - 40 tahun ke depan. Dengan kata lain, jika kita sibuk dengan permasalahan ekonomi, politik, maupun hukum saat ini, tapi abai terhadap pembangunan keluarga, maka kita akan berada dalam lingkaran setan dan permasalahan peradaban kita tidak akan kunjung selesai.

Keluarga merupakan embrio dari peradaban. Jika keluarga-keluarga kuat maka akan terbangun peradaban yang kuat pula, dan sebaliknya jika keluarga-keluarga dalam suatu masyarakat lemah atau rapuh, maka peradaban yang akan terbangun juga akan rapuh. Peran dari institusi keluarga terhadap masyarakat tersebut dijelaskan dalam pendekatan struktural fungsionalis atas keluarga oleh Parsons (Parsons et al., 1961).

Peran ayah adalah peran yang sangat penting yang jika absen akan berdampak sangat fatal terhadap anaknya. Dalam sebuah penelitian oleh seorang psikolog senior di Amerika, tokoh-tokoh atheis dunia, hampir semua, pada masa kecilnya memiliki masalah dalam hubungan dengan ayahnya (Vitz, 2013). Anggapan bahwa tugas ayah adalah hanya sebagai pencari nafkah adalah sangat keliru. Bagi umat Islam kita semua tahu bahwa dalam surah Luqman peran seorang ayah adalah mengajarkan tentang hikmah kepada anak keturunannya atau generasi selanjutnya. Penelitian lain oleh seorang psikolog senior, Nicolosi (2019), kegagalan peran ayah adalah menjadi salah satu penyebab terjadinya disorientasi seksual pada anak laki-laki atau yang disebut sebagai homoseksual. Mungkin karena itulah maka Al-Qur'an sangat tegas dalam memerintahkan umat Islam untuk menyantuni anak yatim. Mengingat hasil-hasil penelitian tersebut di atas, maka menyantuni di sini tidak hanya bermakna secara ekonomis, namun juga menggantikan peran ayah sebagai figur laki-laki dewasa di dalam masa perkembangan seorang anak.

Figur ayah inilah yang diporak-porandakan oleh gerakan feminisme, yang menyebarkan aura perlawanan terhadap laki-laki. Para penganut feminisme ini terlalu fokus pada hak-hak perempuan sehingga melupakan kewajiban-kewajiban dari perannya sebagai istri maupun sebagai ibu. Para istri yang bersikap menentang para suami ini menyebabkan suami menjadi lemah, dan perannya sebagai ayah juga menjadi melemah. Berdasarkan teori analisis transaksional, proses pelemahan figur ayah dapat terjadi melalui proses komunikasi yang tidak sehat antara pasangan, sehingga individu dapat mengalami perubahan peran dan justru menjalankan peran lain yang tidak sesuai (Berne, 1996).

Melemahnya peran ayah menyebabkan anak-anak laki-laki mengalami disorientasi seksual, dan menjadi homoseksual. Oleh karena itu seperti yang disampaikan oleh seorang psikolog senior, Profesor Cummings (2012), mantan presiden Asosiasi Psikologi Amerika, gerakan feminisme ini pada akhirnya melahirkan gerakan LGBT. Jika kita ingin memahami berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam keluarga, kita harus menganalisisnya secara komprehensif dengan mempertimbangkan semua ikatan tersebut di atas. Misalnya, ketika ada informasi bahwa pernikahan dini adalah terjadi karena masalah ekonomi, pernyataan

itu sifatnya parsial dan jika kemudian diintervensi berdasarkan laporan seperti itu maka intervensinya tidak akan tuntas dan justru, bisa jadi, akan memberikan mudharat yang lebih besar. Selama ini ketika melaporkan pernikahan dini tidak ada laporan mengenai sejauh mana aspek kesusilaan memengaruhi keputusan tersebut. Misalnya, mereka sudah berpacaran terlalu lama sehingga orang tuanya lebih memilih menikahkan daripada mereka berbuat zina. Atau bisa jadi pernikahan dini dilakukan karena mereka sudah berbuat zina sehingga menikah adalah lebih baik daripada meneruskan perbuatan zina tersebut. Jadi hal-hal yang terkait dengan ibadah ini kadang tidak menjadi perhatian dari media massa dan seolah-olah pernikahan itu sendiri adalah permasalahan, padahal bisa jadi pernikahan itu adalah satu solusi terhadap permasalahan moralitas masyarakat yang semakin hari semakin memburuk.

Untuk menciptakan ketahanan keluarga yang pada akhirnya diharapkan dapat melahirkan generasi emas, maka kita perlu berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pertama, kita harus memahami hakikat dari keluarga, yaitu sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat yang mencakup dimensi ibadah, biologis, psikologis, sosiologis, dan ekonomi. Dari kelima ikatan tersebut ikatan ibadah adalah yang paling mendasar dan mewarnai keempat ikatan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam membina keluarga sangat penting untuk disadari bahwa kehidupan tidak berhenti pada kehidupan di dunia saja, namun akan berlanjut ke dalam kehidupan di akhirat. Perspektif inilah yang akan membedakan orientasi kehidupan seseorang sehingga dia akan lebih tahan dalam menghadapi berbagai permasalahan dan akan berpegang pada nilai-nilai yang bernuansa ibadah kepada Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk itu perlu dikembangkan dakwah keagamaan yang menyentuh hati dengan ilmu dan cinta. Dalam dakwah tentang ibadah perlu dilakukan pendekatan yang mendalam sehingga akan dipahami maksud dari setiap ajaran agama dan bisa dihayati serta dirasakan manfaatnya secara spiritual, psikologis, sosiologis, dan bahkan secara ekonomis serta aplikasinya dalam aspek biologis atau kesehatan.
2. Kedua, dimensi biologis termasuk kesehatan merupakan salah satu pilar yang juga akan menopang ketahanan keluarga. Pengelolaan dimensi biologis ini harus dimaknai sebagai ibadah, dan harus dipahami bahwa dimensi biologis juga sangat terkait dengan dimensi psikologis sebagai dua hal yang tak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, di dalam keluarga harus dikembangkan sikap empati dan kasih sayang sehingga setiap anggota keluarga tersebut akan merasakan ketentraman dalam rumah mereka. Pendidikan tentang cinta dan kasih sayang antar pasangan suami istri perlu dikembangkan agar hubungan antara suami dan istri tidak terasa kaku dan masing-masing bisa berempati terhadap keunikan pasangannya. Pendidikan tentang hidup sehat jasmani dan rohani juga perlu dikembangkan sehingga setiap anggota keluarga dapat menjaga kesehatan masing-masing.
3. Ketiga, secara sosiologis pembagian peran dalam keluarga harus ditata secara adil dan bijaksana. Peran ayah sebagai figur yang diharapkan dapat menjadi teladan, harus kuat dan berfungsi untuk membentuk akhlak yang kuat pada anak-anaknya. Akhlak yang mendasar adalah keyakinan dan keimanan kepada Allah dan hari akhir, serta amal soleh. Jika orang tua bertindak bijak, maka otomatis akan membentuk perilaku anak-anak yang berbakti terhadap orang tuanya. Pendidikan tentang “parenting” yang benar perlu dilakukan terhadap para calon orang tua dan juga yang sudah menjadi orang tua pada setiap tahap perkembangan anaknya.

4. Keempat, pembangunan keluarga juga perlu mencakup pendidikan tentang kemandirian ekonomi keluarga. Permasalahan ekonomi mungkin bisa dibantu dengan sumbangan atau bantuan keuangan, namun ketahanan ekonomi keluarga membutuhkan pengetahuan, sikap, dan semangat untuk kemandirian ekonomi. Sehingga setiap keluarga akan mampu menyelesaikan masalah ekonomi mereka masing-masing dan tidak tergantung pada bantuan sosial.
5. Kelima, program-program penguatan ketahanan keluarga ini perlu didukung oleh sistem informasi yang merekam kelima dimensi ikatan dalam keluarga tersebut dari waktu ke waktu.

Dengan demikian ketahanan keluarga sangat penting untuk bisa menjaga ketahanan sosial. Sehingga dalam jangka panjang akan lahir generasi emas yang akan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Tanpa ketahanan sosial yang kuat dalam keluarga, sangat besar kemungkinan terjadi mis-komunikasi, adanya mis-komunikasi keluarga menjadi dasar mis-informasi dalam bermasyarakat. Sehingga dapat menimbulkan perpecahan atau masalah yang kompleks di antara warga.

Davis memberikan gambaran bahwa ketahanan sosial yang dimiliki suatu komunitas keluarga bila:⁶⁷

1. Bisa menjadi pelindung dari pengaruh perubahan sosial kepada anggota yang rentan
2. Bisa beradaptasi dan terlibat dalam setiap partisipasi di lingkungan masyarakat, baik fisik, mental dan emosional guna membangun kebersamaan dalam lingkungan sosial
3. Dapat mengelola persoalan-persoalan secara efektif sehingga tidak menimbulkan konflik dan kekerasan

4. Bisa menjaga nilai lokalitas dalam keluarga

Ketahanan sosial keluarga yang diterapkan dalam kajian Maputra, dkk bahwa ada 4 hal yakni: ⁶⁸

1. Mandiri secara sosial
2. Kontribusi pada keluarga
3. Hidup berkesetaraan
4. Memiliki pola komunikasi yang terbuka

Selain itu juga, menurut Walsh, upaya untuk memberikan ketahanan sosial dalam membangun keluarga, antara lain:

1. Sistem keluarga yang dibangun atas kesepakatan bersama terkait perilaku beragama untuk menghindari nilai-nilai kesengsaraan hidup berkeluarga. Hal ini dapat dilakukan jika ada keyakinan transendental
2. Membangun fleksibilitas, kohesi sosial, dan penghasilan secara ekonomi
3. Komunikasi untuk membangun emosi pasangan suami-istri secara terbuka. Konteks ini sebagai bagian dari penyelesaian masalah keluarga yang menciptakan suasana nyaman dan kolaborasi antar pasangan.⁶⁹

Dengan demikian, kondisi tersebut jika diimplikasikan secara nyata dalam keluarga akan menjadi dasar pijakan untuk ketahanan sosial berkeluarga.

⁶⁷ Marwanti, "Ketahanan Sosial Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Komunitas Adat Kampung Pulo Di Kabupaten Garut," hlm 284

⁶⁸ Maputera et al., "Membangun Ketahanan Sosial Keluarga Melalui Budaya Batobo

⁶⁹ Siahaan, "Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial," Hlm 82-96

D. Fungsi Keluarga sebagai Penopang Ketahanan Sosial

Keluarga yang mampu menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya dengan baik akan mampu bertahan dan memiliki kekuatan dalam menghadapi permasalahan. Ketika keluarga mampu menyelaraskan dan menjalankan fungsinya dengan baik, dapat dipastikan ketahanan sosial akan terbentuk secara otomatis. Karena di dalam setiap keluarga ada pembelajaran proses kehidupan melalui tugas, tanggungjawab dan fungsi yang berjalan dari setiap anggota keluarga. Semua itu menjadi bagian dari pengalaman nyata setiap anggota keluarga untuk bisa bertahan.

Untuk dapat bisa kuat dalam dalam ketahanan sosial, keluarga juga harus berfungsi secara baik. Ada beberapa fungsi keluarga di antaranya:

1. Menurut Munandar yakni:⁷⁰
 - a. Mengatur seksual dalam keluarga
 - b. Reproduksi
 - c. Bermasyarakat
 - d. Perawatan anggota keluarga
 - e. Menempatkan anggota keluarga dalam masyarakat
 - f. Pemenuhan kebutuhan keluarga
 - g. Kontrol sosial
2. Menurut Silalahi terdapat 8 fungsi keluarga yang dapat dicermati, yaitu:⁷¹
 - a. Fungsi agama, pemahaman tentang praktik-praktik ritual dan ajaran keagamaan kepada anggota keluarga
 - b. Sosial dan budaya, pengenalan musik, seni kedaerahan, norma masyarakat
 - c. Fungsi kasih sayang, memberikan pemahaman cinta dan kasih sayang kepada sesama
 - d. Fungsi perlindungan, menjaga kesehatan, melindungi dari gangguan, memberikan keterbukaan kepada anak agar anak dapat bercerita tentang perasaannya
 - e. Fungsi reproduksi, kelahiran anak, pentingnya kesehatan reproduksi, menjaga kebersihan, dll
 - f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, memberikan pengajaran bergaulan di lingkungan sekitar
 - g. Fungsi ekonomi, penanaman kesadaran ekonomi melalui menabung, kesederhanaan dan sebagainya
 - h. Fungsi lingkungan, menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui tidak merusak tanaman, tidak membuang sampah sembarang

Fungsi keluarga sangatlah penting guna membangun kekuatan ketahanan sosial keluarga. Karena ketahanan sosial keluarga hanya akan mampu tercipta jika fungsi keluarga dilakukan dengan baik. Ketika keluarga menjalankan fungsi agama dengan baik, akan memberikan pengaruh melalui pengalaman dan pengetahuan kepada masing-masing anggota keluarga. Pengalaman dan pengetahuan agama dari dalam keluarga diharapkan nantinya mampu

⁷⁰ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar: Pendekatan Problem Solving Dan Analisis Kasus*, Yogyakarta: UNY Press, 2012, hlm 109.

⁷¹ Eko A Meinarno Karlinawati Silalahi, *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm 184

memengaruhi bagaimana seseorang bisa bertahan dalam lingkungan yang lebih luas. Contoh, Tuhan melarang kita umatNya untuk menjelek-jelekkan atau membuka aib orang lain. Pelajaran ini akan memberikan dampak positif bagi seseorang anggota keluarga ketika ia akan berinteraksi dengan orang lain. Keluarga dengan banyak fungsi yang ada di dalamnya secara umum dapat membentuk kekuatan individu dari maksimalnya fungsi keluarga itu sendiri.

E. Ketahanan Sosial dalam Keberagaman

Membangun dan memperkuat ketahanan sosial tidak bisa terlepas dari pengaruh faktor lingkungan dan keluarga. Lingkungan keluarga memiliki keragaman nilai, kultur dan budaya tentu akan memiliki cara pandang yang multikultural. Keanekaragaman atau masyarakat multikultural adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa lepas di masyarakat. Masyarakat yang majemuk dan multikultural biasanya memiliki kesadaran bersama yang tinggi, baik di bidang politik, agama ataupun budaya. Adanya kesadaran bersama dapat terwujud melalui usaha untuk saling menghargai antar sesama, sehingga mampu meminimalisir konflik / permasalahan antar warga.

Membangun konsep ketahanan sosial keluarga perlu menamakan nilai keberagaman, bahwa perbedaan suku, budaya, dan agama merupakan kuasa Tuhan yang patut disyukuri. Kesadaran diri terhadap orang lain dalam hal perbedaan dan keragaman sebagai modal sosial untuk menjaga kehidupan bermasyarakat. Kesadaran tersebut merupakan bagian dari nilai positif dalam proses interaksi sosial.

Untuk membangun ketahanan sosial keluarga dalam keberagaman perlu memperhatikan hal-hal berikut yakni:⁷²

1. Membangun harmoni interaksi sosial yang akan menciptakan keselarasan sosial. Keselarasan akan terwujud jikalau masyarakat mampu menjaga keseimbangan (at-tawazun), menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada (at-tasamuh), dan mampu bersikap dan tegas dalam bertindak (al-`adalah). Harmoni interaksi sosial, sebuah keseimbangan interaksi sosial yang berjalan secara harmonis dalam sebuah tatatan sosial yang akan menjadikan setiap perbedaan sebagai keragaman.
2. Adanya empati sosial dalam masyarakat. Ketika setiap warga masyarakat mampu memahami dan sadar akan identitas sosial seseorang dapat menjadikan meningkatnya kapasitas empati. Kesadaran diri (*self-aware autonomy*) tersebut menjadikan berkurangnya klaim benar dan salah. Setiap orang harus sadar bahwa setiap orang memiliki perbedaan dan perbedaan memiliki keunikan tersendiri.
3. Adanya ketidak agresifan seseorang, karena manusia dengan yang memiliki perilaku agresif dominasi kecondongan sikap egoisme. Selain itu kecenderungan agresif juga didominasi oleh sikap-sikap pemikiran kekerasan. Termasuk juga ketika pikiran dipengaruhi oleh rasa frustrasi. Kesemuanya itu menjadikan rasa keadilan menjadi ternodai, dan sangat susah didapatkan.
4. Faktor sosial budaya yang memengaruhi Ketahanan Nasional RI. Bidang sosial budaya merupakan salah satu aspek yang mampu memperkuat ketahanan nasional suatu bangsa, begitu juga dengan ketahanan nasional Indonesia. Berikut di bawah ini adalah faktor aspek sosial budaya dalam ketahanan nasional:

⁷² Moh Rosyid, "Harmoni Kehidupan Sosial Beda Agama Dan Aliran Di Kudus," *Addin* 7, no. 1 (2015): hlm 55-56, <https://doi.org/10.21043/addin.v7i1.569>.

a. Struktur sosial

Struktur sosial atau pengelompokan masyarakat berdasarkan status sosial, kedudukan atau pekerjaan dibuat untuk mempermudah pelaksanaan tugas kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk menempatkan seseorang pada posisi tertentu dengan fungsi tertentu di masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial di mana mereka berada. Struktur sosial harus terjaga dengan baik untuk kepentingan ketahanan nasional yang ada di budaya kita.

b. Pengawasan sosial

Pengawasan atau kontrol sosial dijadikan sebagai sistem dan prosedur untuk mengatur atau mengawasi kegiatan atau tindakan masyarakat. Pengawasan digunakan untuk mengantisipasi ancaman, tantangan, dan halangan di lingkungan masyarakat dalam kehidupan beragama, ideologi, kebudayaan, serta sistem hukum yang berlaku.

c. Media sosial

Media sosial sebagai perantara atau alat, materiil maupun spiritual untuk mewujudkan ketahanan sosial. Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial dalam ketahanan sosial digunakan oleh struktur sosial tertentu dalam kondisi yang terintegrasi.

d. Standar sosial

Standar sosial digunakan sebagai tolak ukur dalam meneliti dan menyeleksi norma, budaya, sikap dan cara hidup yang memiliki sistem nilai. Sistem nilai ini mencerminkan kualitas suatu objek yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat di mana mereka menetap dan tinggal sehingga ketahanan sosial dan nasional dapat terjaga dengan baik.

F. Peran Sosial Budaya dalam Ketahanan Nasional

Bhinneka Tunggal Ika merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan Bhineka Tunggal Ikalah keanekaragaman dengan segala perbedaan yang ada baik budaya, adat istiadat, agama dan lain sebagainya dapat dipersatukan. Bahkan mampu mempersatukan generasi muda sehingga mampu memperkuat ketahanan nasional.

Generasi muda penerus bangsa merupakan pilar terdepan dalam mendukung dan memperjuangkan ketahanan nasional. Generasi muda dibutuhkan untuk mengembangkan, membangun dan mengatasi berbagai macam isu dan tantangan global yang ada di depan mata melalui pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan dengan baik untuk mencapai tujuan nasional. Selain generasi muda, tentunya pilar lainnya seperti masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan nasional. Kehidupan sosial bermasyarakat dengan nilai kebersamaan dan tenggang rasa dijadikan sebagai unsur pemersatu bangsa dalam mencapai tujuan ketahanan nasional.

Dalam budaya terdapat cara hidup yang berkembang, dimiliki dan diwariskan oleh kelompok dari generasi ke generasi. Di dalam cara hidup itu sendiri memiliki tata kelakuan tersendiri yang berasal dari pelajaran yang ada di masyarakat tempat ia berada. Ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya tercermin dari sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi, toleransi, dan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa. Kebudayaan nasional merupakan gabungan budaya lokal dan asing

dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan nilai luhur bangsa sehingga bisa diterima dan berlaku di masyarakat tanpa unsur paksaan. Untuk memperkuat ketahanan nasional tentunya kita harus mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak tertinggal seperti negara-negara lain, tetapi tentunya adopsi budaya luar yang masuk tentunya harus disaring, sehingga tidak ada yang bertentangan dengan budaya lokal, bahkan diharapkan dapat memperkuat dan memperkaya budaya lokal itu sendiri.

Penggabungan budaya yang telah disaring ini menjadi identitas bangsa dengan rakyat yang memiliki sifat dasar religius, kekeluargaan, hidup yang seimbang, dan kerakyatan. Dengan berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945 dan semboyan negara 'Bhinneka Tunggal Ika' maka ketahanan nasional dalam kehidupan sosial budaya dapat terjaga karena diimplementasikan oleh seluruh elemen masyarakat.

Namun, di balik semua itu, keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab munculnya konflik baru, seperti putusnya persahabatan, perkelahian antar kampung, perkelahian antar pelajar, dan sebagainya.

G. Permasalahan & Dampak Negatif Keberagaman

Dampak merupakan kausalitas dari suatu proses. Interaksi dalam keberagaman tentunya akan selalu melahirkan dampak, baik positif maupun negatif. Beberapa dampak negatif yang memungkinkan muncul dalam keberagaman masyarakat di Indonesia adalah:

1. Muncul konflik horizontal pada masyarakat. Misalnya terjadi perselisihan dalam masyarakat karena perbedaan kepercayaan.
2. Hadirnya sikap primordialisme, yakni pandangan untuk selalu berpegang pada hal-hal yang dibawa semenjak kecil terkait tradisi, adat, kepercayaan, dan sebagainya.
3. Munculnya sikap etnosentris, yakni pandangan yang menganggap suku bangsa sendiri lebih baik dari suku lain.
4. Terjadi fanatisme berlebihan yaitu menganggap keyakinan sendiri lebih benar secara berlebihan dan menyalahkan keyakinan lain.

Sementara itu, jika dampak negatif keberagaman justru mendominasi dalam masyarakat, maka bisa memicu berbagai jenis konflik sosial. Beberapa jenis konflik tersebut yaitu:

1. Konflik Antarsuku. Konflik ini melibatkan pertentangan suku satu dengan lainnya. Pemicu umumnya adalah perbedaan adat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial masyarakat. Jika masyarakat tidak bisa saling memahami perbedaan yang ada, maka dimungkinkan terjadi konflik di dalamnya.
2. Konflik Antaragama. Dalam konflik ini terjadi pertentangan antara kelompok dengan keyakinan atau agama berbeda. Konflik antaragama dapat muncul secara perorangan atau kelompok.
3. Konflik Antarras. Perbedaan ras juga bisa memicu konflik sosial. Konflik ini dipicu oleh sikap rasialis yang memperlakukan orang dengan cara berbeda hanya karena berasal dari ras yang tidak sama.

4. Konflik Antargolongan. Pada konflik ini kelompok atau golongan dalam masyarakat saling mengalami pertentangan. Beberapa pemicunya terkait dengan pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya.

Berbagai keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya bisa memperkaya kebudayaan. Perpecahan hanya akan membuat kerugian. Maka hal yang perlu dilakukan adalah mengembangkan sikap toleransi dan tenggang rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan masyarakat. Toleransi mesti diajarkan sejak dini agar pemahaman mengenai perbedaan telah dimengerti jauh-jauh hari.

Sikap dan perilaku toleransi dapat membawa keberagaman yang ada di masyarakat mengerucut dalam semangat persatuan dan kesatuan. Setiap orang saling memahami bahwa keberagaman itu bukan aib untuk dipertentangkan. Akan tetapi, adanya perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan antargolongan dapat hidup secara berdampingan dalam masyarakat dengan nuansa kerukunan. Oleh karena itu penguatan generasi muda menjadi penting untuk menciptakan keselarasan dan keharmonisan dalam keanekaragaman baik golongan, agama, ras bahkan antar semua suku yang ada di Indonesia. Menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda dari sekarang diyakini akan mampu memberikan sumbangsih dalam memperkuat ketahanan nasional.

Daftar Pustaka

- Adi Nugroho, dkk, *Ketimpangan Gender 2022*, volume1, 2023, Badan Pusat Statistik
- Ahmad Fikri, <https://redasamudera.id/definisi-gender-menurut-para-ahli/>
- Asghar Ali Engineer, 2018, *Tafsir Perempuan antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, 2014, 6
- Chaidir Basrie, *Pemantapan Wawasan Nusantara Menuju Ketahanan Nasional*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, 2002, hlm.14
- Dawam Raharjo, *Pembangunan Ekonomi Nasional: Suatu Pendekatan, Pemerataan, Keadilan, dan Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Intermasa, 1997, hlm. 208.
- Endang Zaelani Sukaya, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, 2002
- Froma wals, *Strengthening Family Resilience edisi 3*,2016
- George Ritzer, *Teori Sosiologi, dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern, (terjemahan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, 10
- <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/12/para-ayah-harus-baca-agar-indonesia-tidak-menjadi-fatherless-country>
- <http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2016/05/20/undp-dan-harian-kompas-bermitra-untuk-sdg-diskusi-panel-pertama-diselenggarakan-in-jakarta/>
- <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/02/080000486/mengenal-17-tujuan-sdgs-pembangunan-berkelanjutan-beserta-penjelasan>
- <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5406950/5-kesalahpahaman-tentang-feminisme-yang-paling-banyak-terjadi?page=3,27Okt2023>
- <https://www.dw.com/en/charles-fourier-the-man-who-coined-the-term-feminism/a-61379159,04-07-2022>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/21/153100365/6-hal-tentang-habis-gelap-terbitlah-terang-kumpulan-surat-kartini-yang?page=all>
- [https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Persatuan_Wanita_Republik_Indonesia_\(PERWARI\)](https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Persatuan_Wanita_Republik_Indonesia_(PERWARI))
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>
- <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/629-ketahanan-keluarga-fondasi-ketahanan-nasional,2019>
- <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/908-agus-widjojo-ketahanan-keluarga-merupakan-fondasi-ketahanan-nasional>
- Jhon M. Echol dan Hassan Shadily, 1996, *Kamus Besar Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 265
- John Piaris, *Strategi Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional*, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm. 76-77.
- Kristina, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5689524/6-keuntungan-letak-geografis-indonesia-posisi-strategis-tanah-subur,20-08-2021>

- Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, diterjemahkan oleh Mundi Rahayu, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2007, 501
- Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, 177
- Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997, 9
- Merriam Webster.com*, MerriamWebster,
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/feminist>. Diakses 10 April 2024.
- Monica Ayu Caesar Isabela, Pengertian dan Hakikat Wawasan <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/01000021/pengertian-dan-hakikat-wawasan-nusantara>.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008 hal. 42
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina, 1999, 35.
- Nunuk P. Murniati, *Getar Gender Perempuan Indonesia dalam perspektif Sosial, Politik, Ekonomi Hukum dan Ham*, Magelang: IKAPI, 2014, 6.
- Nur Wasilatus Sholeha, Pengertian Wawasan Nusantara, Fungsi, Asas, Tujuan, dan Unsur Dasar, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7306362/pengertian-wawasan-nusantara-fungsi-asas-tujuan-dan-unsur-dasar>
- Parnusa, *Perjuangan Amanat Rakyat Nusantara*, Jakarta: PT. Purnusatama Cemerlang, 1998, hlm. 24
- Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol.7(2) 2019
- Randy Syach Hadinata, Perempuan dalam Kungkungan Masyarakat Patriarki, <https://geotimes.co.id/opini/perempuan-dalam-kungkungan-masyarakat-patriarki/>
- Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* Bandung: Mizan Media Utama, 1999, 177.
- Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, 2
- Sartono Kartodirdjo, *Integrasi Nasional*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1993, hlm. 85.
- Seieun, & Chang, S. J. (2014). Concept analysis: Family resilience. *Journal of Nursing*, 4, 980-990.
- Sulastin Sutrisno, *Surat-Surat Kartini, Renungan tentang dan Untuk bangsanya*, Djambatan, 1985: xvii
- Sunarso, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press, 2006, hlm. 165
- Sunarso, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press, 2006, hlm. 166-167
- Soelaeman, M.I. *Pendidikan Dalam Keluarga; Buku 1 Keluarga: Pengertian Dasar*, Bandung: Alfabeta, 1994. hal 123
- Tesa Oktiana Surbakti, <https://mediaindonesia.com/author/109/tesa-oktiana-surbakti,08-10-2020>

- Tholhah Imam, dkk., *Mewaspada dan Mencegah Konflik Antar Umat Beragama*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia Proyek Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama, 2001, hlm. 61.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet.2, ed.3, 2002, 856
- Tong, Rosmerie, *Teori Feminis, Feminismus*, Boulder Colorado, 2009
- Wahyu Ms, *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986 hlm 57

Tentang Penulis



Dr. Luh Putu Vera Astri. Penulis lahir di Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 April 1976. Penulis adalah Dosen Tetap pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Publik Fakultas Perlindungan Masyarakat. Menyelesaikan Pendidikan D4 di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan melanjutkan S2 dan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.



Arwanto Harimas Ginting, S.STP, M.Si. Penulis Adalah Dosen Tetap pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Program Studi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan. Menyelesaikan Pendidikan Diploma IV di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Melanjutkan Pendidikan Magister Ilmu Administrasi Pemerintahan Daerah pada Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

